

**PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI
POLITISI TAHUN 1987-1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh:

**Jovita Ria Catur Wardani
NIM : 011314018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

SKRIPSI

**PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI
POLITISI TAHUN 1987-1999**

Oleh:

Jovita Ria Catur Wardani

NIM: 011314018

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Soewarno, S. H.

25 Mei 2006

Tanggal.....

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J. R. S. Th

25 Mei 2006

Tanggal.....

SKRIPSI
PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI
POLITISI TAHUN 1987-1999

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Jovita Ria Catur Wardani

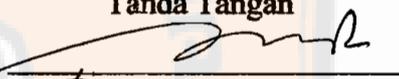
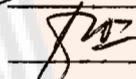
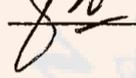
NIM : 011314018

Telah Dipertahankan di depan Panitia Penguji,

Pada tanggal 10 Juni 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji:

	Naman Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J. R, S. Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M. Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J. R, S. Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M. Pd.	

Yogyakarta, 10 Juni 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan.




Drs. T. Sarkim, M. Ed, Ph. D

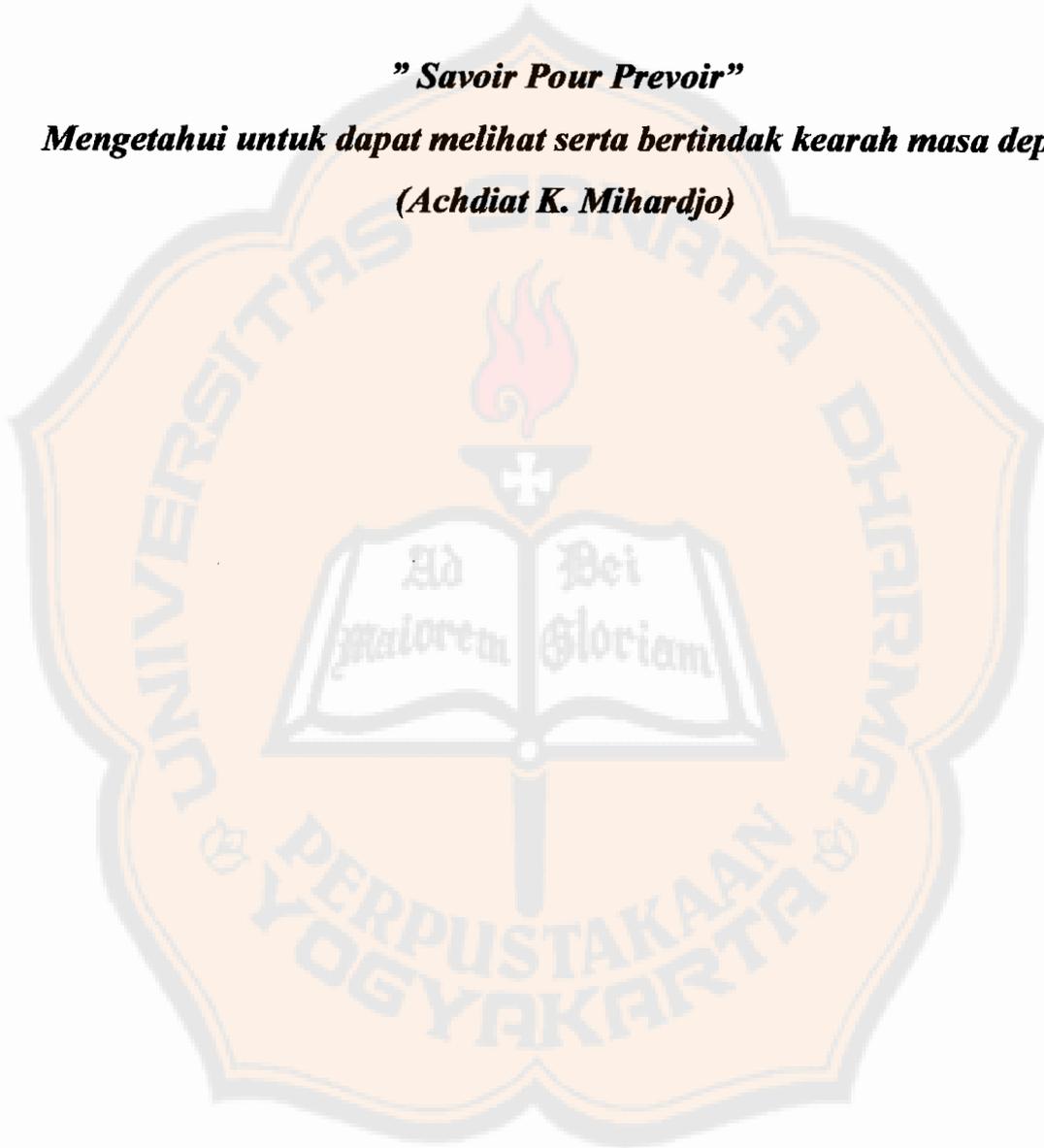
MOTTO:

***Kesuksesan belajar bukan hanya karena kecerdasan semata tetapi
dari besarnya kemauan dan kesungguhan hati***

” Savoir Pour Prevoir”

Mengetahui untuk dapat melihat serta bertindak kearah masa depan

(Achdiat K. Mihardjo)



PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang kudus.*
- ❖ *Yang tercinta Bapak Yohanes Rachmat Widyanto dan Ibu Theresia Wahyuningsih.*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta Mbak Tanti, Mbak Ita, dan Mas Hakso dan adekku Edo.*
- ❖ *Om Kis dan Bulek Martina.*
- ❖ *Suster Rita, ADM dan Suster Anita, RGS.*
- ❖ *Sahabatku Yulita Aryanti Widiuntari dan Agustina Vinastuningrum.*
- ❖ *Teman-teman karibku Eppi, Minnie, Bondan, Deni, Dibyo, Alit, Arum, Rita, Indah, Sr, Roberta, dan Sr. Susana.*

Pernyataan Keaslian Karya

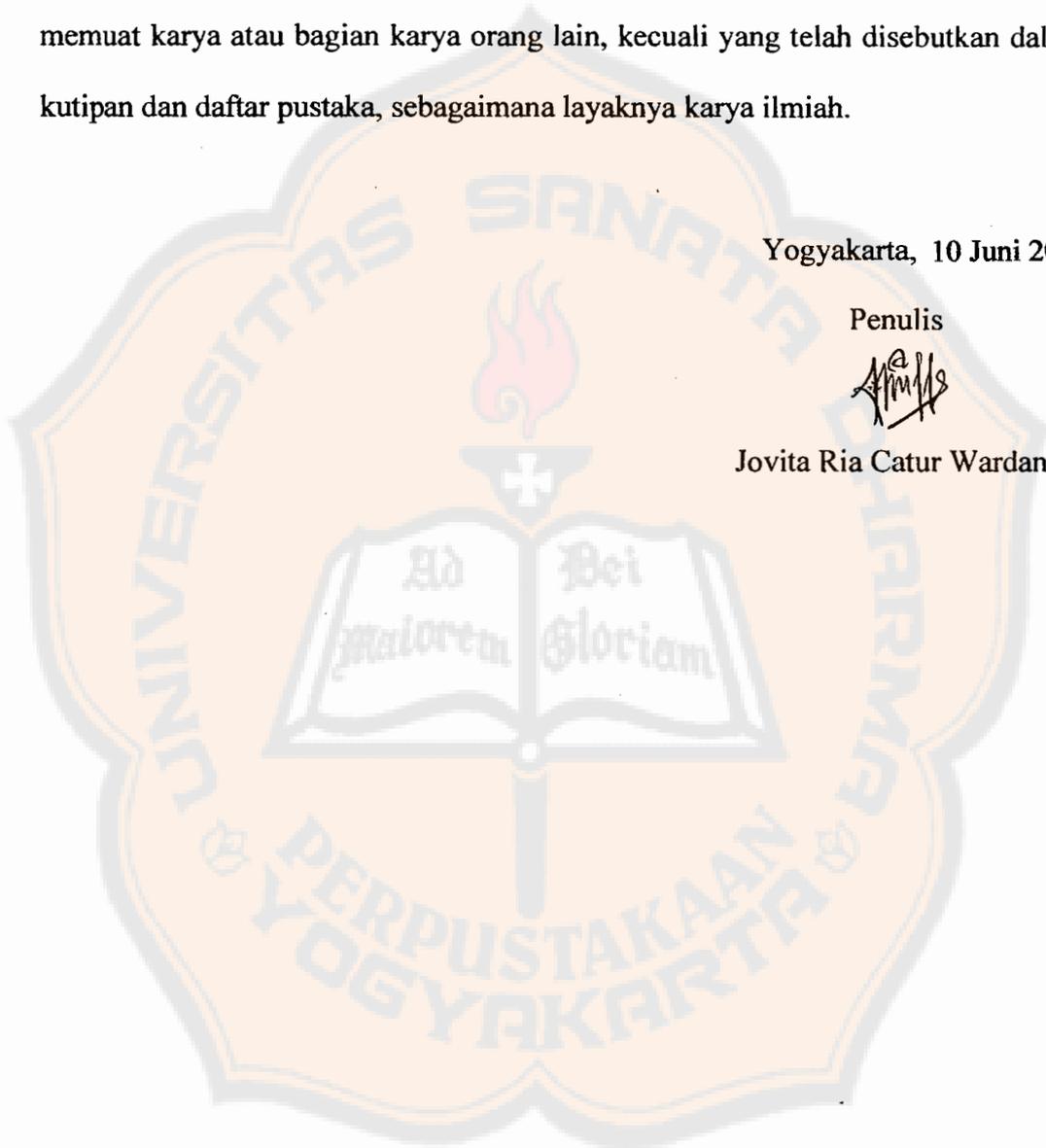
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Juni 2006

Penulis



Jovita Ria Catur Wardani



ABSTRAK
PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI
POLITISI TAHUN 1987-1999

Oleh : Jovita Ria Catur Wardani
NIM : 011314018

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa **“Peranan Megawati Soekarnoputri Sebagai Politisi Tahun 1987-1999”**. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengalaman politik Megawati Soekarnoputri dari masa kanak-kanak tahun 1947-1987?, bagaimana peranan Megawati Soekarnoputri dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tahun 1987-1993?, dan mengapa Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan perebutan jabatan ketua umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tahun 1993-1999?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah ini mencakup pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, psikologis, dan sosiologis. Penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Pertama, menjabarkan tentang pengalaman politik yang dialami oleh Megawati Soekarnoputri sejak ia kanak-kanak sampai akhirnya ia memutuskan untuk terjun dan berkarier dalam dunia politik nasional. Ia mendapat pendidikan politik bukan dari pendidikan sekolah tetapi ia peroleh dari guru besarnya yang juga ayahnya sendiri yaitu Bung Karno. Ia terjun dalam dunia politik atas ajakan dari Drs. Soerjadi yang pada saat itu merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Maka Megawati kemudian bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia sebagai juru kampanye.

Kedua, membahas tentang sejarah singkat berdirinya Partai Demokrasi Indonesia yang terbentuk sebagai hasil fusi dari lima partai pada masa Orde Lama. Partai yang pada awal terbentuknya sudah dipenuhi oleh konflik intern dan masalah-masalah lain yang timbul karena adanya perbedaan ideologi antara partai-partai yang ikut berfusi dalam PDI. Setelah masuknya Megawati dalam PDI, ia mempunyai peranan yang menguntungkan PDI karena dengan bergabungnya Megawati dalam PDI meningkatkan perolehan suara PDI dalam pemilu selama dua periode yakni Pemilu 1987 dan 1992. Peranan Megawati semakin tampak dan kariernya dalam politik semakin pasti dengan tampilnya Megawati sebagai kandidat calon Ketua Umum PDI dalam KLB PDI di Surabaya pada tahun 1993. Melalui KLB tersebut Megawati terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara *de facto* dan diakui secara aklamasi melalui Munas PDI tahun 1993 di Jakarta.

Ketiga, Megawati mulai memimpin PDI. Tetapi belum lama ia menjalankan tugasnya sebagai Ketua umum PDI, perjalanan kariernya sudah mendapatkan berbagai perlawanan sebagai upaya untuk menyingkirkannya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDI baik dari pihak intern maupun dari pihak pemerintah. Mulai dari melaksanakan kongres PDI di Medan dengan memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI sampai pada penyerbuan kantor DPP

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PDI pimpinan Megawati di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat yang dikenal dengan "Insiden Sabtu Kelabu" 27 Juli 1996. Keberuntungan berada dipihak Megawati, karena setelah peristiwa 27 Juli tersebut dukungan terhadap Megawati semakin besar. Kepemimpinan Megawati juga semakin diakui setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B.J Habibie. Setelah B. J. Habibie menjadi presiden, Megawati mendapatkan ijin untuk melaksanakan Kongres V PDI di Sanur, Bali. Kongres tersebut diawali dengan deklarasi nama PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Megawati pun diakui keberadaannya oleh pemerintah dan pada Pemilu 1999 ikut serta menjadi kontestan. Dalam Pemilu 1999 PDI-Perjuangan memperoleh kemenangan mayoritas meskipun dalam Sidang Umum MPR upaya memperjuangkan Megawati sebagai calon presiden mengalami kegagalan.



ABSTRACT

**ROLE OF MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
AS A POLITICIAN IN 1987-1999**

By Jovita Ria Catur Wardani

NIM : 011314018

The aimed on research to describe and analyze the **“Role of Megawati Soekarnoputri as a Politician in 1987-1999”**. In this research, there are three issues would be discussed, that are how Megawati Soekarnoputri experiences in politic since her childhood, 1947-1987?, how Megawati Soekarnoputri roles in the fraction of Indonesian Democracy Party, 1987-1993?, and why Megawati Soekarnoputri won in the position fighting as the general chairwoman of the Indonesian Democracy Party 1993-1999?.

The method used in this research was a historical method. The method steps in this research are including the topic selection, heuristic, resources criticism, interpretation and historiography. The approach being used is political, psychological, and sociological approach. This writing was studied by an analytical descriptive method one.

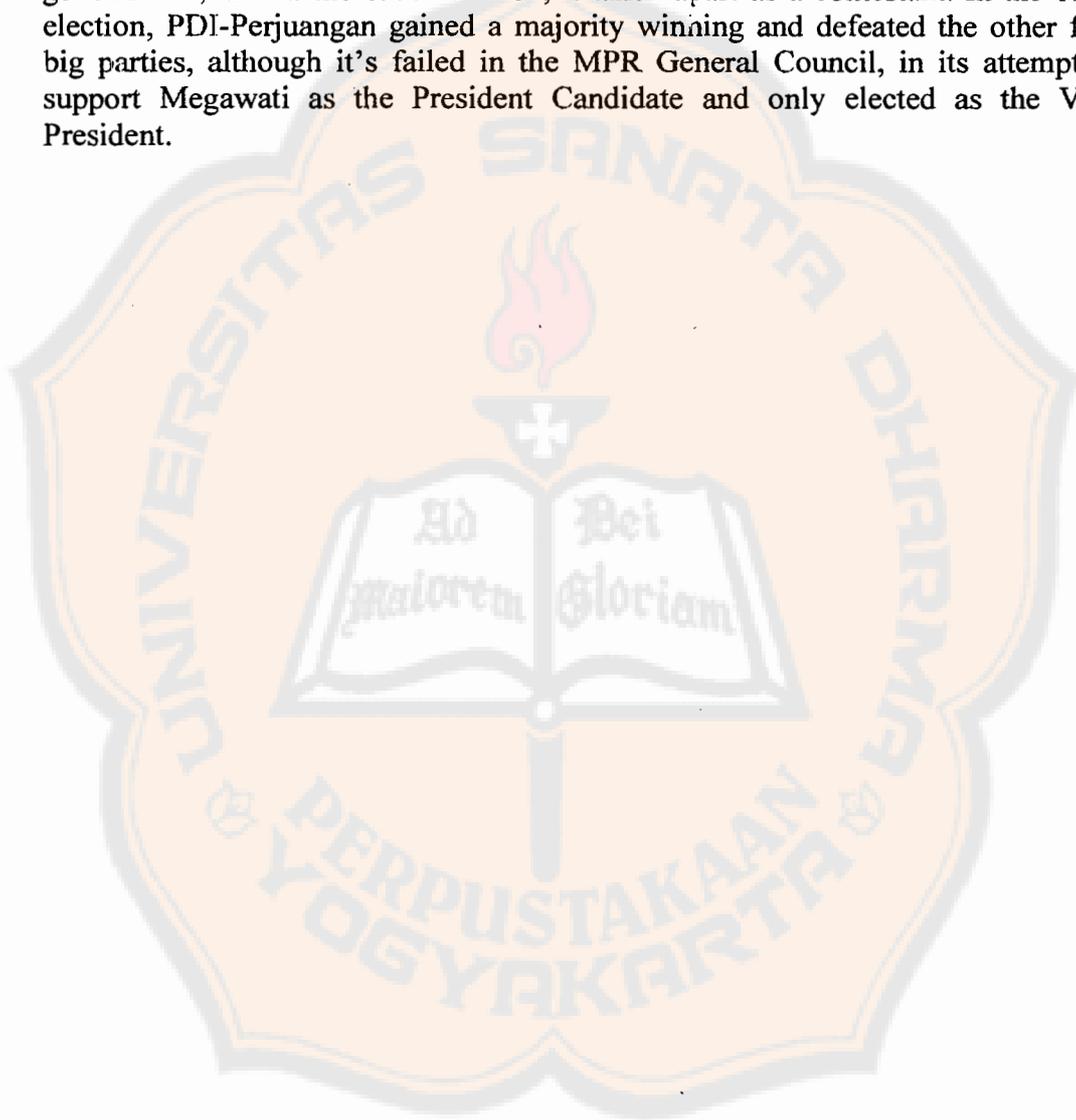
The first is describing about political experiences of Megawati Soekarnoputri since her childhood, and finally she decided to enter to the political field and had having her career in the national politic. She had has her politic education was not from a formal education school but he got it from her master and also her father that is Mr. Soekarno. She entered to the politic field because of the stimulus of Drs. Soerjadi, who was a General Chairman of the Indonesian Democracy Party. Thus she joined the Party as a campaigner.

Second, was elaborating about a brief story of the establishing of the Indonesian Democracy Party, it's established as the result of the five party fusion of the Old Order. This party initially was fully of intern conflicts and the other problems emerged because of some difference ideologies between the parties taken apart in the fusion in the PDI. After her entering to PDI, she has a benefit role for PDI because her join in PDI was increasing the party's votes in the election for two periods that was in 1987 and 1992 election. Her role was emerging and her career in politic became getting sure by her presentation as the General Chairwoman of the PDI in a KLB (Konggres Luar Biasa- Unordinary Congress) in Surabaya in 1993. By this KLB Megawati was elected as the General Chairwoman of the PDI DPP of the 1993-1998 periods, in a *de facto* way and being admitted by the PDI National Congress in Jakarta.

Third, Megawati began to lead PDI. But it's not in a longer time, she do her jobs, as the Chairwoman of PDI, her career trip had had a lot of challenges as an attempt to expel her of the General Chairwoman Position of PDI both from intern and from the government fortification. It began from the PDI congress conduction in Medan by reelected Soerjadi as the General Chairman of the PDI up to the attacking of the PDI office led by Megawati in Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, well known as a “Black Saturday Incident” on July 27th, 1996. The fortune

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

accompany Megawati, because after the July 27th incident, her supporter increasingly larger. Her leadership was also to be admitted. She became more trustable after Soeharto overthrown of his position as a president and being replaccd by B.J Habiebie. After B.J Habibie became president, Megawati has a permit to have the V Congress in Sanur Bali. The congress was begun by a declaration of the new name of PDI, that is PDI – Perjuangan (Struggle PDI). The PDI Perjuangan led by Megawati was admitted of her existence by the government, and in the 1999 election, it taken apart as a contestant. In the 1999 election, PDI-Perjuangan gained a majority winning and defeated the other five big parties, although it's failed in the MPR General Council, in its attempt to support Megawati as the President Candidate and only elected as the Vice President.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kuhaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang kudus atas kasih dan karunia-Nya yang luar biasa memenuhi hidupku. Tiada balasan yang dapat kupersembahkan sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan kemurahanmu.

Ada begitu banyak pihak yang memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik dari pihak kaprodi, keluarga, sahabat dan teman-teman. Atas semua dukungan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini menjadi berkat yang bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan ini secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Dekan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Soewarno, S.H, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sutaro Adisusilo J.R, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
6. Seluruh dosen Universitas Sanata Dharma khususnya dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membimbingku selama kuliah.
7. Sekretariat Pendidikan Sejarah, Mas Sidik yang dengan sangat sabar melayani segala keperluan saya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Bapak dan Ibu tercinta, segala doa, dukungan, dan cinta yang diberikan dapat terasa dalam perjuangan hidup saya, sehingga saya dapat lulus dari salah satu tantangan hidup ini.
9. Suster “bude” Rita, ADM, dan Suster “bude” Anita, RGS terima kasih atas doa dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Om Kis dan bulek Martina, terima kasih sudah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak-kakakku dan adikku, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabatku Widi dan Vivin, terima kasih kalian telah mengisi hari-hariku dan mendukungku selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-temanku semua Eppi, Minni, Deni, Bondan, Dibyo, Alit, Arum, Rita, Sr. Roberta, Sr. Susana dan semua teman-teman angkatan 2001, terima kasih dukungan kalian dan pertemanan kalian.

Dengan rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan dalam skripsi ini. Akhir kata, tiada gading yang takkan retak, saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Maka saya mohon saran dan kritik yang nantinya akan berguna bagi saya.

Yogyakarta, 20 Mei 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Landasan Teori	13
F. Hipotesis	25
G. Metode Penelitian dan pendekatan	27
H. Sistematika penulisan	36
BAB II. PENGALAMAN POLITIK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DARI MASA KANAK-KANAK TAHUN 1947-1987	39
A. Masa Kecil Megawati Soekarnoputri	39
B. Pendidikan Megawati Soekarnoputri	43
C. Pendidikan Politik Megawati Soekarnoputri	49
D. Kehidupan Keluarga Megawati Soekarnoputri	51
E. Terjunnya Megawati Soekarnoputri Dalam Dunia Politik	56

**BAB III. PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1987-1993 .. 61**

A. Partai Demokrasi Indonesia	61
A. 1. Sejarah Singkat Berdirinya Partai Demokrasi Indonesia ...	61
A. 2. Konflik Intern dan Masalah-Masalah Lain yang Muncul Dalam Tubuh Partai Demokrasi Indonesia	67
B. Peranan Megawati Soekarnoputri Dalam Partai Demokrasi Indonesia Tahun 1987-1993	78
C. Megawati Soekarnoputri Dalam KLB PDI di Surabaya Tahun 1993	86

**BAB IV. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI MAMPU MEMENANGKAN
JABATAN KETUA UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA TAHUN 1993-1999 101 |**

A. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Dalam Partai Demokrasi Indonesia	101
B. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Dalam PDI Dihantam oleh Badai Politik	109
B.1 Munculnya DPP Resuffle Pimpinan Yusuf Merukh	111
B. 2. Kongres IV (Kedua) PDI di Medan: Pembelotan Fatimah Achmad dari DPP PDI Megawati	114
B. 3. Peristiwa 27 Juli 1996, Puncak Penggusuran Megawati Soekarnoputri	128
C. Hikmah dari “Insiden Sabtu Kelabu” 27 Juli 1996 bagi Karier Politik Megawati Soekarnoputri	134
D. Pemilu 1997: Megawati Soekarnoputri Menentukan Sikap Golput	136
E. Pengakuan Pemerintah Terhadap PDI-Perjuangan Pimpinan Megawati Soekarnoputri	144
F. Megawati Soekarnoputri: Kemenangan Mayoritas PDI-Perjuangan Dalam Pemilu 1999	152

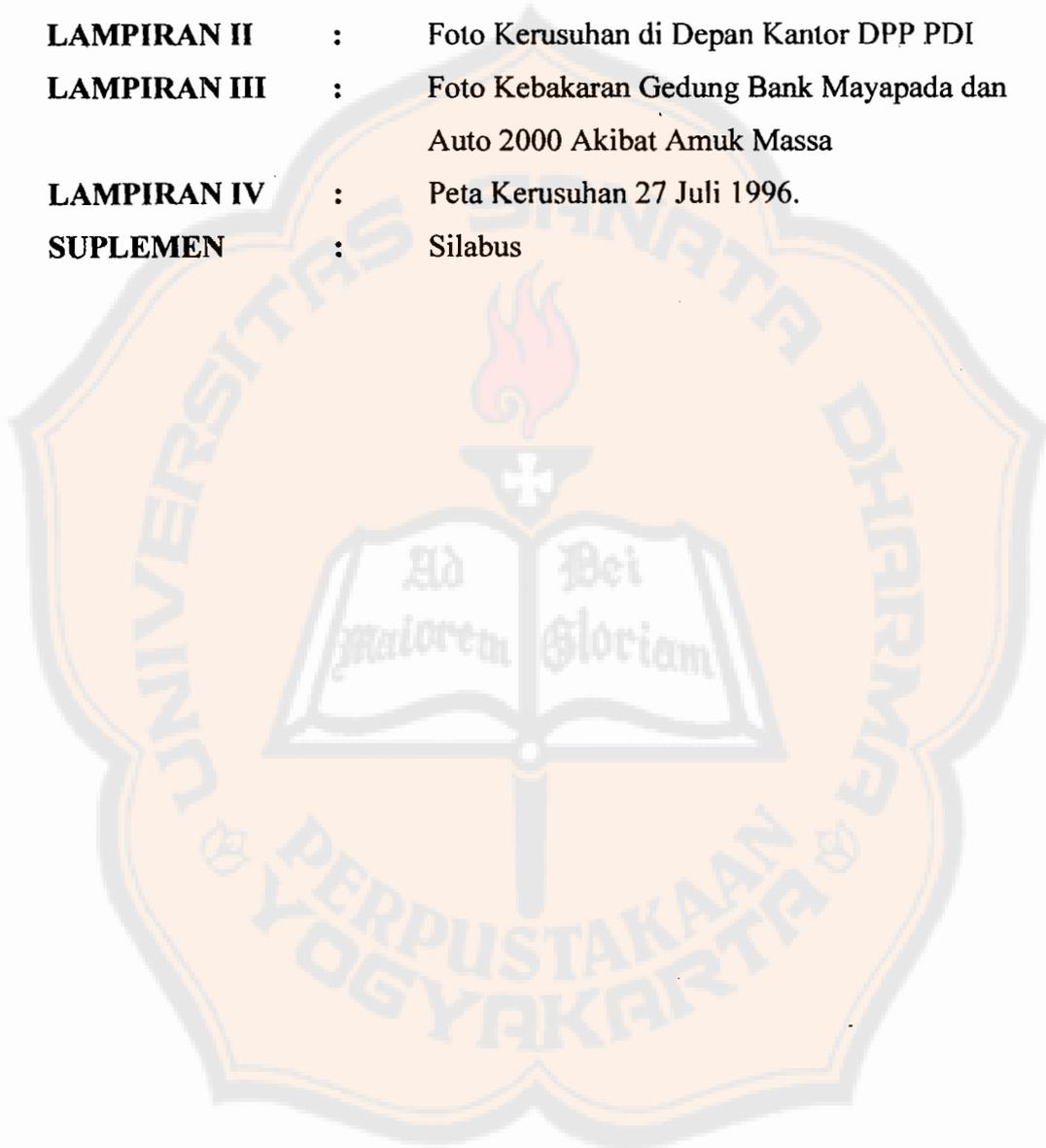
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V. KESIMPULAN 168
DAFTAR PUSTAKA 174
LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Foto Wawancara Megawati Soekarnoputri 9
Agustus 1996
- LAMPIRAN II** : Foto Kerusakan di Depan Kantor DPP PDI
- LAMPIRAN III** : Foto Kebakaran Gedung Bank Mayapada dan
Auto 2000 Akibat Amuk Massa
- LAMPIRAN IV** : Peta Kerusakan 27 Juli 1996.
- SUPLEMEN** : Silabus



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dyah Permata Megawati Setyowati Soekarnoputri merupakan nama lengkap Megawati Soekarnoputri atau yang lebih di kenal dengan nama Mbak Mega. Megawati dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Kelahirannya ditandai oleh suara bedug Maghrib yang bertalu-talu, awan diliputi oleh mendung tebal dan hujan sangat deras mengguyur bumi.¹ Sungguh bukanlah suatu suasana yang menyenangkan pada saat itu, karena sebagai anak presiden RI Mega harus lahir dalam situasi yang memprihatinkan.

Megawati Soekarnoputri merupakan anak kedua Bung Karno dari Ibu Fatmawati (Ibu Fat). Ibu Fatmawati merupakan seorang pejuang yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, sebab beliau adalah yang telah menjahit bendera Sang Saka Merah Putih pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.²

Sejak lahir Megawati Soekarnoputri telah mengalami kehidupan dalam tempat pelarian dan persembunyian. Kelahiran Megawati itu berada dalam situasi revolusioner karena pada saat itu Belanda ingin kembali menguasai

¹ Sumarmo. *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. PT. Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2001. hlm. 1. Baca juga Rusdi Muchtar, dkk. *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*. PT. Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2002. hlm. 2. Oka Kusumayudha. *Megawati Dari Istana Menuju Istana Negara*. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta. 2001. hlm. 1. Andi Setiono, dkk. *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa di Indonesia*. 2000. hlm. 3.

² Rusdi Muchtar, dkk. *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*. PT. Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2002. hlm. 1.

tanah air dan menaklukkan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota perjuangan dan bersejarah.³

Sejak kecil Megawati Soekarnoputri tergolong anak yang cerdas, sederhana dan pendiam. Ia juga sudah dikenalkan pada kerasnya kehidupan dalam dunia politik. Meskipun secara formal Megawati Soekarnoputri tidak pernah menempuh pendidikan politik, sebagaimana para tokoh politik lainnya. Sebagai contohnya yaitu Amien Rais. Namun demikian Megawati telah mendapatkan pendidikan politik dengan baik. Pendidikan politiknya diperoleh dari ayahandanya dan sekaligus merupakan presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno merupakan guru besar utamanya dalam pendidikan politik.⁴ Selain pendidikan politik yang diajarkan oleh ayahnya, Mega juga memahani arti kerasnya kehidupan politik dari berbagai pengalaman hidup yang dialami oleh keluarganya maupun yang dialami oleh dirinya sendiri.

Megawati memang tidak menempuh dan mendapatkan pendidikan politik secara formal di lingkungan sekolah, tetapi hal tersebut bukanlah suatu hambatan bagi Megawati untuk berkarier dalam dunia politik nasional. Sebab dengan pendidikan politik yang diajarkan oleh ayahandanya terbukti bahwa Megawati dapat membuktikan menjadi seorang pemimpin partai politik dan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai golongan terutama dari orang-orang golongan bawah. Dari dukungan merekalah Mega dapat bertahan dan dapat memegang pimpinan Sebagai Ketua Umum dalam PDI.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Sumarmo. *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. PT Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2002. hlm. 7.

Bersama saudara-saudaranya Megawati sering diajak berdiskusi oleh ayahnya tentang berbagai hal yang dapat memperkaya wacana dan wawasan politiknya. Megawati menjadi mengerti dan paham akan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, baik politik yang bertaraf nasional maupun internasional. Dalam memberikan pelajaran politik pada anak-anaknya, Bung Karno selalu menekankan tentang pentingnya peranan wanita untuk berpartisipasi dalam arus perjuangan bangsa termasuk juga dalam dunia politik. Bung Karno juga menegaskan bahwa wanita itu sendiri harus bertindak, berjuang dan harus menjadi roda yang kuat dan hebat dalam revolusi kita ini. Untuk itu wanita harus bersatu aksi dengan laki-laki, dan wanita juga harus bersatu aksi dengan wanita juga.⁵

Pada saat di meja makan pun Megawati mendapatkan pelajaran politik dari ayahnya. Hal tersebut sangat wajar, sebab mengingat kesibukan Bung Karno sebagai kepala negara. Melalui pendidikan yang di berikan oleh Bung Karno, Megawati memperoleh dua jenis pelajaran berharga. Pertama, Bung Karno memberikan kiat-kiat untuk menjadi seorang politikus yang baik. Bung Karno dengan jelas menegaskan sebagai seorang politikus yang baik harus menguasai psikologi massa atau rakyat, memiliki keteguhan dalam memegang asas dan taktik perjuangan organisasi yang dapat berupa negara, partai, tentara dan sebagainya. Pelajaran tersebut mengisyaratkan bahwa sangat penting bagi seorang pemimpin menguasai masalah-masalah domestik saat berhadapan dengan rakyatnya. Pelajaran berharga yang kedua yaitu tentang konsepsi Bung Karno mengenai perjuangan Indonesia dalam Konferensi Non Blok di Beograd (1961). Konferensi Negara-negara Non Blok tersebut dihadiri oleh

⁵ Rusdi Muchtar, dkk. *op. cit.*, hlm. 5-6.

para pakar dan simpatisan yang perjuangan bagi kemerdekaan bagi Indonesia dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme dari berbagai negara. Mereka yang hadir antara lain adalah Nehru, Tito, Nasser, Nkrumah, dan Selaie yang menentukan hitam putihnya konferensi. Pelajaran kedua, Bung Karno lebih menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus bergaya diplomasi di hadapan para pemimpin dan masyarakat internasional sehingga akan mendapat respon yang positif terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkannya. Misalnya gagasannya tentang perjuangan menghadapi neo-kapitalis dan imperialisme. Respon positif dari negara-negara lain tersebut dapat dijadikan sebagai barometer keberadaan Indonesia di Forum Internasional.⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa meski dalam kehidupannya Bung Karno selalu dipenuhi oleh berbagai kesibukan dan tanggung jawab terhadap negara, dan istrinya Ibu Fatmawati juga harus ikut serta mendampingi setiap tugas-tugasnya dalam hal pendidikan bagi anak-anaknya tidak pernah ia lupakan. Dalam setiap kesempatan ia selalu meluangkan waktu untuk mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih sayang.

Sebagai anak seorang presiden tentunya Megawati telah banyak belajar politik baik itu dalam lingkup lokal maupun dalam lingkup profesional. Megawati dapat memahami terjadinya pasang surut badai dan gelombang kehidupan politik yang penuh dengan intrik politik yang dapat menghalalkan segala cara hingga kejatuhan ayahnya sebagai seorang presiden dan dalam tekanan politik kekuasaan Orde Baru.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

Kerasnya kehidupan politik yang dijalani Bung Karno membuat Megawati semakin sadar akan konsekwensinya jika memasuki dunia politik. Dunia yang sarat dengan berbagai konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan. Sebagai anak presiden Megawati melihat dan merasakan pasang surut karier politik ayahnya, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dalam dirinya (Megawati). Pemahaman bahwa dalam dunia politik orang tidak mempunyai kawan dan lawan yang abadi. Orang akan terperosok meski berhati-hati dalam menjalani politik, sebab kepentinganlah yang abadi dalam dunia politik, sehingga orang lebih mementingkan dirinya sendiri maupun golongannya sendiri.⁸

Setelah meninggalnya Soekarno kehidupan yang dihadapi oleh putra-putrinya menjadi sangat berat. Mereka hidup di bawah tekanan dan bayang-bayang politik kekuasaan Orde Baru (Orba). Setiap gerak-gerik dan langkah mereka dibatasi dan diawasi. Pada tahun 1982, keluarga besar Bung Karno membuat konsensus sebagai tanggapan akan sikap pemerintah terhadap keluarga Bung Karno.⁹

Banyaknya tantangan hidup dihadapi oleh Megawati Soekarnoputri, baik itu dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan tekanan-tekanan dari kekuasaan Orde Baru terhadap keluarga besar Bung Karno setelah meninggalnya Bung Karno. Namun meski banyak sekali tekanan dan adanya konsensus yang dibuat oleh keluarga besar Bung Karno bukanlah suatu hambatan bagi Megawati Soekarnoputri untuk menerima tawaran dari

⁸ Sumarmo. *op. cit.*, hlm. 8-9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1

Soerjadi untuk terjun dalam partai politik. Pada waktu itu Soerjadi adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Megawati. Maka pada tahun 1987, Megawati mulai aktif mengikuti kegiatan politik dalam Partai Demokrasi Indonesia.

PDI merupakan hasil fusi lima partai yakni PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik yang di dalamnya banyak sekali campur tangan dari pemerintah Orde Baru. Pada saat itu pemerintah Orde Baru menganggap bahwa apa yang terjadi pada masa Bung Karno merupakan suatu trauma bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh anak-anak Bung Karno selalu diawasi dengan ketat. Pemerintahan Soeharto (rezim Orde Baru) memberikan perintah untuk mengawasi setiap gerak-gerik keluarga Bung Karno karena pemerintah tidak ingin keluarga Bung Karno ada yang terjun dalam dunia politik nasional. Terjunnya anggota keluarga Bung Karno dalam dunia politik merupakan ancaman bagi pemerintahan Orde Baru, karena dianggap akan membangkitkan kembali Soekarnoisme dan ajaran-ajaran politik Bung Karno. Karena itu, pada saat Megawati memutuskan untuk terjun dan berkarier dalam kancah politik nasional atas ajakan Soerjadi menimbulkan ketakutan bagi pemerintahan Soeharto. Namun karena sikap diam Megawati, kemudian pemerintah menganggap sebagai orang yang tidak akan mengancam kelangsungan pemerintahan Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam PDI didominasi oleh PNI yang merupakan pendukung dari Bung Karno.

PDI ini terbentuk sebagai akibat dari sistem penyederhanaan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan rezim

Orde Baru. Kemudian dari penyederhanaan tersebut maka partai yang tadinya berjumlah 28 partai disederhanakan hanya menjadi tiga partai saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (GOLKAR). Ketiga partai itulah yang diakui oleh pemerintahan Orde Baru sejak Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 1997.

Sungguh suatu hal yang menakjubkan sebab setelah bergabungnya Megawati dan beberapa keluarga Bung Karno, PDI mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Nampak bahwa kharisma Bung Karno masih sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat pendukungnya. Semakin besarnya massa yang mendukung PDI, membuat perolehan suara PDI dalam pemilu semakin meningkat terutama pada Pemilu 1987 dan 1992. Meskipun dalam karier politiknya setiap langkahnya Mega selalu mendapat kendala dari pemerintahan Orde Baru

Namun tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Megawati tidak berhenti, bahkan semakin banyak. Sejak awal PDI terbentuk sebagai hasil fusi dari lima partai yang mempunyai perbedaan ideologi membuat PDI sarat dengan konflik intern. Konflik intern tersebut terjadi antara orang-orang intern PDI yang berpengaruh dalam partai, saling memperebutkan kedudukan sebagai Ketua Umum PDI. Pada saat Megawati dicalonkan sebagai Ketua Umum terjadi pertentangan antara kubu pro Soerjadi dengan kubu pro Megawati. Pertentangan antara kubu Soerjadi dan kubu Megawati tersebut menimbulkan perpecahan dalam partai PDI. Kedua kubu tersebut berupaya untuk saling menjatuhkan. Hal ini disebabkan karena adanya keambiguan pemimpin dalam tubuh PDI.

Kepemimpinan Soeharto dalam pemerintahan mulai goyah dengan adanya gerakan reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa yang melakukan demo besar menuntut lengsernya Soeharto. Kepemimpinan Soeharto kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie yang melakukan perubahan sistem politik sehingga memberikan jalan terang bagi kubu Megawati. Presiden Habibie memberikan ijin kepada PDI Soerjadi melaksanakan kongres PDI di Palu dan menghasilkan keputusan Budi Hardjono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum. Ijin penyelenggaraan kongres juga diberikan kepada PDI kubu Megawati. Melalui Kongres V PDI di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998 PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri resmi menjadi partai yang diakui oleh pemerintah dengan nama Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. PDI kemudian secara resmi pecah menjadi dua partai. Pertama, PDI pimpinan Soerjadi yang kepemimpinannya dalam partai tersebut digantikan oleh Budi Hardjono sebagai hasil kongres PDI di Palu. Kedua, PDI-Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umumnya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dalam skripsi yang berjudul “Peranan Megawati Soekarnoputri, Sebagai Politisi PDI-Perjuangan Tahun 1987-1999” ini, penulis hanya membatasi pada beberapa pokok permasalahan saja, yaitu:

1. Apa pengalaman politik Megawati Soekarnoputri dari masa kanak-kanak (1947) sampai tahun 1987 ?

2. Apa saja peranan Megawati Soekarnoputri dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) tahun 1987-1993 ?
3. Mengapa Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan perebutan jabatan Ketua Umum partai PDI tahun 1993-1999 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penulisan dan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat.

I. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengalaman politik Megawati Soekarnoputri dari masa kanak-kanak (1947) sampai tahun 1987.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peranan Megawati Soekarnoputri dalam fraksi PDI tahun 1987-1993.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan perebutan jabatan Ketua Umum PDI tahun 1993-1999.

II. Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa.

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang partai-partai politik di Indonesia pada umumnya dan Partai Demokrasi Indonesia pada khususnya.

- b. Dapat meningkatkan ketrampilan siswa dalam menuliskan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- c. Meningkatkan pemahaman siswa tentang kehidupan politik di Indonesia.
- d. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang peranan Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia.

Bagi Penulis

- a. Untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tentang studi politik.

Bagi Universitas Sanata Dharma

- a. Untuk menambah perbendaharaan dalam perpustakaan tentang sejarah politik.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan sejarah ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari kesaksian para saksi mata atau para pelaku peristiwa itu sendiri. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang bukan saksi mata atau tidak secara langsung menyaksikan peristiwa itu sendiri tetapi merupakan hasil karya dan kesaksian dari orang lain.¹⁰

¹⁰ Louis Gottchalk. *Mengerti Sejarah*. UII Press. Jakarta. 1969. hlm. 30. Lihat juga Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya. Yogyakarta . 1995. hlm. 96.

Penulisan ini lebih pada penulisan studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

Bendera Sudah Saya Kibarkan: Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, karya Megawati Soekarnoputri yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1996. Buku ini berisi pokok-pokok pikiran Megawati Soekarnoputri yang membicarakan tentang kepentingan rakyat banyak dan demokratisasi. Buku ini dikategorikan sebagai sumber primer yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, karena buku tersebut ditulis oleh Megawati Soekarnoputri sendiri.

Sumber Sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, karya Drs. Rusdi Muchtar, dkk yang diterbitkan oleh PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok pada tahun 2002. Buku ini berisi tentang perjalanan Megawati Soekarnoputri dalam karir politik sehingga sampai menjadi presiden Republik Indonesia yang kelima.

Megawati Soekarnoputri Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, karya Sumarmo yang diterbitkan oleh PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok pada tahun 2002. Buku ini berisi tentang perjalanan politik Megawati Soekarnoputri yang pada mulanya hanyalah sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang sepi dari publikasi dan hingar bingar politik, kemudian terjun dalam dunia politik dan mengalami penindasan politik rezim Orde Baru

(ORBA). Atas kemenangannya dalam pemilihan umum (pemilu) 1999 telah mengantarkannya menjadi wakil presiden dan akhirnya menggantikan Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai presiden Republik Indonesia ke-V.

PDI dan prospek pembangunan Politik, karya Adriana Elisabeth Sukanto, yang diterbitkan oleh PT. Grasindo, Jakarta pada tahun 1991. Buku ini berisi tentang perkembangan PDI dan konflik intern yang selalu muncul dalam partai tersebut.

Kontroversi Presiden Wanita, karya Nur Hidayah yang diterbitkan oleh PT. Pabelan Jayakarta, Jakarta Timur tahun 1998. Buku ini berisi tentang berbagai tanggapan pro dan kontra terhadap presiden wanita di Indonesia.

Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa Di Indonesia, karya Andi Setiono, dkk. Diterbitkan oleh Terawang, Yogyakarta tahun 2000. Buku ini berisi tentang fenomena politik Indonesia kontemporer terutama yang berhubungan dengan kasus Megawati Soekarnoputri, PDI-Perjuangan dan Politik Massa.

PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia. Karya Arif Zulkifli, diterbitkan oleh PT. Grafiti, Jakarta tahun 1996. Buku ini berisi tentang korelasi antara golongan menengah dan demokratisasi di tubuh Partai demokrasi Indonesia (PDI), dan membahas perkembangan PDI yang diwarnai dengan konflik intern sampai pada tergusurnya Soerjadi dan munculnya nama Megawati Soekarnoputri yang terpilih menjadi Ketua Umum PDI-P.

Megawati Dari Istana Menuju Istana Negara, karya Oka Kusumayudha dan Tim. Diterbitkan oleh PT. BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta tahun 2001. Buku ini berisi tentang berbagai peristiwa yang

menyangkut diri Megawati Soekarnoputri yang dimulai dari masa kecil yang lahir di Yogyakarta-keputusannya terjun dalam dunia politik-pahit getirnya perjalanan politiknya hingga terpilihnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada Sidang Istimewa MPR 2001.

E. Landasan Teori

1. Pengertian Politik.

Secara umum politik (*politics*) yaitu kegiatan yang berada dalam suatu sistem politik. Kegiatan-kegiatan tersebut menyangkut tentang proses dalam menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai.¹¹

Politik adalah segala urusan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.¹² Politik juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita yang sudah ditentukan.¹³

Dalam kehidupan masyarakat terdapat dua arti politik. Pertama, politik merupakan suatu cara untuk menunjukkan tentang satu segi kehidupan manusia dalam masyarakat yaitu segi kehidupan politik manusia dan segi kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hubungan kekuasaan. Dalam pemahaman ini terkandung isi bahwa politik merupakan usaha untuk mencari dan memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan tersebut. Kedua, politik

¹¹Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1983. hlm. 8.

¹²Sri Sukesi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*, Balai Pustaka. Jakarta. 1993. hlm. 694.

¹³Soelistyowati Gani Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987. hlm. 12.

dipergunakan sebagai alat untuk menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang ingin dicapai atau cara-cara kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan atau lebih singkatnya kebijaksanaan¹⁴

Politik dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk pada satu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan masyarakat menyangkut hubungan kekuasaan, merupakan syarat untuk dapat merealisasikan suatu tujuan yang hendak dicapai. Sebelum tujuan dapat dicapai, maka harus dilakukan pengambilan keputusan yaitu membuat pilihan diantara beberapa alternatif tujuan. Pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Keputusan-keputusan tersebut menyangkut pada tujuan-tujuan dalam masyarakat.¹⁵ Tujuan tersebut dapat dicapai jika ditentukan berbagai kebijaksanaan umum menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari berbagai sumber yang ada. Kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan jika suatu organisasi atau seseorang memiliki kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan kewenangan diperlukan dalam melaksanakan kebijaksanaan karena untuk menjalin kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kemungkinan muncul dalam proses ini.¹⁶

Politik juga dapat diartikan dalam beberapa konsep. Pertama, Politik adalah segala usaha yang ditempuh warga negara untuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁶ Miriam Budiardjo. *op. cit.*, hlm. 8.

membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ketiga, Politik merupakan segala perubahan yang ditujukan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, Politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Kelima, Politik sebagai konflik untuk mencari dan mempertahankan segala sumber yang dianggap penting.¹⁷ Secara komprehensif politik diartikan sebagai hubungan atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁸

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam dunia politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara. Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan umum (*publik policy*). Di negara-negara demokratis, partisipasi rakyat dalam kegiatan politik adalah rakyat berhak turut menentukan siapa yang layak dan akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan partisipasi politik ini dapat berupa memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu), menghadiri rapat

¹⁷ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1992. hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan para pejabat pemerintah maupun anggota parlemen.¹⁹

Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sementara itu P. Huntington dan Joan M. Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, afektif atau tidak efektif.²⁰

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.²¹

Pendapat lain mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.²²

¹⁹ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia. Jakarta. 1981. hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ *Ibid.* Baca juga Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 184.

²² Ramlan Surbakti. *op. cit.*, hlm. 140

Di negara-negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan pada periode selanjutnya.²³

3. Partai Politik

Partai berasal dari bahasa Latin *part* atau *partis* yaitu suatu bagian. Secara umum partai diartikan sebagai suatu bagian para warga negara yang memperjuangkan kepentingan politik tertentu yaitu gejala dan unsur percaturan politik manapun. Partai politik adalah suatu organisasi perjuangan politis yang berusaha supaya kemauan politiknya dilaksanakan. Tujuan tersebut hanya mungkin dilaksanakan dengan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama menurut pandangan partai tersebut dalam konstitusi. Untuk itu suatu kelompok hanya merupakan partai politik yaitu bagian yang memperjuangkan nasib negara. Jika dilihat dari tugasnya bukan perjuangan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk mengembangkan pandangan yang menyeluruh secara jujur dan dianggap paling menguntungkan seluruh bangsa dan sebagai partai yang demokratis selalu mengakui hak-hak partai-partai lain.²⁴

Partai adalah perkumpulan akan segolongan orang yang seases dan mempunyai tujuan yang sama terutama dalam bidang politik. Maka partai

²³ Miriam Budiardjo. *op. cit.*, hlm. 2

²⁴ A. Heuken SJ. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila. Jilid IV: Par-Z*, Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta. hlm 18-19.

politik adalah perkumpulan yang didirikan oleh segolongan orang untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.²⁵

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir beranggotakan orang-orang yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁶

Sedangkan menurut pendapat Stigmund Neumann partai politik adalah suatu organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.²⁷

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi

²⁵ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 712.

²⁶ Miriam Budiardjo. *op.cit.* hlm. 161.

²⁷ Miriam Budiardjo. *op. cit.*, hlm. 14.

pemimpin partai dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat materiil dan idiil.²⁸

RH. Soltau mengungkapkan partisipasi politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan menurut mereka.²⁹

4. Fungsi Partai Politik

Partai politik yang dibentuk harus mempunyai fungsi yang baik bagi masyarakat yang bernaung dibawah partai tersebut. Partai politik secara umum menjalankan delapan fungsi, yaitu:

- a. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah untuk berpartisipasi politik.
- b. Partai politik berperan dalam proses merumuskan sejumlah kepentingan.
- c. Partai politik berfungsi dalam penggabungan atau agregasi kepentingan atas sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang adakalanya menyangkut kepentingan yang sama.

²⁸ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 161. Lihat juga Umaruddin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. LkiS. Yogyakarta. 1999. hlm. 107, dan Soelistyowati Gani Ismail, *op. cit.*, hlm. 112.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Ibid.*

- d. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Dalam hal ini seringkali partai politik disebut sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat.
- e. Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam fungsi ini di negara-negara yang sedang berkembang partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.
- f. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam hal ini partai politik berfungsi untuk mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- g. Partai politik dapat memainkan peranan sebagai sarana pengatur konflik. Bahwa partai politik berfungsi untuk mengeliminir konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Baik konflik yang disebabkan oleh faktor-faktor primordialisme maupun karena adanya kesenjangan sosial.
- h. Partai politik berfungsi sebagai pembuat kebijaksanaan (*decision maker*).³⁰

5. Demokrasi

Demokratis berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Secara umum demokrasi

³⁰ Adriana Elisabeth Sukamto. Dkk, *PDI dan Prospek Pembangunan politik*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 74-75. Baca juga Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, op. cit., hlm. 15-20.

dirumuskan sebagai suatu keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas.³¹

Demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang sudah teruji dan diakui sebagai hal yang realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil, egaliter dan manusiawi. Oleh karena itu banyak penguasa-penguasa yang otoriter dan totaliter menyebut kekuasaan atau sistem yang dibangunnya sebagai kekuasaan dan sistem yang demokratis. Secara sederhana Joseph Schumpeter mengartikan demokrasi, merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk mencapai suatu keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.³²

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang mereka pilih di bawah pemilihan bebas. J. J. Rousseau berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.³³

Larry Diamond, Juan J Linz, dan Seymour Martin Lipset mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang

³¹ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 69.

³² Georg Surenzen. *Demokrasi dan Demokratisasi (terjemahan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003. hlm. 14.

³³ Diane Ravitch. *Apakah Demokrasi Itu ? (Terjemahan)*. USIA. hlm. 4.

memenuhi tiga syarat pokok. Pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi terutama partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintah yang memiliki kekuasaan efektif, pada waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. Kedua, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil sehingga tidak satupun kelompok sosial atau warga negara dewasa dikecualikan. Ketiga, kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.³⁴

Makna lain dari demokrasi yaitu bahwa demokrasi sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan dan mendukung toleransi khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas. Dalam demokrasi terdapat dua model demokrasi yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat suatu keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung

³⁴ Umaruddin Mas
dar. *op. cit.*, hlm. 82.

(*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).³⁵

6. Peranan

Peranan adalah fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan, faktor manusia memegang peranan atau jabatan penting dalam pembangunan.³⁶ Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.³⁷ Maka yang dimaksud dengan peranan dalam penulisan ini mengacu pada peranan atau tugas yang harus dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dalam kedudukannya sebagai seorang politisi dan sebagai pemimpin dalam partai politik PDI-Perjuangan.

7. Pemimpin-Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk menjadi pemimpin dalam suatu organisasi.³⁸

Kepemimpinan (*Leadership*) merupakan salah satu gejala dasar kehidupan sosial yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok atau oleh seseorang. Dalam hal ini pemimpin berfungsi untuk menyatukan masyarakat dan membelanya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Sedangkan bagi orang-orang yang dipimpin dapat memandang pemimpin atau pimpinan dengan sikap yang kontradiktif, yaitu dengan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

³⁶ Sri Sukesi Adi Wimarta, *Kamus Besar Indonesia. Jilid II*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 1983. hlm. 1579.

³⁷ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*. Modern English Press. Jakarta. 1991. hlm. 1133.

³⁸ W. J. S Poerwodarminta, *op. cit.*, hlm. 735.

rasa kagum, setia, dan bersedia berkorban, tetapi juga dengan rasa curiga, menolak, asing atau dengan rasa campuran. Oleh sebab itu, pengalaman sejarah sangatlah penting dalam membentuk sikap rakyat terhadap pimpinan, termasuk juga terhadap pimpinan politis.³⁹ Untuk itu sebagai seorang pemimpin harus mempunyai kharisma, keahlian, atau kejujuran serta ketulusan hati yang dapat memikat hati orang banyak.

Kepemimpinan adalah hubungan membimbing antara seorang yang menonjol (pemimpin) atau suatu kelompok atau masyarakat politis, ekonomis, kebudayaan. Kepemimpinan berdasarkan pada peraturan kelembagaan atau kharisma. Dalam setiap masyarakat kepemimpinan sangat mutlak diperlukan, sebab tanpa ada yang mengatur dan tanpa ada anggota-anggota yang tunduk, suatu kesatuan tidak dapat dibina untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.⁴⁰

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia kepemimpinan ada dua jenis, yaitu kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan kharismatis. Kepemimpinan tradisional adalah jenis kepemimpinan yang terbentuk karena berdasarkan atau berakar dari faktor kelahiran, kekayaan dan status yang diwarisi dari pemimpin sebelumnya yang menentukan tempat dalam struktur sosial.⁴¹ Jadi kepemimpinan tradisional terpilih karena faktor keturunan, yakni jika ayahnya adalah pemimpin/kepala suku maka

³⁹ A. Heuken SJ. *op. cit.*, Par-Z. Hlm. 80-81.

⁴⁰ *Ibid.*, F-Ker. hlm. 289.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 290.



anaknyanya akan menggantikannya sebagai pemimpin/kepala suku setelah ayahnya atau pemimpin sebelumnya meninggal.

Sedangkan kepemimpinan kharismatis adalah jenis kepemimpinan yang terbentuk atau dipilih secara langsung maupun tidak langsung karena kemampuannya dan karena kepribadiannya yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan kharismatis ini bersifat terbatas karena tujuan dan undang-undang maupun karena bersifat temporer atau sementara.⁴² Contoh: Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI karena ia dapat membuktikan keberhasilannya sebagai vote getter dan karena kepribadiannya yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dirinya, selain itu karena adanya faktor dalam diri Megawati yang menggambarkan kharismanya sebagai anak dari Bung Karno.

8. Kongres

Pada umumnya kongres diartikan sebagai rapat besar. Kongres adalah pertemuan para wakil organisasi politik (sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah.⁴³

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan dianggap benar dan kebenarannya dibuktikan dengan melakukan penelitian. Dalam suatu penelitian hipotesis merupakan pedoman

⁴² *Ibid.*

⁴³ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jilid II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 455.

untuk melakukan penelitian. Hal itu berarti sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus sudah merumuskan hipotesis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis itulah yang nantinya akan dibuktikan dengan melakukan penelitian. Dengan adanya hipotesis maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Berdasarkan pada kajian pustaka dan landasan teori di atas, maka dari beberapa rumusan permasalahan tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Kalau dalam keluarganya Megawati berhasil memperoleh pendidikan politik, maka ia tidak akan canggung lagi dalam berkarier dan memimpin partai politik. Sejak masa kanak-kanak Megawati Soekarnoputri sudah diperkenalkan dengan kehidupan politik dan secara langsung mendapatkan pendidikan politik dari ayahandanya yang merupakan tokoh politik. Selain itu juga merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Maka Megawati tidak canggung lagi tergabung dan memimpin partai tersebut.
2. Kalau Megawati banyak jasanya terhadap PDI maka dia akan dipilih menjadi Ketua Umum dewan pimpinan PDI. Setelah bergabungnya Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Banyak sekali jasa yang diberikan Megawati terhadap partai tersebut, sehingga partai tersebut mengalami peningkatan dalam perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 1982. Maka karir politik Megawati Soekarnoputri semakin meningkat dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam partai tersebut. Tahun 1987 ia dicalonkan sebagai ketua dan menjabat sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 1993 Megawati terpilih sebagai Ketua Umum

DPP PDI hasil Munas. Secara *de facto* Mega terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan PDI melalui Konferensi Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Surabaya.

3. Kalau Megawati sabar dan rendah hati atau tidak melakukan balas dendam dalam menghadapi berbagai tekanan dan dapat memahami masalah-masalah yang muncul dalam PDI maka dia akan mendapat banyak pendukung untuk memenangkan perebutan jabatan Ketua Umum DPP PDI. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Megawati merupakan seorang yang sabar dan pengertian. Sehingga saat tergabung dalam dunia politik sebagai orang yang juga memegang peranan penting dalam partai tersebut, Megawati tetap sabar dan rendah hati di dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan baik dari dalam maupun tekanan dari luar partai tersebut dengan tidak melakukan penyerangan balik terhadap kelompok yang menyerangnya. Megawati juga dapat mengerti dan memahami masalah-masalah yang muncul di dalam partai PDI, maka tidak mengejutkan jika Megawati mendapatkan banyak pendukung dari berbagai golongan terutama dari golongan menengah dan bawah. Pada saat terjadi perebutan jabatan Ketua Umum DPP PDI, Megawati mampu dan berhasil memenangkan perebutan jabatan Ketua Umum tersebut.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Dalam skripsi berjudul “ Peranan Megawati Soekarnoputri Sebagai politisi Tahun 1987-1999” ini menggunakan metode penelitian sejarah.

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodes* yang artinya jalan ke sesuatu. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan dan cara-cara untuk memberitahukan pengetahuan.⁴⁴

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah ini digunakan sebagai cara kerja untuk menganalisis dan mensintesa bahan yang akan dikaji agar dapat diperoleh suatu kebenaran yang hakiki.⁴⁵ Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang diperoleh melalui suatu proses tersebut disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia.⁴⁶ Hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi kembali masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui proses historiografi.

Metode sejarah ini mencakup empat hal yakni:

1. Pemilihan subjek untuk diselidiki.
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut,
3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui asli tidaknya suatu sumber.

⁴⁴...*Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya. Jilid I.* Depdikbud. Jakarta. 1983. hlm. 115.

⁴⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

⁴⁶ *Ibid.*

4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber yang terbukti sejati/benar.⁴⁷

Menurut Louis Gottschalk ada empat tahap yang harus dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber (*verifikasi*), interpretasi, dan historiografi.⁴⁸

a. Pemilihan Topik.

Sebelum melakukan penelitian berdasarkan keempat tahap penulisan, pada umumnya penulis atau peneliti telah melakukan pemilihan topik.

b. Pengumpulan sumber (*Heuristik*)

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subjek yang harus diteliti. Sumber sejarah adalah jejak-jejak masa lampau yang mencakup segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masa lampau. Dalam mengadakan penelitian sejarah banyak sekali sumber yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian tersebut. Untuk itu perlu mengumpulkan sumber yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis, sehingga dapat membantu kelancaran dalam melakukan penelitian. Untuk memilih suatu subjek dan mengumpulkan data mengenai subjek tersebut maka sumber-sumber tulisan dan lisan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 32-34.

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian para saksi mata atau pelaku peristiwa itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi.⁴⁹ Sedangkan sumber sekunder adalah merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi mata yang secara langsung tidak melihat peristiwa tersebut atau merupakan hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.⁵⁰ Untuk sumber penelitian ini maka dilakukan pengumpulan sumber atau data. Data-data tersebut dapat berupa buku, majalah, surat kabar dan berbagai dokumen lainnya yang dapat menunjang penulisan sejarah ini. Dalam penulisan ini penulis tidak menggunakan sumber lisan mengingat situasi yang tidak terjangkau oleh penulis untuk itu penulis lebih banyak menggunakan sumber sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Sanata Dharma, perpustakaan daerah Yogyakarta dan perpustakaan lainnya yang ada di Yogyakarta.

Sebagai contoh sumber primer adalah *Bendera Telah Saya Kibarkan: Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri* karya Megawati Soekarnoputri. Sedangkan contoh sumber sekunder yang digunakan adalah: *Megawati Soekarnoputri Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara* karya Sumarno, *Tragedi Megawati: Revisi*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁰ *Ibid.*

Politik Massa di Indonesia karya Andi Setiono, dan *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia* karya Arif Zulkifli.

c. Kritik Sumber atau Verifikasi.

Kritik sumber atau verifikasi ini merupakan tahap penelitian sejarah yang dilakukan setelah penulis melakukan pengumpulan sumber. Kritik sumber ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *kredibilitas* (dapat tidaknya sumber tersebut dipercaya) dan *otentisitas* (keaslian sumber) suatu sumber.⁵¹

Kritik sumber pada penelitian sejarah terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Cara yang dilakukan untuk melakukan kritik intern yaitu dengan membandingkan sumber-sumber yang ada agar dapat diketahui kebenarannya. Apabila banyak informasi yang sama berarti sumber tersebutlah yang terbukti kebenarannya. Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, seperti sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, dan jenis huruf yang digunakan. Maka dapat dikatakan bahwa kritik sumber adalah menguji kebenaran dan keaslian sumber-sumber penelitian. Kritik sumber dalam penelitian sejarah ini merupakan tahap penelitian sejarah yang harus dilakukan oleh penulis untuk menghindari adanya kepalsuan atau ketidakaslian suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat

⁵¹ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995, hlm. 99-100.

dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak. Kritik sumber juga dilakukan untuk mengetahui apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Dalam penelitian ini kritik sumber yang digunakan oleh penulis adalah kritik intern, di mana penulis melakukan perbandingan sumber-sumber yang ada dari berbagai buku. Contohnya adalah dalam buku karya Rusdi Muchtar yang berjudul *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia* menyebutkan bahwa Megawati lahir pada tanggal 23 Januari 1946, sedangkan dalam buku *Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara* karya Suniarno menyebutkan Megawati Soekarnoputri lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Setelah dilakukan perbandingan dengan sumber buku-buku yang lain ternyata menyebutkan bahwa Megawati lahir pada 23 Januari 1947. Berdasarkan kritik sumber tersebut maka sumber yang benar dari buku karya Sumarno.

d. Interpretasi

Interpretasi dilakukan setelah penulis melakukan kritik sumber atau verifikasi. Tahap interpretasi ini melingkupi eksplanasi sintesis dan analisis dengan tujuan untuk menangkap apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Analisis sumber atau interpretasi ini bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam penulisan suatu sejarah di mana selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa jaman, kebudayaan, pendidikan,

lingkungan sosial dan yang melingkupi penulisnya.⁵² Untuk analisis sumber ini dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya satu dengan yang lainnya. Setelah analisis sumber dilakukan maka untuk selanjutnya dilakukan sintesis sumber dengan membandingkan dan memadukan data-data yang ada.

e. Penulisan Sejarah atau Historiografi.

Dalam penulisan sejarah harus memperhatikan kronologisnya. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa-peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas yang utuh.⁵³ Penulisan sejarah mempunyai tiga bagian yaitu pengantar atau pendahuluan, hasil penelitian, dan kesimpulan atau penutup.

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Dalam penulisannya dimulai dengan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan pendekatan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua yaitu hasil penelitian. Pada bagian ini penulis menyajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan sumber dan data-data yang mendukung. Setelah menyajikan hasil penelitian penulis melakukan penyimpulan. Di mana dalam penyimpulan ini penulis

⁵² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 72.

⁵³ *Ibid*, hlm. 62.

harus menyimpulkan isi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan.⁵⁴

2. Pendekatan

Pendekatan yaitu suatu cara pandang atau pola pikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam penelitian. Pendekatan ada dua yaitu pendekatan unidimensional dan pendekatan multidimensional. Pendekatan unidimensional merupakan pendekatan yang hanya menggunakan satu pendekatan saja. Sedangkan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu yang diambil dari ilmu-ilmu sosial.

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan psikologis, sosiologis, dan politik.

Pendekatan psikologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kehidupan dan tingkah laku manusia. Jadi pendekatan psikologis ini digunakan untuk melihat latar belakang kehidupan dan tingkah laku Megawati Soekarnoputri.

Contoh: Megawati Soekarnoputri adalah anak kedua dari Ir. Soekarno dengan istrinya Fatmawati. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947 ketika Indonesia sedang mengalami masa-masa revolusioner, karena pada saat itu Indonesia sedang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pribadi Megawati merupakan

⁵⁴ Koentowijoyo, *op. cit.*, hlm. 103.

sosok yang pendiam, lemah lembut dan selalu menghadapi permasalahan dengan tenang.

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gejala-gejala dari aspek sosial, yaitu kehidupan sosial Megawati Soekarnoputri dalam kehidupan politik.

Contoh: Sebagai orang baru dalam dunia politik nasional, Megawati termasuk orang yang mampu menjalin hubungan baik dengan para pendukungnya. Hal ini tampak pada banyaknya pendukung dari arus bawah yang memberikan dukungan dan simpatik terhadap Megawati Soekarnoputri.

Pendekatan politik ini digunakan untuk melihat dan memahami beberapa konsep yang ada dalam penelitian ini, yaitu latar belakang Megawati Soekarnoputri terjun dalam dunia politik dan berbagai konflik yang dihadapi oleh Megawati dalam partai PDI.

Contoh: Megawati mengawali kariernya dalam dunia politik nasional pada tahun 1987. Ia bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia atas ajakan dari Soerjadi yang saat itu merupakan Ketua Umum PDI 1987-1993. Bergabungnya Megawati dalam PDI ini sebenarnya merupakan strategi yang dilakukan oleh duet antara Soerjadi dan Nico Daryanto dalam upaya meningkatkan perolehan suara PDI dalam pemilu dan kursi parlemen. Soerjadi kemudian merekrut putra-putri Bung Karno untuk bergabung dalam PDI. Pada waktu itu Megawatilah yang menerima tawaran Soerjadi untuk terjun dalam dunia politik nasional dan bergabung dengan PDI.

Dalam penulisan sejarah terdapat dua metode yaitu metode penulisan deskriptif naratif dan deskriptif analitis. Metode penulisan deskriptif naratif yaitu penulisan yang berbentuk cerita berdasarkan pada kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa menambahkan ide-ide pemikirannya didalam penulisannya. Penulisan deskriptif analitis adalah penulisan sejarah yang bersifat analisis, dimana penulis mengupas suatu masalah atau peristiwa dari sumber-sumber yang diperoleh berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual dengan meminjam teori-teori dari disiplin ilmu-ilmu sosial . Untuk melakukan penulisan deskriptif analitis, penulis memerlukan bantuan dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Seperti ilmu politik, ilmu sosiologi dan sebagainya.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi penulisan deskriptif analitis dan pendekatan multidimensional. Penulisannya berdasarkan pada sumber-sumber yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan bantuan dari berbagai disiplin ilmu.

J. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih sistematis maka dilakukan pengurutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,

landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan pendekatan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGALAMAN POLITIK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DARI MASA KANAK-KANAK TAHUN 1947 SAMPAI TAHUN 1987.

Bab ini berisi tentang masa kecil Megawati Soekarnoputri, Pendidikan Megawati Soekarnoputri, pendidikan politik Megawati Soekarnoputri, kehidupan keluarga Megawati, Megawati dalam pergaulan politik, dan alasan Megawati terjun dalam dunia politik.

BAB III : PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM FRAKSI PDI TAHUN 1987-1993.

Bab ini berisi tentang Partai Demokrasi Indonesia : sejarah singkat berdirinya PDI, konflik intern dan masalah-masalah lain dalam PDI, Peranan Megawati Soekarnoputri dalam PDI tahun 1987-1993, Megawati Soekarnoputri dalam KLB PDI di Surabaya tahun 1993.

BAB IV : MEGAWATI MAMPU MEMENANGKAN PEREBUTAN JABATAN KETUA UMUM F-PDI TAHUN 1993-1999.

Dalam bab ini berisi tentang kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam tubuh PDI dihantam badai politik, hikmah dari "insiden sabtu kelabu" tragedi 27 Juli 1996 bagi karier politik Megawati, Pemilu 1997: Megawati menentukan sikap Golput, pengakuan pemerintah

terhadap PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, Megawati Soekarnoputri: kemenangan mayoritas PDI-Perjuangan dalam Pemilu 1999.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan setiap permasalahan.



BAB II

PENGALAMAN POLITIK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DARI MASA KANAK-KANAK TAHUN 1947-1987

A. Masa Kecil Megawati Soekarnoputri

Pada malam itu, tepatnya hari Kamis tanggal 23 Januari 1947, Presiden Soekarno (Bung Karno) dengan harap-harap cemas menantikan kelahiran anak keduanya dari pernikahannya dengan Fatmawati (Ibu Fat). Suasana saat itu sangatlah buruk, hujan turun sangat deras disertai dengan guntur yang menggelegar dan awan hitam menyelimuti langit sore itu. Fatmawati yang sedang hamil tua terbaring dengan lemah di dalam kamar.

“Aku takkan melupakan peristiwa di malam tanggal 23 Januari itu. Pada malam itu guntur seperti hendak membelah angkasa. Istriku terbaring di kamar yang telah disediakan sebagai rumah sakit. Tiba-tiba lampu padam, atap di atas kamar itu runtuh, mega yang gelap dan berat melepaskan bebannya, dan air hujan yang mengalir dalam kamar seperti sungai. Dokter dan juru rawat-juru rawat mengangkat Fatmawati ke kamar tidurnya sendiri. Dia basah kuyup seperti juga perkakas dokter, kain sprei, pendeknya semua. Di dalam kegelapan dengan cahaya pelita lahirlah puteri kami. Kami menamakannya Megawati....”¹

Itulah sepenggal kisah Bung Karno tentang kelahiran puteri pertamanya Megawati Soekarnoputri. Namun tidak ada yang tahu apa yang menjadi alasan Bung Karno menulis tentang kelahiran anak perempuannya tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, untuk kelahiran anaknya yang lain tidak ada satupun yang kisahnya dituangkan dalam tulisan. Bung Karno mempunyai sembilan orang anak dalam perkawinannya termasuk anak dari istri selain Fatmawati. Kelahiran

¹ Cindy Adam, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (terj.)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1966, hlm 369.

Guntur Soekarnoputra, putra pertamanya juga tidak dikisahkan dalam bentuk tulisan. Pada saat itu Guntur lahir ditengah-tengah suasana heroisme perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.²

Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Ia mempunyai nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyowati Soekarnoputri. Ia lahir saat suara Bedug Maghrib terdengar bertalu-talu, hujan turun dengan derasnya mengguyur bumi, serta guntur menyambar-nyambar dan mega mendung menyelimuti awan. Mega tidak hanya lahir dalam kondisi cuaca yang buruk tetapi juga dalam masa revolusioner di Indonesia. Pada saat itu ayahandanya yang juga Presiden Republik Indonesia Bung Karno sedang mengungsikan Ibukota negara dari Batavia (Jakarta) ke Yogyakarta. Pengungsian Ibukota tersebut sebagai akibat terjadinya kembali Agresi Militer Belanda. Pada saat itu Belanda ingin kembali menduduki Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945.³

Kelahiran Megawati di tengah-tengah keluarga Bung Karno bagaikan pelita yang menjadi cahaya kegelapan. Sebab pada saat itu Bung Karno dan keluarganya sedang dalam pengungsian di Yogyakarta. Situasi kelahiran Megawati dalam suasana revolusioner, pengungsian dan cuaca alam yang buruk seolah-olah hendak memberikan isyarat secara tersendiri bagi Megawati dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan. Cobaan itu hadir dalam

² Oka Kusumayudha, *Megawati dari Istana Menuju Istana Negara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2001, hlm. 2

³ Sumarno, *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok, 2002, hlm. 1-2. Baca juga Rusdi Muchtar, *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok, 2002, hlm. 2.

kehidupan keluarga, pendidikan, dan bahkan perjalanan kariernya sebagai politisi. Selama menjalani kariernya dalam kancah kehidupan politik pada umumnya dan dalam partai yakni PDI khususnya, Megawati selalu dihadapkan oleh berbagai cobaan yang selalu menghalangi langkahnya untuk berkarier dalam dunia politik.

Pada bulan Desember 1949, setelah situasi politik dan keamanan semakin membaik Bung Karno memboyong seluruh keluarganya kembali ke istana merdeka, Jakarta. Saat itu Mega telah berusia 2 tahun dan telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cerdas, sedikit bicara dan pendiam. "Gadis" demikian panggilan kesayangan Bung Karno buat Mega.⁴ Sebagai puteri seorang Presiden Republik Indonesia, tidak heran jika Mega dan saudara-saudaranya diperlakukan dengan manja dan istimewa oleh para pengasuhnya di istana merdeka. Namun meski diperlakukan secara istimewa tidak membuat Megawati tumbuh menjadi anak yang manja. Ia melalui masa kanak-kanaknya hingga menjadi gadis remaja di Istana Negara. Hari-harinya diisi dengan banyak membaca dan belajar menari.⁵

Kesehariannya kehidupan Megawati dikelilingi oleh gejolak masa revolusi, namun dibalik itu semua Mega mempunyai sikap yang pendiam, kalem, lemah lembut, dan feminim. Dengan kepribadiannya yang seperti itu, tidak heran kalau Mega juga senang menari tarian-tarian tradisional. Selain itu Mega juga adalah gadis cilik yang pemberani dan pantang menyerah dalam menghadapi segala hal kesulitan. Ia selalu berusaha memecahkan sendiri setiap masalah yang ia hadapi. Salah satu hal yang menarik yakni ketika Mega terpilih menjadi

⁴ Sumarno, *op. cit.*, hal. 2.

⁵ *Ibid.*

pasukan Paskibraka.⁶ Semua orang tahu bahwa untuk menjadi pasukan Paskibraka diperlukan keberanian dan kemampuan intelektual yang baik. Keberanian Mega dalam menjadi pasukan Paskibraka kemudian ia tunjukkan dengan menjalankan tugasnya dengan baik.

Megawati yang senang menari terutama tarian tradisional kerap kali digunakan oleh Bung Karno untuk melatih keberanian Mega tampil dimuka umum. Setiap kali tamu-tamu negara hadir ke istana negara, Bung Karno sering kali meminta Megawati untuk menari di depan tamu-tamu negaranya tersebut. Dengan penuh keberanian dan keluwesan ia pun menari di depan para tamu negara dan setiap diminta menari oleh Bung Karno, Mega selalu menunjukkan kepandaiannya dalam menari lenso. Pada saat Megawati sedang menari, ayahnya sering berkata di depan para tamu negaranya: "Tariannya menggairahkan", demikian kata Bung Karno setelah Mega selesai menari Lenso.⁷

Selain mengisi hari-harinya dengan berlatih menari, "Ega" demikian ia sering menyebut dirinya, juga gemar sekali membaca. Mega yang selalu hidup dalam lingkungan yang gemar membaca, membuatnya sangat senang membaca tentang banyak hal. Mega sering kali melontarkan pertanyaan kepada ayahnya jika ia sesekali menemukan makna yang tidak ia mengerti dalam buku-buku yang sedang maupun sudah ia baca. Sering kali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Mega kepada ayahnya membuat Bung Karno sedikit terkejut mendengar pertanyaannya. Misalnya, pada saat Mega berusia 11 tahun, tiba-tiba saja Mega menyela dengan sebuah pertanyaan. "Pak kalau artinya *dharma eve*

⁶ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hal. 4.

⁷ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 3.

hato hanti itu apa?”. Mendengar pertanyaan putrinya, dengan spontan Bung Karno langsung memuji kecerdasan dari anak kesayangannya itu. Bung Karno pun menjawab: “artinya bersatu karena kita kuat. Kita kuat karena bersatu.”⁸

Mega sejak kecil memang berbeda dari anak-anak Bung Karno yang lain. Selain pembawaannya yang pendiam, dalam menghadapi segala persoalan Mega selalu bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kepribadiannya juga kalem, tenang, dan juga selalu mengungkapkan perasaan dengan tidak sentimentil membuat keluarga, saudara, dan teman-temannya merasa nyaman jika berada di dekatnya.⁹ Oleh karena itu, ketika Megawati memutuskan untuk terjun dalam dunia politik, tidak mengejutkan kalau Megawati mendapatkan simpati dari para pendukungnya. Kepribadian seperti itulah yang dapat dikatakan stabil untuk menghadapi hiruk pikuknya situasi dan kondisi kancah politik nasional yang masih kacau.

B. Pendidikan Megawati Soekarnoputri

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Baik itu pendidikan formal, informal, maupun non formal. Sebelum menjalani pendidikan di sekolah atau pendidikan formal, setiap orang telah mendapatkan pendidikan keluarga atau pendidikan informal, dimana peran orang tua disini adalah sebagai pendidik kodrati. Pendidikan di lingkungan keluarga yang diajarkan lebih pada pendidikan yang bersifat afektif, sehingga tetap diperlukan pendidikan sekolah. Dengan bersekolah setiap individu akan memperoleh sosialisasi nilai-nilai budi

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 4.

pekerti, pelajaran dan pengajaran yang dapat mengasah pikiran atau kemampuan kognitif individu. Oleh sebab itu dengan sekolah orang menjadi pintar dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah.

Setiap pendidikan yang diperoleh oleh setiap individu baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Tidak hanya sikap dan perilaku dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat saja, tetapi juga dalam kehidupan politik jika individu atau orang tersebut terjun dan aktif dalam dunia politik. Meskipun demikian, sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara terstruktur lebih banyak membentuk pribadi, sikap, dan perilaku setiap individu.

Demikian halnya dengan Megawati, selain ia mendapatkan pendidikan secara informal dari kedua orang tuanya, Adis, demikian panggilan akrabnya juga menempuh pendidikan sekolah. Sebelum Megawati memasuki pendidikan dasar, Mega terlebih dahulu mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak yang letaknya berada di lingkungan istana. Tempat pendidikan pra sekolah itu didirikan pada 28 Desember 1949 oleh Ibu Sri Pangusti, teman dekat Presiden Soekarno. Ibu Sri Pangusti yang lebih akrab disapa dengan sebutan Ibu Tuti inilah yang mengajar dan membimbing Mega di Taman Kanak-Kanak.¹⁰

Kemudian untuk pendidikan selanjutnya, Mega menjalani pendidikan formalnya dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga SMA di Perguruan Cikini Jakarta Pusat dari tahun 1959-1965.¹¹ Megawati tidak mendapatkan pendidikan politik di sekolahnya, tetapi selama di sekolah tersebut Megawati mendapat

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹ *Ibid.*, Baca juga Sumarno, *op. cit.*, hlm. 4.

pendidikan dan pengetahuan tentang kehidupan politik melalui pengalaman-pengalaman yang ia alami selama menempuh pendidikan di Perguruan Cikini. Dimana pada saat menjadi siswa di Perguruan Cikini, Mega telah mengalami dan melihat suatu peristiwa yang dengan jelas menunjukkan suatu kekerasan dalam kehidupan politik. Peristiwa tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini. Peristiwa itu terjadi pada saat Bung Karno beserta rombongannya melakukan suatu kunjungan ke Perguruan Cikini tempat di mana Megawati menempuh pendidikan formalnya. Peristiwa tersebut terjadi ketika tiba-tiba seseorang melemparkan sebuah granat ke arahnya. Meski dalam upaya pembunuhan tersebut Bung Karno selamat, tetap saja ada korban dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Cikini merupakan pengalaman nyata sekaligus menjadi pelajaran politik bagi Megawati. Mega yang pada saat itu menjadi panitia, sedang berjaga stand sehingga secara langsung ia menyaksikan banyaknya ceceran darah yang berasal dari korban kekerasan politik tersebut. Hal tersebut membuat Mega memahami bahwa dalam kehidupan politik sarat dengan kekerasan. Bahkan terdapat juga pihak yang menghalalkan segala cara untuk dapat menjatuhkan lawan politiknya.¹²

Pada tahun 1965, Megawati telah menyelesaikan pendidikan SMA di Perguruan Tinggi Cikini, Jakarta Pusat. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang dipilihnya adalah Universitas Pajajaran, Bandung. Di universitas tersebut Megawati masuk di Fakultas Pertanian. Selama menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa, Megawati

¹² *Ibid.*

ikut aktif sebagai anggota biasa dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung. GMNI merupakan suatu gerakan mahasiswa yang pada saat itu dikenal sebagai pendukung kuat setiap ajaran-ajaran Bung Karno.¹³

Mega menjalani pendidikannya di Perguruan Tinggi dengan penuh liku-liku. Berbagai cobaan menimpa kehidupannya sehingga menghambat pendidikan Perguruan Tinggi yang sedang ditempuhnya. Meski ia sempat ikut terlibat aktif dalam GMNI selama menjalani pendidikan di Universitas Pajajaran, Megawati sudah harus ikut menanggung beban politik yang sedang menimpa karier politik ayahnya Bung Karno saat itu. Hal tersebut harus dialami oleh Megawati, karena masuknya Megawati ke Perguruan Tinggi bersamaan dengan mulai menurunnya kekuatan dan pamor Bung Karno di dunia pentas politik nasional. Pada saat itu pamor politik Bung Karno pada pentas politik nasional pada tahun 1965 tidak mengalami peningkatan tetapi justru semakin meredup dan bahkan hampir padam. Menyusul kemudian muncul pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 (G 30 S/PKI).¹⁴

Ternyata pendidikan tidak berjalan dengan mulus. Sebab selain pamor Bung Karno dalam dunia pentas politik mulai meredup dan munculnya kudeta yang dilakukan oleh PKI, berbagai cobaan masih melingkupi kehidupan Bung Karno dan keluarganya. Kondisi buruk yang menimpa Bung Karno membuat Megawati ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh ayahnya. Terutama setelah terjadi penyerahan kekuasaan jabatannya sebagai presiden kepada

¹³ *Ibid.*, Baca juga Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 12, Ardian Taufik Gesuri, "Pergulatan Arus Atas dan Bawah", dalam *Tempo* No. 40 Tahun XXIII, Edisi 4 Desember 1993, hlm. 33.

¹⁴ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 5.

Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan “Supersemar”. Kejadian tersebut membuat Soekarno semakin terdesak dan semakin tidak berdaya. Kemudian dengan dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar terjadi demonstrasi besar-besaran sepanjang tahun tersebut. Dalam demonstrasi itu mereka menuntut pembubaran PKI dan pertanggungjawaban Ir. Soekarno atas gejolak politik dan ekonomi yang terjadi saat itu.¹⁵

Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh ayahnya membuat Megawati ikut merasakan tekanan-tekanan yang dirasakan oleh Ir. Soekarno. Pada tahun 1967 Megawati meninggalkan bangku kuliahnya dan memilih untuk mendampingi Bung Karno menjalani masa-masa sulitnya setelah peristiwa serah terima jabatan sebagai presiden kepada Soeharto. Saat itu kesehatan Bung Karno yang sedang mengalami goncangan karena banyaknya tekanan-tekanan yang memojokkan dirinya. Kesehatan Bung Karno semakin memburuk, pada waktu itu ia juga dikenai karantina politik oleh Soeharto yang telah menjadi penguasa baru menggantikan Bung Karno sebagai presiden Republik Indonesia. Akhirnya Bung Karno menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 21 Juni 1970 setelah cukup lama mengalami goncangan jiwa yang semakin memperburuk kesehatannya. Meninggalnya Bung Karno meninggalkan kesedihan dan kepedihan yang mendalam bagi Megawati dan seluruh keluarga besarnya. Bung Karno meninggal pada saat Indonesia dalam kondisi politik yang tidak menyenangkan, terutama bagi pengikut-pengikut setia Bung Karno.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Setelah meninggalnya Bung Karno, Soeharto yang telah menjadi penguasa pada saat itu, yang lebih dikenal dengan rezim Orde Baru memberikan perintah agar setiap gerak-gerik keluarga Bung Karno selalu diawasi dengan ketat. Adanya perintah yang diturunkan oleh pemerintahan Soeharto untuk dilakukannya pengawasan terhadap keluarga Bung Karno dalam melakukan kegiatan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan politik tidak membuat Megawati menjadi berdiam diri dan larut dalam kesedihan tanpa melakukan tindakan apapun. Setelah situasi politik mulai membaik dan terkendali Megawati memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Namun Megawati tidak meneruskan pendidikan di Universitasnya terdahulu yakni Universitas Pajajaran, tetapi ia lebih memilih untuk masuk ke Universitas Indonesia (UI) pada Fakultas Psikologi.

Seperti pada pendidikannya di Perguruan Tinggi sebelumnya yang terbengkalai karena situasi buruk yang dialami keluarganya khususnya oleh ayahandanya, pada pendidikannya kali ini Megawati juga tidak menyelesaikan pendidikannya hingga selesai. Tanpa ada alasan yang jelas pada tahun 1972 ia memutuskan untuk berhenti dari kuliahnya. Memang pada saat itu Mega telah mempunyai kesibukan lain karena ia telah mempunyai seorang momongan dari pernikahannya dengan almarhum suaminya Lettu Surindro Supjarso.

Banyak peristiwa yang dialami oleh Megawati dan keluarganya membuat Megawati semakin memahaminya bahwa dalam kehidupan politik tidak ada apa itu yang namanya kawan. Yang ada hanyalah persaingan baik itu persaingan individu maupun kelompok yang dilandasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

C. Pendidikan Politik Megawati Soekarnoputri.

Pemahaman tentang politik setiap manusia berbeda-beda dan tidak harus diperoleh melalui pendidikan formal saja. Pendidikan politik juga dapat diperoleh melalui pendidikan di luar sekolah seperti pendidikan non formal maupun informal, serta berbagai pengalaman politik yang pernah ia alami. Selama menjalani pendidikan formal atau sekolah, Megawati tidak menempuh maupun mendapatkan pendidikan tentang pengetahuan politik secara langsung. Berbeda dengan tokoh-tokoh politik lainnya yang secara formal menempuh pendidikan politik. Misalnya saja Amien Rais serta tokoh-tokoh politik lain di Indonesia. Meskipun secara formal Megawati tidak menempuh pendidikan politik, tetapi dalam pentas politik nasional Mega merupakan salah satu tokoh politik nasional yang cukup penting.

Secara keseluruhan Mega memperoleh pendidikan politik dari ayahnya yakni Bung Karno yang merupakan tokoh politik nasional bahkan sepak terjangnya dalam dunia politik dikenal sampai ke dunia politik internasional. Kharisma dan kehebatan Soekarno naik ke panggung politik nasional tidak terlepas dari setiap kegiatan politik yang Bung Karno lalui. Keterlibatannya dalam Jong Java, PNI, dan diskusi-diskusi politiknya dengan para guru politiknya termasuk H.O.S. Tjokroaminoto yang telah menempa dirinya. Soekarno menyadari akan kemampuan politiknya. Sampai akhirnya Soekarno tampil sebagai Ketua Umum PNI dan mengukuhkan kedudukannya sebagai tokoh sentral dalam organisasi tersebut.¹⁷ Bung Karno mendapatkan julukan sebagai

¹⁷ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 5.



“Singa Mimbar”, julukan tersebut diberikan kepada Bung Karno karena semangat, kharisma, dan gaya pidatonya setiap menyampaikan pidato di depan para tokoh politik nasional maupun internasional serta keberaniannya yang secara terang-terangan menentang kekuasaan kolonial.¹⁸ Tidak heran jika kemudian Megawati mewarisi keberanian dan jiwa pemimpin yang dimiliki oleh ayahnya. Meskipun dalam hal kepandaian dalam menjadi *publik figure* masih sangat jauh dibandingkan dengan Bung Karno.

Dalam setiap percakapan dengan anak-anaknya Bung Karno selalu memperkenalkan dengan istilah-istilah politik dan pemahaman tentang kehidupan dalam dunia politik. Dari semua anak-anak Bung Karno hanya Guntur dan Megawati lah yang paling sering diajak berbincang-bincang dan mendiskusikan hal-hal yang lebih penting. Mungkin karena mereka berdua lah yang dianggap lebih dewasa sehingga mengerti apa yang dibicarakan.¹⁹

Dalam memberikan pendidikan Bung Karno tidak membedakan di antara putera-puterinya. Pada setiap ajarannya Bung Karno selalu menekankan kepada anak-anaknya akan pentingnya partisipasi wanita dalam setiap arus perjuangan Bangsa termasuk dalam dunia politik. Pada saat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pemahaman politik, Bung Karno pernah mengatakan: “Bangkitkanlah wanita-wanita itu untuk ikut serta sehebat-hebatnya dalam revolusi kita ini guna kepesatan revolusi itu.” Bung Karno juga menekankan bahwa di Jawa dan kepulauan lainnya wanita benar-benar menjadi roda perjuangan. Sebab perjuangan tanpa wanita bagaikan sayap Garuda yang terpaku

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 7.

di bumi. Pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran Bung Karno juga yang memberikan dorongan bagi Megawati untuk terjun dalam dunia politik.²⁰

Dalam setiap kesempatan Megawati dan saudara-saudaranya selalu mendapatkan pendidikan dari ayahnya terutgama dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik. Bahkan jika ada hal-hal yang menyita perhatian Mega dan saudara-saudaranya, Bung Karno selalu menjelaskan dengan senang dan sejelas-jelasnya sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh anak-anaknya. Untuk memperkaya wawasan politik anak-anaknya Bung Karno sering mengajak mereka berdiskusi dan membahas apa yang telah dibicarakan bersama para tokoh politik.

Bahkan dalam setiap kesempatan mereka tidak saja hanya diberikan pendidikan tetapi sekaligus pengalaman kepada anak-anaknya, terutama terhadap Guntur dan Megawati. Selain diperkenalkan dengan situasi-situasi politik nasional juga situasi politik dalam dunia internasional. Maka untuk memperoleh pengalaman yang bersifat internasional ia sering diperkenalkan dengan para pemimpin dari negara-negara luar. Melalui percakapan, diskusi dan perkenalan dengan tokoh-tokoh politik membuat wawasan mereka dalam bidang politik tidak hanya politik dalam lingkup nasional tetapi juga dalam lingkup internasional.

D. Kehidupan Keluarga Megawati Soekarnoputri.

Kehidupan rumah tangga Megawati bukanlah suatu rumah tangga yang selalu diliputi dengan kebahagiaan dan tidak dengan mudah ia jalani. Setelah ia memasuki kehidupan bahtera rumah tangga, kehidupannya dipenuhi liku-liku dan

²⁰ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 6.

berbagai cobaan. Kehidupannya yang dipenuhi dengan liku-liku kehidupan tidak membuat Megawati menjadi lemah dan menyerah pada nasib. Justru dengan berbagai liku-liku yang menjadi ganjalan dalam setiap kehidupannya membuat Mega semakin menjadi pribadi yang kuat dan dapat merenungkan arti hidup dan kehidupan. Megawati dapat lepas dari kondisi yang dapat membuatnya terpuruk dan tidak mempengaruhi kariernya dalam kehidupan politik.

Mega memutuskan untuk melepas masa lajangnya setelah seorang penerbang Lettu (Letnan Satu) Surindro Supjarso atau yang sering dipanggil dengan sebutan Mas Pacul mempersuntingnya. Kebahagiaan meliputi keluarga baru Megawati dan Surindro, tetapi kebahagiaan yang mereka rasakan hanyalah sementara karena peristiwa naas telah menimpa suami Megawati saat sedang menjalankan tugasnya. Di mana terdengar kabar bahwa Lettu Surindro Supjarso (suaminya) bersama tujuh awak pesawat Skyvan T-70 telah dikabarkan jatuh di Biak, Irian Jaya (= Sekarang Papua) pada tahun 1970 tak lama setelah wafatnya Bung Karno.²¹ Saat itu Megawati tengah mengandung anak pertamanya bersama Lettu Surindro.

Dua tahun setelah peristiwa naas yang menimpa suaminya, dalam sebuah pesta yang diadakan pada salah satu restoran di Jakarta Mega bertemu dan berkenalan dengan seorang pemuda bernama Hassan. Gamal Achmad Hassan atau yang lebih akrab disapa dengan Hassan adalah seorang diplomat Mesir yang pada saat itu sedang bertugas di Jakarta.²² Kemudian setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan pendekatan akhirnya pada tanggal 27 Juni 1972 Megawati dan

²¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 6.

²² *Ibid.*

Hassan melangsungkan pernikahan sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Jawa Barat.²³

Namun bahtera rumah tangga yang ia bangun bersama Hassan juga mengalami cobaan. Hassan yang ternyata telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai diplomat dan beralih profesi menjadi konsultan para pengusaha Arab di Timur Tengah yang hendak menanamkan modal-modalnya di Indonesia. pernikahannya dengan Hassan tidak mendapatkan restu dari keluarga besar Bung Karno, tanpa memberikan alasan yang jelas.²⁴

Penghalang tidak hanya datang dari pihak keluarga Megawati saja yang tidak merestui pernikahannya dengan Hassan. Pada bulan Juli 1972 perkawinannya dibahas secara hukum di Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dan oleh pengadilan perkawinannya dengan Hassan dianggap tidak sah. Setelah perdebatan panjang di kalangan para ahli hukum maka pada tanggal 10 Juli 1972 pengadilan secara resmi menjatuhkan vonis yang lebih berat yakni mengarah pada pembatalan perkawinan. Vonis pembatalan perkawinan tersebut dijatuhkan karena menurut Ketua Pengadilan Agama Jakarta, KH. Muchammad Muchtar bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dengan lengkap. Selain itu Mega belum menyandang predikat janda secara resmi sebelum ada keterangan yang pasti dari Markas Besar Angkatan Udara (MBAU) tentang kematian suaminya Lettu Sarindro Supjarso.²⁵ Selama dua tahun Instansi hanya

²³ *Ibid.*

²⁴ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*

memberikan pernyataan bahwa Lettu Surindro mengalami *Missing in Action* di perairan Pulau Biak dan belum dinyatakan wafat sebelum ditemukan jasadnya.²⁶

Penyelesaian secara hukum tentang perantara perkawinan Megawati dan Hassan tersebut berakhir dengan pembatalan perkawinan yang sudah dilaluinya selama 21 hari. Pembatalan perkawinan itu tidak dapat diterima dengan mudah oleh Megawati. Salah satu orang yang menentang pembatalan pernikahan tersebut adalah Hamka yang berpendapat bahwa menurut agama akad nikah Megawati dan Hassan itu syah. Meski demikian keputusan yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dapat diganggu gugat dan perkawinan tetap dibatalkan.²⁷

Meskipun dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu dihadang oleh berbagai rintangan bahkan gugatan. pernikahannya dengan Hassan dibatalkan oleh Pengadilan Istimewa Agama Jakarta tidak membuat Mega menutup diri terlalu lama dalam kesedihan. Sebab setelah pembatalan perkawinannya tersebut, Mega kembali menemukan orang yang tepat untuknya. Mega kembali merajut cintanya, dan kali ini pandangannya jatuh pada seorang pemuda asal Ogan Komering Ulu (OKU), Palembang. Pemuda tersebut bernama Taufik Kiemas. Ia adalah salah satu aktivis GMNI seperti halnya Mega sendiri. Taufik Kiemas juga yang bersikeras agar jenazah Bung Karno dimakamkan di daerah Jawa Barat sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Bahkan karena aktivitasnya dalam GMNI, Kiemas juga pernah dijebloskan ke dalam penjara dan berstatus sebagai tahanan politik (tapol) atas tuduhan bahwa semasa muda Taufik Kiemas ikut

²⁶ *Ibid.* Baca juga Agus Basri & Nunik Iswardhani. "Mega dan Berbagai Tanda", dalam *Tempo* No. 43 Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993, hlm. 17.

²⁷ *Ibid*

terlibat dalam pembakaran harian Nusa Putra milik Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Kemudian Taufik bebas dari masa tahanan pada tanggal 18 Mei 1982.²⁸

Megawati dan Taufik Kiemas akhirnya melangsungkan pernikahan setelah ia dan keluarganya memperoleh kepastian dari Instansi bahwa Lettu Surindro suami pertamanya memang telah meninggal dalam musibah di Biak, Irian Jaya. pernikahannya kali ini mendapatkan restu dari keluarga Bung Karno.²⁹

Dalam kehidupan rumah tangganya bersama Taufik Kiemas, Mega menemukan banyak kecocokan dan keserasian. Keduanya saling mendukung setiap keputusan yang diambil. Taufik selalu mendampingi dan mendukung setiap langkah yang diambil oleh Mega. Terutama dalam karier politiknya baik pada saat Mega mengambil keputusan untuk terjun dalam dunia politik sampai saat sekarang di mana Mega telah menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan pecahan dari PDI. Dalam pernikahannya Megawati dikaruniai tiga orang anak. Anak sulungnya bernama Muhammad Rizki Pratama yang menempuh kuliah di ITB Jurusan Arsitektur. Kedua anaknya yang lain bernama Muhammad Prananda dan Puan Maharani. Keduanya menempuh pendidikan tinggi di Fakultas FISIP Universitas Indonesia. Ketiga anaknya tentu saja sudah menyelesaikan kuliahnya masing-masing dan telah menjadi orang yang sukses saat ini. Tentu saja semua itu tidak lepas juga dari didikan orang tuanya, Megawati dan Taufik.³⁰

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 20.

²⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 7.

³⁰ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 20.

E. Terjunnya Megawati Soekarnoputri Dalam Dunia Politik.

Telah dibicarakan sebelumnya bahwa Megawati Soekarnoputri tidak secara formal menempuh pendidikan politik. Namun pemahamannya tentang politik sangat mendukung Mega untuk terjun dalam kancah perpolitikan nasional seperti halnya dengan ayahnya Bung Karno. Bagi Mega Bung Karno adalah ayah sekaligus guru besarnya dalam hal pendidikan politik baik itu yang bersifat teori maupun pengalaman politik yang ia alami sepanjang ia mendampingi masa-masa kritis Bung Karno hingga saat-saat meninggalnya.

Setelah Bung Karno meninggal, kehidupan keluarga dan putera-puterinya merupakan suatu perjalanan hidup yang berat untuk mereka jalani. Mereka harus menjalani hidup dibawah tekanan-tekanan politik penguasa baru yaitu pemerintahan Soeharto. Mereka tidak dapat dengan bebas bergerak dan melakukan aktivitas karena kehidupan mereka terisolasi dan selalu diawasi. Dalam setiap hal yang dilakukan oleh keluarga Bung Karno, lebih-lebih yang mengatas namakan Bung Karno dijegal dan dipersulit bahkan tidak diberikan ijin oleh pemerintah.³¹

Hidup di bawah tekanan penguasa Orde Baru sangat dirasakan oleh keluarga Bung Karno. Terutama oleh anak-anaknya yang ingin terjun dalam dunia politik nasional. Guntur misalnya, putera sulung Bung Karno ini pada saat itu sangat diharapkan untuk dapat memimpin PDI dan ikut serta meramaikan kampanye Pemilu 1971, namun penguasa saat itu tiba-tiba tidak memberikan restu dan ijin.³²

³¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 9.

³² Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 21.

Hal tersebut menimbulkan perasaan trauma politik pada diri Megawati dan anak-anak Bung Karno yang lain. Trauma yang dialami pada masa akhir hayat Bung Karno dan selama dasa warsa awal rezim Orde Baru pemerintahan Soeharto membuat anak-anak Bung Karno memutuskan untuk tidak terjun atau terlibat langsung dalam hiruk pikuknya dunia politik. Bahkan pada tahun 1982, keluarga besar Bung Karno pernah membuat suatu konsensus. Inti dari konsensus tersebut berisikan tentang kesepakatan bahwa di antara seluruh anggota keluarga Bung Karno tidak dibenarkan memihak kepada salah satu kekuatan politik yang ada. Mereka juga sepakat bahwa akan berdiri di atas semua golongan. Mereka beranggapan bahwa saat itu tidak ada satu kekuatan politik pun, termasuk juga PDI yang hendak meneruskan semangat Marhaenisme, ajaran-ajaran Bung Karno. Konsensus tersebut ditandatangani oleh putera-puteri Bung Karno dari Ibu Fatmawati yaitu Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputra, serta anak-anak Bung Karno dari Ibu Hartini, yakni Bayu dan Taufan.³³

Setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut oleh anak-anak Bung Karno untuk tidak terjun dalam dunia politik tetapi setiap gerak-gerik mereka terus diawasi. Pada saat mereka akan bergerak dan mengawali kegiatan di luar politik yakni bidang sosial, pendidikan dan kesenian pemerintah tidak pernah memberikan ijin. Hal tersebut dialami oleh adik kandung Megawati yang hendak mendirikan sebuah Universitas Bung Karno pada tahun 1982. Namun untuk pendidikan pun mereka juga tidak mendapatkan ijin dari pemerintah tanpa adanya

³³ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 11

alasan yang jelas mengapa ijin tidak diberikan. Padahal kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan bidang politik sekalipun. Universitas Bung Karno yang didirikan oleh Rachmawati tidak dapat beroperasi untuk memulai pengajarannya karena tidak mendapatkan ijin dari pemerintah, padahal universitas tersebut sudah mempunyai gedung dan sekitar 4000 orang mahasiswa telah mengikuti seleksi masuk. Hal yang serupa juga dialami oleh adik bungsunya Guruh Soekarnoputra yang menginginkan mendirikan sebuah museum. Namun seperti halnya Rachmawati, Guruh juga tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Selain itu pertunjukan seninya Grup Suara Mahardhika mendapat hambatan dalam hal masalah perijinan.³⁴

Dengan banyaknya tekanan dan penjegalan yang dilakukan oleh pemerintah rezim Orde Baru yang dialami oleh keluarga Bung Karno membuat Mega semakin gigih dalam menghadapi berbagai persoalan. Mega merasakan bagaimana ayahnya mengalami pasang surut karier politik membuat Mega semakin memahami dan menyadari konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi dalam dunia politik. Dunia yang sarat dengan berbagai konflik kepentingan dengan perebutan kekuasaan, di mana dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Dalam politik yang bersifat abadi hanyalah kepentingan.³⁵

Terjunnya Mega ke kancah politik nasional tersebut “melanggar” kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh keluarga besar Bung Karno untuk

³⁴ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 22.

³⁵ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 9.

tidak memihak pada kekuatan politik manapun. Termasuk juga PDI pada waktu itu.³⁶

Tahun 1987, Megawati Soekarnoputri “melenceng” dari kesepakatan keluarganya dan bergabung dengan PDI. Terjunnya Megawati dalam politik nasional menimbulkan kepanikan bagi pemerintahan Soeharto. Namun sikap diam Megawati membuat keluarga dan pemerintah membiarkannya terus menjajaki kariernya dalam dunia politik karena sikap Megawati dinilai bukan sikap yang akan merugikan pemerintahan Orde Baru. Langkah yang diambil Megawati untuk terjun dalam dunia politik juga diikuti oleh adik bungsunya Guruh Soekarnoputra. Awal mula terjunnya Megawati dalam dunia politik nasional dan bergabung dalam PDI atas bujukan dari Soerjadi. Soerjadi merupakan Ketua Umum PDI pada saat itu dan merekrut Mega untuk menjadi *vote getter* dalam kampanye-kampanye PDI. Upaya perekrutan Megawati ke dalam PDI sebenarnya merupakan strategi yang dilakukan oleh Soerjadi untuk meningkatkan perolehan suara PDI dalam Pemilu 1987 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Harapannya dengan merekrut Megawati akan membangkitkan kembali ingatan-ingatan dan kharisma Bung Karno yang masih melekat erat dalam diri para pendukungnya. Hal ini karena sebagian besar memang berasal dari PNI yang merupakan partai Bung Karno. Masuknya Mega dalam PDI diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara dalam pemilu dan meningkatkan perolehan kursi parlemen bagi PDI.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12. Baca juga Andi Setiono, *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa di Indonesia*, Terawang Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 5.

³⁷ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 12.

Berawal dari peranannya sebagai *vote getter* membuat Megawati semakin mantap dalam berpolitik karena ia menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk berkarier dalam dunia politik. Kemampuan dalam berpolitik dapat terbukti dimana dalam peranannya sebagai *vote getter* PDI dalam pemilu menuai keberhasilan dalam Pemilu 1987 dan 1992 karena setelah Megawati tergabung dalam PDI perolehan suara PDI dalam pemilu menjadi meningkat drastis. Keberhasilannya tersebut membuat Megawati mengambil keputusan untuk terus berkarier dalam bidang politik meskipun keputusan yang ia ambil telah melenceng dari konsensus keluarga yang telah disepakati dan ditandatanganinya.

Megawati juga menyadari bahwa keterlibatannya dalam politik praktis tidak didukung sepenuhnya oleh keluarga besar Bung Karno. Tapi semua itu berjalan dengan pengertian asas kekeluargaan, meski ada perbedaan tetapi selalu dekat. Megawati bergabung dalam PDI karena kekuatan politik sudah berasaskan Pancasila sehingga menurut Megawati komitmen keluarga itu sudah tidak lagi mengikat.³⁸

³⁸ Ardian Taufik Gesuri, "Mereka Ahli Waris Nama Besar", dalam *Tempo* No. 42 Tahun XXIII, Edisi 18 Desember 1993, hlm. 25-26. Baca juga *Ibid.*, dalam *Tempo* No. 40 Tahun XXIII, Edisi 4 Desember 1993, hlm. 33.

BAB III

PERANAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM FRAKSI PDI TAHUN 1987-1993

A. Partai Demokrasi Indonesia

A. 1 Sejarah singkat berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto. Soeharto melakukan penciptaan partai yang ada sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang partai politik yang mengamanatkan penciptaan partai peserta pemilu 1971.¹ Terbentuknya PDI ini merupakan hasil fusi dari lima partai politik (parpol) yang menganut paham nasionalisme, sosialisme, dan keagamaan (Kristen Protestan dan Katholik). Kelima partai tersebut yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Katholik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).²

Terbentuknya PDI, sebenarnya merupakan hasil perubahan sistem politik yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Perubahan sistem politik yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yakni menyederhanakan dari banyak partai yang ada sebelumnya menjadi tiga partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi

¹ Wolas Krenak, *PDI-P Jangan Sampai "Terbonsai" Akibat Konflik, Utamakan Kepentingan Rakyat*, dalam <http://www.suara pembaharuan.com/News/2000/09/11/Nasional/na02/na02.html>.

² Adriana Elizabeth Sukanto, *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

Indonesia (PDI).³ Dari ketiga partai hasil fusi tersebut, PDI merupakan satu-satunya partai yang merupakan hasil fusi dari partai-partai politik yang mempunyai paham atau ideologi politik yang berbeda-beda. PPP merupakan partai hasil fusi dari partai-partai yang menganut paham politik yang sama yakni keagamaan. Partai-partai yang berfusi menjadi PPP yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti. Sedangkan Golkar merupakan satu-satunya partai yang tidak mengalami perubahan sama sekali dan tetap menjadi satu partai, karena partai Golkar bukanlah hasil fusi dari partai manapun.⁴

Upaya penggabungan atau fusi partai itu sebenarnya sudah dipikirkan sejak tahun 1966 pada awal pemerintahan Soeharto. Saat itu muncul kesadaran di kalangan pemerintah Orde Baru dan masyarakat umum bahwa untuk meningkatkan peran partai politik, pembaharuan struktur politik harus dilakukan dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartaian.⁵

Tuntutan terhadap pembaharuan sistem politik yang semakin kuat dan kerasnya kritik terhadap peran partai-partai politik yang dianggap telah menunjukkan perangai buruk dalam sistem politik yang telah berlaku sebelumnya maka pemerintah menetapkan untuk melakukan pembaharuan dengan melakukan penciptaan partai politik yang ada..⁶ Sistem politik yang berlaku pada pemerintahan Soekarno telah melahirkan disintegrasi nasional sehingga menimbulkan trauma politik. Untuk itu sistem politik yang telah melahirkan disintegrasi nasional dan

³ Hasrullah, M.A., *Megawati Dalam Tangkapan Pers*, LkiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 49.

⁴ *Ibid.*

⁵ Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*. Pusat Utama Grafiti. Jakarta. 1996. hlm. 56.

⁶ *Ibid.*

menimbulkan trauma politik dalam diri masyarakat umum dan pemerintah Orde Baru, maka hal tersebut dijadikan pengalaman buruk bagi pemerintahan Soeharto dalam menjalankan politik nasionalnya.⁷ Untuk mengurangi trauma tersebut dan memperbaiki sistem politik yang berlaku sebelumnya yaitu sistem Demokrasi Terpimpin maka pemerintah melaksanakan suatu penyederhanaan partai.

Presiden Soeharto kemudian menyampaikan kepada partai-partai yang ada sebelumnya tentang gagasannya untuk melakukan penyederhanaan partai dengan mengelompokkan partai-partai politik yang ada didasarkan atas golongan. Golongan tersebut terdiri dari golongan nasional, golongan karya, dan golongan spiritual.⁸ Penyederhanaan partai tersebut oleh Daniel Dhakidae disebut sebagai pembuldoeran partai terutama terhadap partai yang paling dominan pada masa Orde Lama yakni PNI dan Masyumi.⁹ Pengelompokan partai-partai politik menjadi tiga golongan tersebut, memunculkan sikap pro dan kontra. Partai yang menerima pengelompokan partai berdasarkan golongan adalah PNI dan IPKI. Keduanya merupakan partai yang berideologikan nasionalis. Partai lain yang menyetujui adanya pengelompokan partai-partai politik adalah Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU). Pengelompokan partai yang didasarkan atas asas tersebut tentu saja merupakan keuntungan bagi partai politik Islam seperti yang dikatakan oleh Lukman Harun, salah satu tokoh Parmusi. Sebab dengan adanya pengelompokan tersebut, setidaknya partai-partai Islam yang terpecah-pecah karena kepentingan masing-masing kelompok akan bersatu dalam satu wadah atau

⁷ *Ibid.*, hlm. 50

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*

satu partai saja. Sementara menurut salah satu tokoh NU, Subhan Z.E, pengelompokan tersebut akan mempermudah setiap proses pengambilan keputusan, sehingga berbagai alternatif pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam dapat diperkecil.¹⁰

Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil pasti ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra atau menolak. PNI dan NU merupakan partai yang menerima keputusan pemerintah Orde Baru untuk melakukan penyederhanaan partai dengan didasarkan atas golongan. Berbeda dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik, kedua partai tersebut menolak keputusan pemerintah untuk melakukan pengelompokan partai berdasarkan golongannya. Penolakan tersebut karena Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik tidak mau dimasukkan dalam golongan spiritual dengan alasan golongan tersebut sangat didominasi oleh partai-partai politik Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti. Oleh karena itu Parkindo dan Partai Katholik lebih senang jika dimasukkan dalam golongan partai-partai nasionalis, dengan alasan bahwa golongan nasionalis dapat melaksanakan program yang tidak mementingkan motif-motif ideologis. Partai Katolik bahkan lebih memilih membubarkan diri daripada partainya harus dikelompokkan ke dalam golongan spiritual.¹¹

Bahkan Frans Seda, salah satu tokoh dari Partai Katolik sangat getol mengemukakan pendapatnya tentang pengelompokan partai-partai politik tersebut. Gagasannya yaitu agar orsospol yang ada di Indonesia tidak hanya dikelompokkan menjadi tiga partai saja, tetapi menjadi lima partai. Dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

rincian dua partai politik nasional, dua partai politik spiritual, dan satu partai golongan karya. Dengan alasan agar aspirasi politik dapat tertampung sesuai dengan asas sari partainya.¹²

Usulan Frans Seda untuk menjadikan partai-partai yang ada menjadi lima kelompok tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian tahun 1970, didepan partai politik dan golongan karya Presiden Soeharto mengemukakan pemikirannya tetap akan mengelompokan partai-partai yang ada sebelumnya menjadi tiga partai yakni golongan nasionalis, golongan karya, dan golongan spiritual. Menurut Presiden Soeharto dikelompokannya partai menjadi tiga partai tersebut mempunyai tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kampanye pemilu. Oleh sebab itu pemerintah tidak dapat merealisasikan pengelompokan partai menjadi lima partai politik tetapi tetap dikelompokan menjadi tiga partai politik. Pada saat dilaksanakannya pengelompokan partai tersebut, maka Parkindo dan Partai Katolik lebih suka dimasukkan ke dalam golongan nasionalis, dan bukan dalam golongan spiritual.¹³ Secara politis dapat dikatakan bahwa Parkindo dan Partai Katolik "terpaksa" berfusi dalam partai golongan nasionalis karena usulan Frans Seda agar partai dikelompokkan menjadi lima golongan partai ditolak oleh pemerintah.

Pada 4 Maret 1970, golongan nasionalis yang terdiri dari PNI, IPKI, Partai Murbo, Perkindo dan Partai Katolik tersebut akhirnya terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kelima partai yang dikelompokan dalam golongan nasionalis itulah yang kemudian menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

¹² Adriana Elizabeth Sukamto, *op. cit.*, hlm. 71. Baca juga Hasrullah, M.A, *op. cit.*, hlm. 50.

¹³ *Ibid.* Lihat juga Adriana Elisabeth Sukamto, *op.cit.*, hlm. 73.

meski Parkindo dan Partai Katolik yang bernaung dalam PDI sebelumnya menolak dan menganut asas spiritual (Kristen Protestan dan Katolik).¹⁴

Menyusul kemudian golongan spiritual yang terbentuk pada tanggal 14 Maret 1970 yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Golongan Spiritual merupakan cikal bakal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan golongan nasionalis merupakan cikal bakal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya merupakan partai yang berdiri sendiri dan bukan sebagai hasil fusi dari partai manapun.¹⁵ Golongan-golongan tersebutlah yang kemudian menjadi partai-partai yang akan mengikuti pemilu 1971 dan seterusnya.

Pada tanggal 10 Januari 1973 akhirnya diputuskan untuk meresmikan golongan nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Persetujuan pembentukan golongan nasionalis menjadi PDI ini ditandatangani oleh para deklarator yang mewakili masing-masing partai yang ikut berfusi dalam PDI. Para deklarator tersebut yakni Achmad Sukarmadidjaja dan M.H. Sadri deklarator dari IPKI, Isnaeni dan Abdul Madjid dari PNI, Ben Mang Reng Say dan F.S Wigyo Sumarsono dari Partai Katolik, Sabam Sirait dan A. Wenas deklarator dari Parkindo, serta S. Murbantoko dan Djon Pakan dari Partai Murba.¹⁶

Partai Demokrasi Indonesia yang sudah terbentuk secara resmi itu tidak begitu saja lepas dari konflik, karena sebagai partai hasil fusi dengan perbedaan ideologi ini memungkinkan munculnya konflik intern PDI. Konflik intern tersebut

¹⁴ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 58, Baca juga Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program (Edisi Pemilu)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999, hlm. 176.

dapat muncul karena masing-masing partai membawa kepentingan dan tujuannya dalam PDI. Masing-masing partai tersebut mempunyai simbol partainya masing-masing yang dapat menunjukkan identitas partainya. Hal itu dapat menyebabkan konflik dalam tubuh partai tersebut untuk saling berebut menggunakan simbol mereka sebagai identitas dari partai yang merupakan hasil fusi yakni PDI. Oleh sebab itu tidak dapat dihindari jika sejak berdirinya partai tersebut (PDI) sudah muncul konflik-konflik intern dalam tubuh PDI yang bahkan tidak ada surut-surutnya.

A. 2. Konflik Intern dan Masalah-Masalah Lain Yang Muncul Dalam Tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Konflik atau masalah selalu ada dalam kehidupan manusia baik dalam suatu organisasi maupun pada setiap individu. Konflik juga muncul dalam PDI yang merupakan suatu organisasi dan sudah ada sejak berdirinya PDI. Konflik dalam tubuh PDI seperti tidak ada surut-surutnya terutama permasalahan intern yang berkaitan dengan masalah identitas partai dan pergantian pemimpin partai. Organisasi atau partai yang dibentuk mempunyai tugas pokok atau tujuan yang ingin dicapai. PDI juga mempunyai tujuan sebagai partai. Tujuan PDI yang kemudian berasaskan Pancasila ini adalah:

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai negara hukum yang demokratis.

3. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁷

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa tugas pokok PDI adalah memperjuangkan nasionalisme, demokrasi, dan kerakyatan demi tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan nasional yang berkeadilan sebagai pengamalan Pancasila.¹⁸ Semua tujuan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal dengan banyaknya konflik yang muncul dalam tubuh PDI. Kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut terjadi jika dalam pelaksanaannya tujuan-tujuan tersebut diperjuangkan dengan penuh ambisi kekuasaan dan bahkan secara berlebihan yang dapat memunculkan berbagai perbedaan dan kekacauan maka konflik intern PDI atau dalam partai lainnya tidak dapat dihindarkan lagi.

Ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai hasil fusi. Secara umum ada dua konsekuensi buruk yang harus dihadapi sebagai akibat terjadinya fusi bagi partai politik. Pertama, bahwa posisi partai yang merupakan hasil fusi menjadi sangat bergantung kepada tendensi politik nasional yakni partai bergantung pada pemerintah. Tendensi politik nasional tersebut tidak mengakar

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁸ Adriana Elisabeth Sukanto, dkk, *op. cit.*, hlm. 54.

pada rakyat banyak. Konsekuensi kedua adalah fusi menjadikan partai politik mengalami kesulitan dalam menjelaskan esensi kehadirannya di hadapan tata politik nasional yang ada. Sedangkan menurut Syamsuddin Haris, mekipun partai tersebut dapat menjelaskan esensi kehadirannya, kehadirannya akan selalu berhubungan dengan keberadaan parpor-parpol lainnya yang berfusi dalam partai PDI. Hal itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi pemerintahan Orde Baru.¹⁹

Namun jika dilihat dari perjalanan terbentuknya partai politik sebagai hasil pemfusan, dari hasil restrukturisasi politik yang melahirkan tiga partai politik yakni PPP, Partai Golongan Karya (Golkar), dan PDI, PPP dan PDI lah yang sering diwarnai oleh berbagai konflik dalam tubuh partai. Terlalu seringnya terjadi konflik dalam tubuh partai-partai tersebut, menjadikan konflik menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan eksistensinya sebagai partai yang lahir dan tumbuh pada masa pemerintahan Soeharto. Terutama PDI, boleh dikatakan PDI sebagai partai yang penuh gejolak karena konflik selalu ada dalam tubuh partai tersebut dari sejak terbentuknya PDI yakni pada 10 Januari 1973 hingga diselenggarakannya KLB (Kongres Luar Biasa) di Surabaya pada tahun 1993. Konflik terus ada terpilihnya Megawati Soekarnoputri dan terpecah menjadi dua kubu PDI yakni PDI Soerjadi dan PDI Megawati yang sekarang lebih dikenal dengan PDI-Perjuangan. PDI terus saja mengalami kemelut intern yang tak kunjung surut.

¹⁹ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 58.

Bagi PDI, pemfusiian membawa sejumlah konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syamsuddin Haris.²⁰ Pertama, timbulnya konflik intern yang berkepanjangan dalam tubuh PDI. Kedua, hilangnya identitas PDI sebagai partai yang berfusi.²¹ Konsekuensi pertama, timbulnya konflik yang berkepanjangan dalam tubuh PDI, pada hakikatnya konflik yang muncul dalam tubuh PDI khususnya yang melibatkan para tokoh dari PDI ini mengandung dua dimensi.²² Kedua dimensi tersebut adalah dimensi “konflik warisan” dan dimensi “kepentingan pribadi”. Pada dimensi konflik warisan, terdapat dua kubu yang saling berhadapan, yakni kubu keras (radikal) dengan kubu moderat (kompromis). Dalam setiap konflik yang terjadi, kubu radikal selalu dapat tersingkir dan sebaliknya kubu moderat selalu keluar sebagai pemenang.²³ Namun ada kalanya juga kemenangan yang diperoleh oleh kubu moderat atas kubu garis keras berkat adanya campur tangan dari pemerintah.²⁴ Contoh; konflik antar kelompok dalam tubuh PDI antara Sanusi – Usep dari kubu garis keras, dengan kelompok Isnaeni – Sunawar dari kubu moderat atau kompromis tahun 1977 setelah Kongres I PDI berakhir. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan mengenai pencalonan unsur PDI yang akan duduk dalam jabatan pemimpin MPR/DPR. Konflik ini pun berakhir pada awal tahun 1978 pada tanggal 16 Januari dengan tersingkirnya kelompok Sanusi – Usep dari kubu garis keras.²⁵

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 59.

²² Adriana Elizabeth Sukanto, *op. cit.*, hlm. 55, lihat juga Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 51.

²³ *Ibid.*

²⁴ Manuel Kaisepo, *Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas*, Prisma No. 12, Desember 1981, hlm. 79.

²⁵ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 59-60.

Dimensi kedua yang dapat menimbulkan konflik intern yang berkepanjangan dalam tubuh PDI adalah dimensi “konflik pribadi” (*vested interest*) antar individu dalam PDI.²⁶ Konflik pribadi ini sebagian muncul pada kalangan elite politik tubuh PDI sehingga konflik tidak pernah surut. Menurut beberapa pengamat partai konflik yang terjadi dalam tubuh PDI justru banyak diwarnai oleh konflik antar individu yang dilandasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Kelompok yang sering konflik adalah mereka orang-orang dari unsur PNI yang memang merupakan partai yang paling mendominasi pemfusiian dalam PDI.²⁷ Misalnya konflik yang terjadi pada saat menyelenggarakan Kongres III PDI pada tanggal 15-17 April 1986. Konflik tersebut muncul karena kegagalan kongres dalam melakukan pemilihan Ketua Umum DPP PDI yang akan menggantikan Soenawar Soekawati yang meninggal dunia beberapa bulan sebelumnya.²⁸ Kongres yang gagal dalam memilih ketua umum ini mengalami jalan buntu sehingga pembentukan kepengurusan DPP PDI dengan “terpaksa” diserahkan kepada pemerintah. Atas “campur tangan” pemerintah maka dibentuklah pengurus PDI dan Soerjadi sebagai ketua umum hasil dari pilihan pemerintah.²⁹

Terpilihnya Soerjadi sebagai ketua umum DPP PDI sungguh di luar dugaan para kader PDI. Sebab Soerjadi bukan orang yang dicalonkan dan diunggulkan sebagai ketua umum, namanya pun tidak ada dalam daftar calon tetapi ia justru terpilih. Sementara yang dinilai sebagai calon yang kuat sebagai

²⁶ Adriana Elizabeth Sukamto, *op. cit.*, hlm. 55.

²⁷ *Ibid.* Bandingkan dengan Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 51.

²⁸ Adriana Elizabeth Sukamto, *op. cit.*, hlm. 55.

²⁹ *Ibid.*

Ketua Umum DPP PDI yakni Hardjantho Sumodisastro salah satu Wakil Ketua DPR RI periode 1982-1987 justru tidak terpilih oleh pemerintah.³⁰

Soerjadi terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI yang baru atas persetujuan pemerintah, namun bukan berarti konflik intern dalam PDI telah surut. Konflik dapat muncul kapan saja ke permukaan. Meskipun secara “*de jure*” kepemimpinan Soerjadi dalam PDI mendapatkan pengakuan dari pemerintahan Orde Baru, berbeda dengan orang-orang dalam PDI yang tidak menerima kepemimpinan Soerjadi khususnya tokoh-tokoh senior PDI. Kepemimpinannya Soerjadi dalam PDI memang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh generasi muda, apalagi setelah kepemimpinannya, Soerjadi berhasil mencari solusi untuk meningkatkan perolehan suara pemilih dalam pemilu 1987 dengan merekrut keluarga Soekarno. Namun tidak sedikit para tokoh tua terutama yang pernah aktif dalam PNI partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno dengan berbagai alasan tidak senang terhadap kepemimpinan Soerjadi dalam PDI. Manai Sophian yang merupakan salah satu mantan tokoh PNI menilai bahwa DPP PDI terlalu dekat dengan penguasa atau pemerintah.³¹

Ada juga tokoh PDI yang kurang senang terhadap manajemen partai yang diterapkan oleh DPP PDI.³² Persoalan lain yang tak kalah pentingnya yakni berkaitan dengan kesan bahwa DPP PDI di bawah pimpinan Soerjadi belum sepenuhnya menjalankan prinsip musyawarah.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Luqman. A. PDI: “Sang Bima Masa Depan”, dalam *Tempo* No. 47 Tahun XVI, Edisi 17 Januari 1987, hlm. 13-14.

³³ Adriana Elizabeth Sukamto, *op. cit.*, hlm. 56-57.

Pada kepemimpinan Soerjadi dalam PDI ini sebenarnya sarat dengan konflik. Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh-tokoh lain dalam PDI untuk menggulingkan Soerjadi dari kepemimpinannya dalam PDI. Bahkan konflik intern terus saja ada dalam tubuh PDI ketika pada Kongres IV PDI pada bulan Juli 1993 di Medan yang juga mengalami kegagalan, sampai akhirnya muncul nama Megawati dalam deretan nama yang dicalonkan sebagai ketua umum PDI. Dengan penuhnya keambisiusan dalam diri para tokoh PDI yang dilandasi oleh kepentingan pribadi tidak akan dapat menghentikan konflik intern dalam partai tersebut. Seperti halnya yang dilakukan untuk Soerjadi nama Megawati yang semakin melejit juga menumbulkan konflik yang tidak ada hentinya baik dari dalam intern PDI maupun dari pihak luar partai yakni pemerintahan Soeharto.

Konflik intern terus muncul saat Megawati muncul sebagai calon pemimpin PDI dan memperoleh dukungan yang kuat dari orang-orang yang menginginkan perubahan dalam tubuh PDI. Melalui KLB PDI di Surabaya pada bulan Desember 1993 Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Namun Megawati terpilih secara "*de facto*" karena kepemimpinan Megawati tidak diakui secara "*de jure*" yakni kepemimpinan yang diakui oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Mega setelah ia terpilih sebagai pemimpin PDI periode 1993-1998, "Secara *de facto* saya memang sudah menjadi Ketua Umum PDI, tetapi secara *de jure* memang belum...".³⁴ Konflik semakin panas karena adanya kongres IV PDI (kedua) di Medan yang berdampak dengan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 yang lebih dikenal dengan peristiwa Sabtu Kelabu antara pendukung Kongres Medan

³⁴ Somarno, *op. cit.*, hlm. 18. Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 29.

(kedua) dengan pendukung Megawati sehingga menjatuhkan banyak korban dari PDI kubu Megawati. Karena peristiwa tersebut PDI akhirnya terpecah menjadi dua kubu, yakni PDI pimpinan Soerjadi dan PDI pimpinan Megawati.

Konsekuensi kedua yang harus dihadapi PDI sebagai hasil fusi adalah hilangnya identitas PDI sebagai partai yang bersatu.³⁵ Adanya fusi partai dengan perbedaan ideologi, masalah identitas partai merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh PDI sebagai partai hasil fusi. Perbedaan ideologi dapat melahirkan persoalan besar dalam tubuh PDI seperti permasalahan yang menyangkut identitas partai dan masalah-masalah lain yang akan muncul dalam tubuh PDI.³⁶ Konflik dapat menjadi semakin luas dengan adanya masalah identitas partai, sebab masing-masing partai yang berfusi dalam PDI saling berebut untuk menjadikan identitas partainya sebagai identitas partai PDI. Oleh karena itu konflik yang dilandasi oleh perbedaan ideologi ini dapat membuat PDI kehilangan simbol dirinya sebagai partai. Masalah identitas partai akan berdampak secara langsung terhadap performa PDI dihadapan massa pendukungnya yang akan memberikan suaranya dalam pemilu.³⁷ Di antara partai-partai yang merupakan hasil fusi PPP dengan PDI, masalah identitas partai tidak ditemukan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini dikarenakan partai yang berfusi dalam tubuh PPP merupakan partai-partai yang mempunyai ideologi yang sama yakni Islam, sehingga sudah merupakan identitas bagi partai PPP. Kalau pun ada

³⁵ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 59.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 59.



perbedaan di dalam tubuh PPP maka permasalahan tersebut tidak akan mengaburkan basis ideologi mereka yang sudah jelas.

Sedangkan bagi PDI identitas partai sudah merupakan persoalan intern lain yang muncul dalam tubuh PDI. Jika dikelompokkan dari kelima partai yang berfusi tersebut yakni PNI, IPKI, Partai Murba, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) maka setidaknya akan ada dua ideologi yang berbeda pada tubuh PDI yakni nasionalisme dan keagamaan yakni Kristen. Partai-partai yang bergabung dalam PDI dan berideologikan Nasionalisme adalah PNI, IPKI, dan Partai Murba. Dua partai lainnya yakni Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) menganut ideologi keagamaan (Katolik dan Kristen).³⁸ Kelima partai itu kemudian berfusi ke dalam PDI yang diresmikan pada tanggal 10 Januari 1973 maka asas dan ideologi setiap unsur “dilebur” dan secara yuridis-formal, PDI mencoba untuk merumuskan “identitas”-nya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang memiliki karakter dan kualitas demokrasi Indonesia, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, dan keadilan sosial.³⁹

Meski identitas partai telah disepakati oleh kelima partai yang ikut berfusi dalam PDI, tetapi dalam pelaksanaannya PDI masih saja “meminjam” simbol-simbol yang pernah menjadi identitas partai yang bergabung dengannya. Sebab dalam Pemilu 1987 PDI seakan-akan “menggambil alih” identitas yang dimiliki oleh PNI.⁴⁰ Misalnya PDI masih memakai simbol Bung Karno sebagai identitas partai. PDI juga menggunakan atribut-atribut yang pernah dipakai oleh PNI, partai

³⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 49-50. Baca juga Adriana Elizabet Sukamto, *op. cit.*, hlm. 70.

⁴⁰ *Ibid.*

yang paling dominan dalam PDI. Penggunaan atribut tersebut tampak dalam penggunaan simbol kepala banteng warna merah dan hitam dalam bentuk gambar di setiap kampanye pemilu.⁴¹ Kemudian pada Pemilu 1987 penggunaan gambar Soekarno pada kampanye pemilu. Berdasarkan UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985 setiap ormas dan orsospol harus berasaskan Pancasila.⁴² Bagi PDI “pengambilalihan” identitas PNI dan digunakan dalam setiap kampanye pemilu memang dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi PDI. Namun hanya merupakan keuntungan yang sesaat dan dari sisi lain terutama untuk perkembangan masa depan partai, penggunaan identitas “pinjaman” ini kurang menguntungkan bagi PDI.⁴³ Sebab selain dapat menimbulkan perasaan iri dalam setiap partai yang bergabung dalam PDI, juga dapat dicap sebagai partai sisa-sisa dari Orde Lama.⁴⁴

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 dan No. 8 tahun 1985 telah diberlakukan, tetapi PDI tetap menggunakan kebesaran dan kharismatik Bung Karno dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang telah diberlakukan oleh pemerintahan Soeharto. Secara resmi, PDI memang tidak menjadikan Bung Karno sebagai “identitas partai”, PDI juga membantah anggapan yang mengatakan bahwa dengan munculnya “demam Soekarno” dalam kampanye PDI menandakan partai ini kembali ke masa Orde Lama. Bantahan tersebut sulit diterima, karena dengan direkrutnya Megawati Soekarnoputri oleh Soerjadi sebagai juru kampanye (*vote getter*) dalam setiap kampanye pemilu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴² *Ibid.* Baca juga Adriana Elizabeth Sukanto, *op.cit.*, hlm. 69.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 72.

menunjukkan bahwa secara sengaja Soerjadi berusaha membangkitkan kembali simpati masyarakat kepada Bung Karno.⁴⁵

Menentukan “identitas partai” pada partai hasil fusi harus mempunyai kesepakatan diantara partai-partai yang berfusi dan identitas partai yang akan digunakan tidak akan menimbulkan rasa “iri hati” dari partai fusi yang lain yang bergabung dalam PDI seperti sebelumnya. Dimana PDI selalu “meminjam” simbol dan identitas partai PNI yang mendominasi fusi dalam tubuh PDI.

Selain identitas partai, masalah lain yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat adalah pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kaderisasi kepemimpinan.⁴⁶ Munculnya gejala konflik kepemimpinan sebenarnya merupakan akibat restrukturisasi politik, dimana PDI merupakan hasil gabungan dari partai-partai. Akibatnya pucuk pimpinan partai menjadi kecil dan setiap partai menghendaki adanya pemerataan pembagian kursi dalam setiap penyusunan pengurus dan kursi ketua. Kelima partai yang berfusi dalam PDI saling memiliki keinginan untuk menduduki jabatan ketua dan pengurus. Maka tidak heran jika dalam setiap penentuan Ketua Umum DPP PDI dan pengurus lainnya dalam PDI sering terjadi konflik dan biasa terjadi manuver politik. Adanya restrukturisasi politik menyebabkan partai selalu dalam posisi yang lemah. Dampaknya para tokoh politisi partai cenderung mempertahankan kedudukannya dalam partai maupun dalam kursi DPR.⁴⁷ Sikap para politisi yang mempunyai

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁶ Harsono Suwardi, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 100. Lihat juga Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 52.

⁴⁷ *Ibid.*

kecenderungan mempertahankan kedudukannya menyebabkan terjadinya konflik dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin partai.

B. Peranan Megawati Soekarnoputri Dalam PDI Tahun 1987-1993

Dalam PDI, Megawati merupakan orang yang tergolong baru dan sebagai orang baru, karier politik Megawati perkembangannya tergolong cukup pesat. Peran Megawati dalam PDI berawal dari bergabungnya Mega dalam partai tersebut atas ajakan Soerjadi. Megawati menyadari bergabung maupun memihak pada salah satu partai merupakan suatu kesalahan karena itu berarti Mega telah melanggar konsensus yang telah ditandatangani bersama beberapa putra-putri Bung Karno pada tahun 1982. Akan tetapi Megawati tetap menerima ajakan Soerjadi untuk bergabung dalam PDI dan berkarier dalam dunia politik nasional. Soerjadi merupakan Ketua Umum DPP PDI saat itu dan merupakan ketua pilihan pemerintah, dalam artian bahwa terpilihnya Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI merupakan hasil dari keputusan dan campur tangan pemerintah dalam Kongres III PDI 15-17 April 1986 di Pondok Gede, Jakarta.⁴⁸

Setelah bergabung dengan PDI, Megawati menjadi juru bicara PDI dalam kampanye pemilu. Dalam kampanye tersebut Megawati berhasil menarik massa pendukung PDI dan dapat meningkatkan perolehan suara PDI dalam pemilu dan parlemen. Keberhasilan Megawati memerankan peranannya sebagai *vote getter*, memberikan keuntungan bagi PDI karena mengalami peningkatan perolehan suara

⁴⁸ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 63.

dalam pemilu 1987. Hal itu semakin diharapkan oleh PDI bahwa PDI akan selalu mengalami peningkatan perolehan suara setiap kali dalam pemilu. Keberuntungan tidak hanya berpihak bagi PDI, tetapi juga bagi Megawati, karena dengan keberhasilan yang ia berikan bagi PDI maka peranannya dalam PDI semakin diharapkan oleh massa pendukungnya. Karier politik Megawati pun semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, baik di dalam partai maupun dalam parlemen.

Peranan Megawati dalam PDI dapat dibilang cukup besar dan berjasa bagi PDI, terutama saat Mega menjadi juru kampanye bagi PDI pada Pemilu 1987.⁴⁹ Munculnya Mega di panggung politik merupakan strategi jitu yang dilakukan oleh duet Soerjadi dan Nico Daryanto sebagai upaya mendongkrak perolehan suara yang diperoleh oleh PDI dalam Pemilu 1987.⁵⁰ Sebagai juru kampanye kehadiran Megawati di atas panggung kampanye selalu dinantikan oleh banyak massa PDI. Terutama massa PDI yang sangat erat dengan kenangan Bung Karno, karena sebagian besar massa pendukung PDI memang merupakan bekas pendukung PNI yang berjaya pada masa pemerintahan Bung Karno. Kehadirannya di tengah-tengah massa PDI telah membangkitkan kembali ingatan banyak orang terhadap sosok karismatik Bung Karno.⁵¹

Keberhasilan Mega menarik massa pendukung PDI membuat nama Mega semakin terlihat dalam PDI. Karier dan peranannya pun semakin meningkat, ia

⁴⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 12.

⁵⁰ *Ibid.* Baca juga Putut Trihusodo & Linda Djalil, "Mencari Bayang-Bayang Bung Karno", dalam *Tempo* No. 42 Tahun XXIII, Edisi 18 Desember 1993, hlm.

⁵¹ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 11. Baca juga Luqman. A., *op. cit.* "PDI Sang Bima Masa Depan", dalam *Tempo* No. 47 Tahun XXIII, Edisi 17 Januari 1987, hlm.14

menjadi Ketua DPC PDI Jakarta Pusat pada tahun yang sama (1987). Megawati kembali memberikan gebrakan bagi PDI, yakni dengan kesuksesannya menjadi juru kampanye pada Pemilu 1992. Pada pemilu tersebut perolehan suara PDI semakin meningkat daripada pemilu sebelumnya. Perolehan kursi PDI dalam parlemen pada tahun 1987 adalah 40 kursi. Sedangkan pada Pemilu 1992 perolehan kursi semakin meningkat menjadi 56 kursi dalam DPR.⁵² Karier Megawati semakin meningkat pesat karena kemudian Megawati dan suaminya dimunculkan sebagai calon anggota DPR. Mega akhirnya terpilih sebagai anggota DPR bersama dengan suaminya, Taufik Kiemas. Dalam DPR Megawati mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah, sedangkan Taufik Kiemas mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan.⁵³

Munculnya Megawati telah membuka kesempatan dan peluang besar bagi PDI untuk mendongkrak perolehan suara pemilih dan menambah jumlah kursi dalam parlemen. Sosok Megawati yang keibuan dan berkarisma membuat dirinya selalu ditunggu-tunggu oleh para pendukung PDI dalam setiap kampanye Pemilu PDI. Terutama mereka yang sangat erat akan kenangan Bung Karno yang merupakan bekas pendukung PNI pada masa Bung Karno. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam setiap kampanye pemilu telah mengingatkan ingatan banyak orang terhadap sosok karismatik ayahnya tersebut.⁵⁴ Oleh karena itu kehadirannya dianggap telah mengembalikan perasaan dan sikap nostalgik simpatisan dan para pendukung Bung Karno. Sikap para simpatisan dan pendukung Soekarno yang

⁵² Mohammad Thoyibi, hlm. 15.

⁵³ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 12.

⁵⁴ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hal. 11.

seperti itulah yang diharapkan oleh Soerjadi selaku Ketua Umum DPP PDI. Pada saat ia merekrut anak-anak dari Bung Karno, pada awalnya Soerjadi ingin merekrut Guntur Soekarnoputra yang memang merupakan anak Bung Karno yang paling luas pengetahuannya tentang politik. Akan tetapi Guntur menolak tawaran Soerjadi, namun seperti dalam kata pepatah “tiada rotan akar pun jadi”. Meski gagal merekrut Guntur untuk bergabung dalam PDI, Soerjadi justru berhasil merekrut dua anak Bung Karno yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh. Dalam PDI, Megawati dan Guruh pada awalnya dijadikan sebagai juru kampanye pemilu.

Bergabungnya Megawati dalam politik PDI merupakan awal dari peranannya sebagai politisi. Peranan Megawati pada saat itu memang sebagai juru kampanye. Namun peranan Megawati tidak hanya sebagai juru kampanye saja tetapi sebagai putri Bung Karno Megawati pun dianggap sebagai simbol kebangkitan Soekarnoisme. Peranan Megawati juga disebut sebagai simbol kebangkitan Soekarnoisme, karena kehadiran Megawati dalam PDI merupakan siasat dari Soerjadi untuk mendongkrak perolehan suara dalam PDI dengan alasan karena Megawati merupakan anak Bung Karno dan sebagian besar pendukung PDI adalah bekas pendukung Bung Karno.

Keberhasilan Mega dalam berkarier di kehidupan politik tidak dapat lepas dari kebesaran Bung Karno sebagai proklamator bangsa dan presiden pertama Republik Indonesia yang sekaligus pendiri serta pemimpin PNI yang mempunyai kharisma. Meski sudah meninggal kharisma Bung Karno tampaknya tidak terkubur bersama jasadnya. Kharisma itu hadir secara simbolik dalam diri Megawati. Faktor nama besar Bung Karno mempunyai pengaruh dan membawa Megawati semakin tinggi peranannya dalam PDI. Keberhasilan Mega juga karena

peranan dari arus bawah dan sesama rekan dalam PDI yang menganggap bahwa Megawati merupakan tokoh yang paling mampu menjadi pemersatu dan perekat PDI di tengah-tengah konflik yang berkepanjangan.⁵⁵ Pada awal Megawati terjun dalam dunia politik Megawati memang belum menemukan jati dirinya sebagai seorang politisi kecuali adanya kenyataan yang tidak dapat diubah yakni Megawati adalah orang yang sangat efektif untuk menjadi alat penarik massa karena status sebagai putri seorang Soekarno.

Dalam dunia politik dan dalam setiap kongres pada mulanya Mega bukanlah orang yang terdengar kritis merespon berbagai kebijakan penguasa dan tidak menonjol dalam memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Keluguan dan kepolosan Megawati sangat tampak ketika ia mengikuti pekan orientasi bagi anggota DPR/MPR di Kartika Candra Senayan. Ia pun tidak mengungkapkan visi dan misinya maupun pandangan kritisnya yang dikemukakan sebagai orang yang akan mengemban amanah rakyat.⁵⁶ Bahkan banyak pengamat politik meragukan kemampuan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Segi keintelektualannya pun dianggap lemah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan kecerdasannya.⁵⁷ Mungkin disitulah letak daya tarik dalam diri Mega, diam, tidak banyak berhubungan dengan konflik intern yang sering terjadi dalam partai serta mempunyai daya tarik pribadi dan kharisma yang ia turuni dari orang tuanya.

⁵⁵ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 29.

⁵⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 13.

⁵⁷ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 24.

Dalam KLB nama Megawati muncul dalam daftar nama calon kandidat Ketua Umum PDI. Kemunculan Megawati dalam KLB sangat mengejutkan para kandidat yang lain dan juga pemerintah sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk menjegal pencalonan Mega sebagai kandidat calon Ketua Umum partai. Atas peranan pendukung-pendukungnya yang bertekad mencalonkannya sebagai Ketua Umum PDI, Mega terus melangkah maju. Dalam KLB yang tersendat-sendat bahkan terjadi konflik saat memutuskan sistem pemilihan Ketua Umum yang digunakan. Konflik tersebut membuat tertundanya pemilihan Ketua Umum partai, karena secara *voting* sudah pasti Megawati yang akan terpilih sebagai pemimpin partai. Sedangkan DPP *Caretaker* menginginkan lain. Mega pun menyatakan dirinya sebagai pemimpin PDI yang baru periode 1993-1998 sebelum batas waktu ijin kongres habis. Namun meski oleh *Caretaker* DPP PDI Latief Pudjosakti KLB dianggap gagal atau "*dead lock*" sehingga kepemimpinan Megawati dalam PDI dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh pemerintah. Meskipun demikian secara *de facto* kepemimpinan Mega disambut oleh gemuruh luapan kegembiraan para pendukungnya. Maka Megawati memulai kariernya sebagai Ketua Umum PDI karena ia yakin bahwa kepemimpinannya dalam PDI mendapat dukungan dari golongan arus bawah.

Megawati tidak tinggal diam, ia terus mewujudkan keinginan warga PDI dengan terus memimpin partai meski dalam perjalanannya sebagai pemimpin partai Megawati terus dihantam oleh berbagai konflik politik dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa minggu setelah dilaksanakannya KLB yang dinyatakan "*dead lock*" oleh *Caretaker* DPP PDI Latief Pudjosakti, kemudian diadakan Munas PDI di Jakarta dengan tujuan untuk memilih pemimpin

PDI. Pada akhirnya melalui Munas PDI di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1993 tersebut telah berhasil memilih Mega sebagai Ketua Umum PDI secara aklamasi dengan mulus tanpa ada konflik.⁵⁸ Munas menyetujui Megawati menjadi pemimpin PDI dan menjalankan peranannya sebagai ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.⁵⁹ Perannya dalam PDI pada saat ia menjadi kandidat calon Ketua Umum PDI peranan Megawati adalah sebagai simbol kekuatan arus bawah. Di sini Megawati mulai tampil sebagai politisi yang sesungguhnya, sebab peranannya yang sebelumnya Megawati merupakan alat bagi Soerjadi sampai akhirnya Megawati menyadari kemampuannya sebagai pemimpin.

Sebagai politisi peranan Megawati semakin tampak nyata dalam PDI. Megawati berperan sebagai simbol korban penindasan rezim yang berkuasa (pemerintah). Dalam Kongres Medan 1996 Megawati mengalami masa-masa sulit, sebab posisinya sebagai Ketua Umum PDI telah mengusik ketenangan kelompok lain yang tidak menginginkan Megawati mengetuai partai tersebut. Hal tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan.

Mega juga berperan sebagai simbol perlawanan publik, ketika ketidakadilan dan kekerasan terjadi pada 27 Juli 1996 mengakibatkan jatuhnya korban dari kubu Megawati ketidakadilan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kubunya. Dalam peristiwa tersebut yakni Tragedi 27 Juli 1996 kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang saat itu dikuasai oleh PDI pimpinan Megawati di serang secara membabi buta oleh para pendukung Kongres IV PDI di Medan pada

⁵⁸ Putut Trihusodo, dkk. "Lakon Megawati dalam Partai", dalam *Tempo* No.43 Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993, hlm. 14-16.

⁵⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 20.

tahun 1996. Bukan keadilan yang diperoleh oleh para pendukung Megawati tetapi justru dakwaan sebagai pelaku kekerasan dalam tragedi tersebut. Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sangat dirasakan oleh Megawati, karena dalam situasi seburuk apapun ia harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan meredakan amarah massa pendukungnya yang semakin tak terkendali. Perlawanan yang dilakukan oleh Megawati adalah dengan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam Kongres Medan dan tragedi 27 Juli 1996 melalui jalur pengadilan. Mega juga mengambil keputusan Golput yang dianggap sebagai kudeta oleh para pendukungnya. Ia juga menolak pertanggungjawaban dan pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Atas sikapnya tersebut Megawati merupakan simbol perlawanan publik terhadap rezim penguasa di sela-sela peranannya sebagai pemimpin partai.

Sampai pada akhirnya Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B. J. Habibie. Saat pemerintahan B. J. Habibie, PDI pimpinan Megawati memperoleh ijin untuk menyelenggarakan Kongres PDI di Bali yang kemudian membawa PDI-Perjuangan menuju Pemilihan Umum 1999 dan memperoleh kemenangan. Nama Megawati bagaikan meteor, diberbagai daerah ia dielu-elukan oleh para pendukungnya. Peranan Megawati disini adalah sebagai simbol kedatangan Ratu Adil. Jadi, secara umum peranan Megawati dalam PDI adalah sebagai pemimpin PDI (sekarang = PDI-Perjuangan) yang terpilih karena karisma yang terdapat dalam dirinya yang kemudian mulai muncul peranan lain sebagai simbol-simbol.

C. Megawati Soekarnoputri Dalam KLB PDI di Surabaya Tahun 1993

Kondisi kelahiran Megawati seakan-akan memberikan isyarat akan kehidupan Megawati baik kehidupan pribadinya maupun perjalanan karier politiknya. Mega memang sudah terjun dalam kehidupan politik pada tahun 1986 tetapi ia mengawali karier politiknya pada tahun 1987. Tahun 1987 karier politik Megawati semakin meningkat dan terus mendapatkan pendukung massa, terutama dukungan dari arus bawah. Pendukung arus bawah ini sangat berjasa terhadap melonjaknya karier politik Megawati. Faktor Bung Karno dan sifatnya pendiam dan keibuan dapat membuat warga PDI beranggapan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin.

Kongres PDI 1993 di Medan yang mengalami "dead lock" karena konflik politik internal antara kubu Soerjadi dengan kubu Alex Asmasoebrata, kemudian beberapa tokoh PDI memunculkan Megawati sebagai tokoh alternatif calon kuat Ketua Umum PDI. 100 orang fungsionaris dari 70 DPC PDI yang ada di seluruh Indonesia mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri pada 11 September 1993 dipimpin oleh Paiman Silalahi wakil dari ketua DPC Simalungun Sumantera Utara dengan tujuan meminta Megawati agar tampil untuk memimpin PDI.⁶⁰ Rumah Megawati yang terletak di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan menjadi hingar bingar. Para fungsionaris itu datang untuk menyampaikan keinginan hati nurani mereka dalam upaya untuk mengatasi kemelut yang terjadi dalam tubuh internal PDI.

⁶⁰ Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 56. Baca Juga Megawati Soekarnoputri, *Bendera Telah Saya Kibarkan: Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 11-15

Megawati menerima dan mendengarkan setiap apa yang mereka sampaikan secara bergantian. Dengan kesabaran dan penuh rasa keibuan Mega menyimak yang diinginkan para fungsionaris serta para pemimpin DPC yang sebagian datang dari pedalaman Sumatera, Kalimantan, maupun Jawa baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka meminta kepada Megawati agar mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PDI dalam KLB di Surabaya pada tanggal 2-6 Desember 1993. Bagi mereka Megawati merupakan orang yang dapat menyelamatkan PDI dari kehancuran akibat konflik intern yang berkepanjangan.⁶¹

Banyaknya para pendukung dari berbagai DPC PDI di seluruh Indonesia yang datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa Megawati mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari para pendukungnya. Meskipun telah beberapa kali menolak untuk dicalonkan sebagai pemimpin PDI, namun pada akhirnya Megawati menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Kesiadaan Mega untuk dicalonkan menjadi ketua umum karena ia merasa terpanggil untuk memenuhi keinginan pendukung-pendukungnya. Selain itu menurut para tokoh lain dalam PDI yang menginginkan Megawati sebagai pemimpin bahwa sudah saatnya bagi Mega untuk memimpin PDI, partai yang sering dijuluki dengan sebutan “partai gurem” dengan misi politik yang selalu berjuang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

⁶¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 16. Bandingkan dengan Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 18.

Sikap keterbukaan politik Megawati membawa Mega pada tingkat popularitas, namanya pun melejit bagaikan meteor.⁶²

Megawati kemudian mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon ketua umum partai dan bersiap menghadapi para pesaing yang sudah lebih berpengalaman dalam hal berpolitik. Upaya yang dilakukan Megawati dalam mempersiapkan diri salah satunya adalah dengan membentuk Tim Sukses. Tujuan dibentuknya Tim Sukses ini untuk memudahkan perjalanannya dalam arena KLB menuju puncak pimpinan. Dalam Tim Sukses tersebut diantara anggotanya terdapat nama Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri sendiri, Aberson Marle Sihalohe, Panda Nababan, Mangara Siahaan, Suparlan dan Sophan Sophian.⁶³

Antara Megawati dan Bung Karno terdapat perbedaan yang sangat menyolok, meskipun dalam beberapa hal ada persamaannya pula. Salah satu kesamaan antara Megawati dan Bung Karno adalah keduanya sama-sama telah mendapatkan tempat di mata masyarakat meskipun Bung Karno sudah lama meninggal. Ajaran-ajaran Bung Karno masih tetap menjadi ingatan kolektif masyarakat dan menjadi pelajaran serta renungan baik dari kalangan intelektual, pemuda dan masyarakat.⁶⁴ Sedangkan perbedaan yang menyolok antara Megawati dan Bung Karno terutama tampak dalam hal kepribadiannya. Bung Karno merupakan *public figure* yang lebih terbuka dan senang berdebat terutama dengan pers. Bung Karno merupakan sosok *public opinion maker* yang dengan piawai dan

⁶² Budiman S. Hartoyo, dkk. "Apa Dibalik Mega", dalam *Tempo* No. 41 Tahun XXIII, Edisi 11 Desember 1993, hlm. 34.. Lihat juga Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 57.

⁶³ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 16.

⁶⁴ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 39-40.

cepat membuat berita dan membangun opini politik. Sedangkan Megawati dalam hal ini sangat berbeda dengan Bung Karno, sebab Megawati merupakan sosok pribadi yang cenderung “tertutup” terhadap pers.⁶⁵ Mega lebih banyak memilih diam daripada berdebat dengan pers. Padahal jika terjun dalam dunia politik melakukan suatu publikasi sangatlah penting untuk mendapatkan dukungan yang maksimal terutama bagi Megawati yang tergolong orang baru dalam kehidupan politik yang sarat dengan konflik dan persaingan yang didasari oleh kepentingan individu.

Dengan dibentuknya Tim Sukses merupakan keberuntungan bagi Megawati, karena pentingnya publikasi di dunia politik tampaknya disadari betul oleh Tim Suksesnya. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Megawati dari seorang ibu rumah tangga yang pendiam dan dapat dibilang sangat sepi publikasi menjadi seorang *public figure* yang mempunyai nilai berita yang tinggi dapat melekat di mata dan di hati setiap masyarakat pendukungnya.⁶⁶

Megawati semakin mantap melangkah menuju kursi pemimpin partai. Ia tampil dengan penuh percaya diri sebagai *figure* pemimpin politik dan siap menyingkirkan para pesaing politiknya. Perjalanannya menuju puncak keberhasilan untuk menjadi pemimpin politik Megawati mempunyai dua modal utama yakni kecakapan memimpin dan populer.⁶⁷ Pertama, Kecakapan Memimpin. Kecakapan memimpin ini berkaitan dengan kapasitas individual dan keberanian Mega menunjukkan bahwa dirinya siap terjun dalam dunia politik

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁶⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 16.

⁶⁷ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 27.

praktis dan berusaha sesuai dengan kapasitas individunya sebagai fasilitator, agrigator dan motivator dari segala aspirasi masyarakat. Kedua, Popularitas. Dalam hal popularitas tidak dapat diragukan lagi bahwa kepopuleritasan Megawati karena kuatnya fanatisme para pendukung Soekarno yang memandang Mega sebagai keturunan Soekarno.⁶⁸

Nama Megawati melejit begitu jauh menjadi calon Ketua Umum PDI dibandingkan dengan calon-calon lainnya dengan semakin kuatnya dukungan yang diberikan kepada Megawati. Dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri semakin kuat, maka pihak-pihak yang ingin menggagalkan langkah Mega dalam pencalonan juga semakin besar baik dari intern PDI maupun pemerintah secara terus menerus. Bahkan keikutsertaan Megawati dalam pencalonan Ketua Umum DPP PDI diisukan sebagai bangkitnya kembali Soekarnoisme.⁶⁹ Oleh pemerintah orde baru, sistem politik pada masa Soekarno dijadikan sebagai pengalaman buruk dan selalu dianggap berkonotasi negatif. Padahal dipahami benar, Soekarnoisme merupakan akumulasi pemikiran yang tidak selalu bernada sinis, karena kristalisasi dari nilai-nilai pemikiran-pemikiran Bung Karno hingga melahirkan Pancasila yang kemudian menjadi jiwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menjadi ideologi Negara sampai sekarang.⁷⁰ Soekarno juga mengembalikan Undang-Undang 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 guna menghindari terjadinya perpecahan nasional.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasrullah, *op. cit.*, hlm. 58.

⁷⁰ *Ibid.* Baca juga Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 16.

⁷¹ *Ibid.*

Isu bangkitnya Soekarnoisme dijawab oleh Megawati bahwa puncak dari segala puncak ajaran Bung Karno adalah Pancasila. Megawati juga mengatakan: “Kalau berbicara mengenai Soekarnoisme, itu semua menurut saya mesti berpulang pada bangsa Indonesia sendiri untuk menjawab siapa sebenarnya Bung Karno?. Kalau menurut pandirian pemerintah yang resmi, Bung Karno diberi predikat proklamator yang juga sebagai pahlawan kemerdekaan. Maka apabila mau jujur dan terbuka melihat sejarah pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengatakan bahwa falsafah kita adalah Pancasila. Untuk itu jika berbicara mengenai Pancasila seharusnya ingat dengan orang yang bernama Bung Karno. Jadi Pancasila yang harus dijadikan sebagai pegangan, serta dihayati dan diamalkan secara murni dan konsekuen. Apabila merasa takut mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen maka sangatlah logis kalau kuatir terhadapnya.⁷²

Dengan jawaban Mega atas apa yang ditakutkan masyarakat tentang Soekarnoisme menghilangkan penilaian stereotif yang negatif terhadap segala pemikiran Bung Karno yang berkembang dalam masyarakat setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa. Langkah Megawati semakin dekat dengan hari pelaksanaan KLB pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Surabaya. Isu Soekarnoisme telah mereda, tetapi masih saja langkah Megawati dihalang-halangi dengan tujuan agar Megawati tidak pernah sampai pada ruang diselenggarakannya KLB PDI. Berbagai rintangan terus menghadang langkah Megawati. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengganjal obsesi Mega dan para pendukungnya untuk

⁷² Putut Trihusodo & Ardian Taufik Gesuri, “Nama Besar Dibalik Megawati”, dalam *Tempo* No. 40 Tahun XXIII, Edisi 4 Desember 1993, hlm. 35.

tampil dalam jajaran puncak PDI menjadi pesaing Budi Hardjono yang merupakan calon dari pemerintah.⁷³ Para pendukung pencalonan Megawati untuk menjadi pemimpin PDI dialihkan agar tidak memilih Mega tetapi akan memilih Budi Hardjono, selaku calon pemerintah dengan cara membatasi orang-orang pro Mega hadir dalam KLB.

Hambatan tidak hanya datang dari pihak pemerintah. Hambatan juga berasal dari lingkungan internal PDI, Mega tidak diberikan mandat untuk mengikuti Kongres oleh DPP PDI DKI Jakarta. Alasan tidak diberikannya mandat terhadap Megawati karena Mega ber-KTP-kan Jakarta Pusat dan tidak sesuai dengan domisili atau tempat tinggal Mega di Jakarta Selatan. Mega juga merupakan utusan dari Jakarta Selatan.⁷⁴ Selain itu karena surat mandat belum ditandatangani oleh Ketua DPP PDI DKI Jakarta, Alex Asmasubrata. Ternyata ketidaksediaan Alex untuk menandatangani mandat bagi Mega karena Megawati selaku Ketua sekaligus Wakil DPC PDI Jakarta Selatan tetapi KTP yang dimilikinya merupakan KTP wilayah Jakarta Pusat.⁷⁵ Dihadangnya jalan Megawati memasuki ruang tempat diselenggarakannya sidang KLB PDI membuat kepanikan dan suasana menjadi sangat menegangkan karena tanpa adanya mandat yang telah disahkan dengan ditandatangani oleh Alex Asmasubrata maka kesempatannya sebagai peserta KLB dianggap hilang.⁷⁶ Kehadiran Megawati di KLB akan langsung di tolak oleh *Caretaker* PDI pimpinan Latief Pudjosakti

⁷³ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 17.

⁷⁴ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 95. Baca juga Sumarno, *op. cit.*, hlm. 17.

⁷⁵ Oka Kusumayudha, *op.cit.*, hlm. 22. Baca juga Putut Tri Husodo, dkk. "Mega Menang, Mega Dijegal", dalam *Tempo* No. 41 Tahun XXIII, Edisi 11 Desember 1993, hlm. 32.

⁷⁶ *Ibid.*

selaku penyelenggara KLB.⁷⁷ Kemudian setelah melalui berbagai rintangan dan dialog yang cukup panjang Megawati berhasil memperoleh mandat dan dapat memasuki ruang persidangan tempat terselenggaranya KLB.⁷⁸

Dalam KLB Megawati berhadapan langsung dengan para pesaingnya yang cukup kuat dan berpengalaman, karena pesaing-pesaingnya merupakan calon yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, juga merupakan orang yang sudah cukup lama terjun dalam politik nasional. Para calon kandidat yang menjadi pesaing Megawati dalam KLB yang memperebutkan posisi sebagai Ketua Umum DPP PDI adalah Budi Hardjono, merupakan calon yang mendapat dukungan dari pemerintah. Calon lainnya adalah Ismunandar dan Soetardjo Soejogoeritno. Mereka berdua merupakan calon yang tidak terlalu diperhitungkan dalam KLB PDI. Sedangkan kandidat lainnya yakni Aberson Marlesihaloho lebih memilih untuk mundur dan menyatakan mendukung langkah Mega untuk maju sebagai kandidat.⁷⁹

Tanggal 2 Desember 1993 merupakan hari pertama dilaksanakannya sidang KLB PDI di Surabaya. Pada hari pertama ini Sidang sudah tidak berjalan dengan mulus, karena terjadi keriuhan dalam sidang. Keriuhan sudah mulai muncul pada Sidang Pleno I, para peserta Sidang beranggapan bahwa Edwin Soekowati tidak memimpin Sidang Pleno secara demokratis. Edwin dinilai tidak memperhatikan aspirasi yang mereka ajukan, karena masalah tersebut maka Sidang Pleno I menjadi sangat sensitif dan menimbulkan konflik. Hal ini

⁷⁷ *Ibid.* Baca juga Sumarno, *op. cit.*, hlm. 17.

⁷⁸ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 22.

⁷⁹ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 96.

disebabkan karena agendan Sidang Pleno I memang sangat sensitif yakni tentang pencabutan SK 121/1986 yang berisi tentang pemecatan terhadap delapan orang anggota Kelompok 17. Pencabutan SK 121/1986 tersebut pada akhirnya disahkan meski datang banyak protes dari sejumlah peserta.⁸⁰ Masih pada hari pertama KLB, Sidang Pleno II kembali dipenuhi oleh adanya kericuhan. Sidang Pleno II ini tidak lagi dipimpin oleh Edwin Soekowati tetapi oleh Latief Pudjosakti. Agenda pada Sidang Pleno II ini adalah untuk membahas tata cara pemilihan Ketua Umum. Upaya menentukan tata cara pemilihan Ketua Umum ini juga mengalami kericuhan, karena sebelumnya peserta kongres telah terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Satu kelompok menghendaki pemilihan dilakukan dengan system voting atau langsung yakni berdasarkan perolehan suara terbanyak. Sedangkan satu kelompok lainnya yakni para *Caretaker* pimpinan Latief Pudjosakti yang menghendaki pemilihan ketua umum menggunakan sistem formatur.⁸¹

Sistem voting merupakan cara pemilihan yang dikehendaki oleh para pendukung Megawati Soekarnoputri yang terdiri dari para tokoh DPC. Mereka sangat yakin dengan voting Mega akan terpilih menjadi pemimpin partai sekitar 84% peserta KLB memberikan dukungan kepada Mega. Latief Pudjosakti menyadari jika menggunakan system voting, maka Mega yang akan menang dan terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI untuk periode 1993-1998. Untuk itu sebagai pelaksana KLB, *Caretaker* DPP PDI tersebut terus memaksakan agar

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*. Baca juga Putut Trihusodo, *op. cit*, hlm. 30-32.

pemilihan dilakukan dengan sistem formatur maka Budi Hardjono yang merupakan calon dari pemerintah akan terpilih dan berhasil menduduki posisi Ketua Umum PDI.⁸²

Upaya Latief untuk memaksakan penggunaan sistem formatur sebagai tata cara pemilihan Ketua Umum DPP PDI ditentang keras oleh mayoritas peserta Kongres yang sebagian besar merupakan pendukung kepemimpinan Megawati.⁸³ Akhirnya Sidang Pleno II juga tidak pernah dicapai kesepakatan tentang tata cara yang akan dipakai sebagai sistem dalam pemilihan. Kemudian oleh Latief sidang diskors karena tidak memperoleh keputusan apapun.⁸⁴ Untuk menghindari kemelut sidang dan berbagai kemungkinan yang dinilai dapat membahayakan diri Latief Pudjosakti dan DPP Caretaker memutuskan meninggalkan ruang sidang (KLB). Sedangkan Megawati dan para pendukungnya tetap bertahan dalam ruang sidang menunggu sampai jadwal sidang berakhir.⁸⁵

Pada KLB hari kedua KLB, tanggal 3 Desember 1993 kembali memperdebatkan tentang tata cara apa yang akan digunakan dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI. Sidang yang dimulai pada pukul 08.00 WIB diskors oleh panitia setelah berlangsung selama kurang lebih dua jam. Kemudian akan dilanjutkan lagi setelah shalat Jum'at, tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata sidang tidak dilanjutkan sampai malam hari.⁸⁶ Sidang kembali tertunda dan belum menghasilkan keputusan apapun, bahkan semakin memperkeruh suasana sidang.

⁸² *Ibid.* Baca juga Sumarno, *op. cit.*, hlm. 18.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 96.

⁸⁵ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 24.

⁸⁶ *Ibid.*

Sidang kembali digelar pada hari berikutnya 4 Desember 1993 yang merupakan hari ketiga Sidang KLB. Dalam sidang tersebut Latief Pudjosakti kembali memimpin jalannya sidang. Sidang pada hari itu dimulai pada pukul 08.30 WIB. Namun pada hari ketiga pun peserta sidang masih memperdebatkan tentang tata cara pemilihan. Sebagai pemimpin sidang Latief Pudjosakti tetap bertahan dengan sistem formatur sebagai tata cara yang akan digunakan dalam pemilihan ketua umum. Sedangkan sebagian peserta tetap menghendaki pemilihan pemimpin partai diambil dengan cara voting.⁸⁷ Adanya perbedaan pendapat yang selalu muncul dalam sidang mengakibatkan munculnya kericuhan antar peserta KLB. Hal tersebut bukan tidak disadari oleh Mega dan para pendukungnya, tetapi mereka sangat menyadari mengapa DPP Caretaker memaksakan pemilihan pemimpin partai dengan sistem formatur, karena menghendaki Mega tersingkir dari langkahnya menuju puncak pimpinan partai. Sebab jika pemilihan dilakukan dengan cara sistem voting dilakukan maka sudah dapat dipastikan pemilihan dengan tata cara tersebut akan memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin PDI secara aklamasi.⁸⁸

Akhirnya DPP Caretaker dan peserta lainnya termasuk pendukung-pendukung Megawati dalam KLB tersebut mengambil kesepakatan dengan menyerahkan masalah sistem pemilihan Ketua Umum PDI akan diputuskan oleh Komisi Organisasi.⁸⁹ Selain dicapai kata sepakat dengan menyerahkan masalah sistem pemilihan kepada Komisi Organisasi, sidang pada hari ketiga tersebut juga

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Mukhlisin dan Damarhuda, *Ratu Adil dan Perjalanan Spiritual Megawati*, Yayasan Penerbit Purbakala, Bali 1999, hlm. 180.

⁸⁹ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 97. Baca juga Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 25.

dimanfaatkan untuk menyampaikan pandangan umum. Masing-masing pihak utusan daerah diberi kesempatan untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka dengan dipimpin oleh Sutardjo Soerjogoritno dan dalam pandangan umum tersebut dukungan terhadap kepemimpinan Mega semakin besar. Dari sekitar 305 DPC yang ada, 256 DPC menyatakan dukungannya terhadap Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Budi Hardjono hanya mendapat dukungan dari 33 DPC dan 13 DPC lainnya mendukung Soetardjo Soejogoritno.⁹⁰

Tanggal 5 Desember 1993 sidang kembali dilanjutkan. Pada sidang hari keempat ini masalah pengambilan keputusan perihal cara pemilihan ketua umum diserahkan kepada Komisi Organisasi. Dalam hal ini Komisi Organisasi bertanggung jawab untuk memutuskan cara yang akan digunakan dalam pemilihan ketua umum. Apakah akan menggunakan *sistem formatur* ataukah *sistem votting*. Ternyata pada sidang hari keempatpun mengalami keributan. Penetapan personel Komisi Organisasi diliputi oleh pertarungan kepentingan diantara kelompok-kelompok yang ikut serta dalam KLB. Bahkan dalam sidang tersebut terjadi baku hantam antar peserta KLB.⁹¹

Masalah juga timbul pada saat penetapan Ketua Sidang Komisi Organisasi. *Caretaker* yang merasa sebagai pelaksana KLB memaksakan Latief Pudjosakti sebagai ketua sidang tetapi ditolak keras oleh para peserta kongres.⁹² Terutama para peserta pendukung Megawati, sebab mereka tahu Latief akan berupaya menghentikan langkah Megawati untuk mencapai kursi kepemimpinan

⁹⁰ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 97.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 98.

⁹² *Ibid.*

PDI. Akhirnya ditetapkan Sardjito Dharsoeki sebagai Ketua Sidang Komisi Organisasi. Setelah Ketua Sidang ditetapkan sidang tetap berjalan dengan alot penuh dengan perselisihan antara peserta dengan *Caretaker*, bahkan sampai jadwal sidang pada hari itu telah selesai tidak ada satu kesepakatan pun yang diperoleh mengenai tata cara yang akan digunakan dalam pemilihan.⁹³ Padahal pemecahan masalah tersebut telah diserahkan kepada Komisi Organisasi.

Sidang tiba pada hari kelima, tanggal 6 Desember 1993. Sidang hari tersebut merupakan hari terakhir ijin diselenggarakannya sidang KLB. Namun pada hari terakhir sidang justru tidak ada sidang bahkan tidak ada satupun anggota *Caretaker* yang muncul di ruang tempat diselenggarakannya KLB. Hal tersebut membuat nasib KLB menjadi tidak jelas.⁹⁴

Dalam situasi yang sangat tidak menentu itu dan atas persetujuan peserta KLB, seluruh DPD PDI mengadakan rapat khusus. Rapat tersebut diikuti oleh 27 DPD PDI dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, mendukung Mega sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998. Kedua, menjadikan ketua DPD sebagai formatur yang akan menentukan susunan DPP. Ketiga, tidak akan menyerahkan penyelesaian kongres kepada pemerintah, dan mengupayakan Budi Hardjono masuk kepengurusan DPP PDI. Keempat, memberikan waktu sampai pukul 20.00 WIB kepada *Caretaker* untuk melaksanakan Sidang Paripurna. Sebab jika tidak, maka cabang-cabang PDI seluruh Indonesia akan mengambil alih KLB.⁹⁵ Rapat khusus yang diikuti oleh 27 DPD PDI akhirnya mencapai beberapa

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 180.

⁹⁵ *Ibid.* Baca juga Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 98.

keputusan, namun keadaan kongres masih belum menentu bahkan sampai mendekati batas akhir ijin kongres pukul 24.00 WIB. Situasi kongres menjadi semakin kacau karena sebelumnya telah disepakati pelaksanaan Sidang Paripurna tetapi sidang tersebut tidak terlaksanakan sampai batas akhir ijin kongres.

Kesempatan yang sangat sempit ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Megawati. Di saat kongres sudah hampir berakhir dihadapan para pendukungnya, maka Megawati menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.⁹⁶ Secara *de facto* saya sudah menjadi Ketua Umum PDI, tetapi secara *de jure* memang belum.⁹⁷ Setelah menyatakan dirinya sebagai ketua umum PDI, Megawati menghimbau pada para pendukungnya untuk tetap tenang. Dalam kesempatan itu Mega menyampaikan harapannya kepada para pendukungnya, "Kita semua bisa menegakkan konstitusi partai yang kita cintai. Saya tidak ingin ada keributan dilakukan oleh sementara pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah saudara-saudara sanggup?!". Mega menyelesaikan kalimatnya, kemudian ia pun disambut oleh gemuruh teriakan peserta pendukung Megawati. "Sanggup!!!".⁹⁸ Sesaat kemudian datang sekitar 500 polisi dan pasukan anti huru hara membubarkan sidang KLB di Asrama Haji Sukolilo tersebut tepat pukul 24.00 WIB. Sebab waktu tersebut memang merupakan batas akhir ijin dilaksanakannya kongres dan sudah tidak dapat diperpanjang lagi.⁹⁹

Meski kongres dibubarkan secara paksa oleh pasukan anti huru hara kemenangan sudah ada di tangan Mega. Mega sudah menjadi ketua umum PDI

⁹⁶ *Ibid.* Sumarno, *op. cit.*, hlm. 18.

⁹⁷ Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 98.

⁹⁸ *Ibid.* sumarno, *op. cit.*, hlm. 18. Baca juga Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 182.

⁹⁹ *Ibid.*

meski kepemimpinannya tidak diakui oleh pemerintah secara *de jure*. Bagi para pendukungnya Mega merupakan pemimpin PDI yang sah sebagai pengganti Soerjadi dan merupakan pemimpin alternatif yang dianggap dapat membawa PDI keluar dari konflik intern.

Dalam KLB Megawati mendapatkan banyak dukungan dari DPC. Yang menjadi alasan DPC mendukung Megawati dalam KLB PDI di Surabaya karena Megawati merupakan putri dari mantan Presiden Soekarno. Megawati juga berhasil mendongkrak perolehan suara PDI dalam dua periode pemilu yakni Pemilu 1987 dan Pemilu 1992. Alasan yang lain bahwa PDI memerlukan sosok pemimpin alternatif yang dapat membawa PDI keluar dari konflik intern yang berkepanjangan, sehingga diperlukan sosok pemimpin yang tidak pernah terlibat dalam konflik serta tidak mudah terpengaruh oleh campur tangan pemerintah. Sosok tersebut tampak dan ada dalam diri Megawati Soekarnoputri. Itulah alasan-alasan mengapa DPC mendukung kepemimpinan Megawati dalam KLB PDI di Surabaya.



BAB IV

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI MAMPU MEMENANGKAN PEREBUTAN JABATAN KETUA UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1993-1999

A. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Melalui KLB PDI di Surabaya yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 Megawati berhasil menyingkirkan kandidat ketua yakni Budi Hardjono yang diduga kuat mendapatkan dukungan dan restu dari “atas”. Dalam pemilihan tersebut Mega memperoleh suara dukungan hampir 80 persen suara. Namun Mega dihadapkan pada medan pertempuran dalam Persidangan Komisi untuk melawan pesaingnya yang didukung oleh sebagian caretaker pimpinan Latief Pudjosakti terus berupaya menjegal Mega yang maju ke puncak kemenangan.¹

Suasana dalam KLB berlangsung panas dengan perdebatan dalam pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum DPP PDI. Mayoritas peserta KLB menghendaki sistem pemilihan langsung atau *votting*, tetapi DPP *Caretacer* sebagai pelaksana KLB memaksakan kehendaknya dengan sistem formatur. Sebab sudah jelas jika DPP *Caretaker* menuruti kehendak mayoritas peserta yang menginginkan pemilihan berdasarkan *votting* maka dapat dipastikan Megawati akan terpilih secara aklamasi.²

¹ Rusdi Muchtar, dkk, *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok, 2002, hlm. 26. Lihat juga Putut Trihusodo, “Mega Menang, Mega Dijega”¹, dalam *Tempo*, No. 41 Tahun XXIII Edisi 11 Desember 1993, hlm. 30-32.

² Mukhlisin dan Damarhudha, *Ratu Adil dan l’erjalanan Spiritual Megawati*, Yayasan Penerbit Purbakala, Bali, 1999, hlm. 178. dan Sumarno, *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok, 2002, hlm. 18.

Dalam KLB yang berjalan alot itu, dihadapan para pendukungnya Mega menyatakan dirinya sebagai pemimpin PDI secara *de facto*. Dengan kata lain bahwa pernyataan *de facto* Megawati yang terpilih sebagai pemimpin PDI jauh lebih “demokratis” karena dalam pemilihan tersebut dapat memakai hakekat demokrasi berdasarkan pada partisipasi. Sedangkan yang dimaksud dengan *de jure* dalam konteks KLB PDI lebih menyangkut hal legitimasi politik, yakni berkaitan dengan proses pengakuan kekuasaan atas kemenangan yang diperoleh oleh seorang kandidat calon.³

Sesudah Megawati menyatakan diri sebagai pemimpin PDI secara *de facto*, *Caretaker* DPP PDI pimpinan Latief Pudjosakti akhirnya menyerahkan urusan KLB yang dianggap *dead-lock* kepada pemerintah. Lagi-lagi pemerintah ikut campur tangan dalam masalah intern PDI, hal inilah yang membuat PDI menjadi kurang mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam tubuh PDI. Megawati yang menyatakan diri sebagai pemimpin melalui KLB tersebut dianggap gagal, dan *Caretaker* yang didukung pemerintah menilai bahwa seluruh keputusan kongres dianggap tidak sah. Demikian juga kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI juga dinyatakan tidak sah karena secara *de jure* belum atau bahkan tidak diakui oleh pemerintah.⁴

Meski KLB dianggap gagal dan kepemimpinan Megawati dianggap tidak sah, angin politik pun akhirnya mengalami perubahan karena pemerintah akhirnya menerima dan merestui kepemimpinan Megawati dalam PDI. Pengakuan

³ Cornelius Lay, dkk, *Megawati Soekarnoputri Menolak Politik Anti Nurani*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999, hlm. 15.

⁴ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 19.

pemerintah terhadap kepemimpinan Megawati dalam PDI terbukti dalam Munas PDI yang diselenggarakan pada 22 Desember 1993 yang dilaksanakan di Jakarta tidak mengalami hambatan sedikit pun. Munas yang diselenggarakan untuk pengesahan Megawati sebagai ketua partai tidak mengalami kesulitan ataupun protes sedikit pun.⁵

Munas memang berjalan dengan tertib dan lancar, tetapi bukan berarti Megawati kemudian lepas dari berbagai upaya penjegalan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sebab meski kepemimpinannya dalam PDI telah diakui oleh pemerintah melalui Munas PDI di Jakarta pada 22 Desember 1993 tetap saja ada upaya-upaya penjegalan yang mereka lakukan untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Megawati dari posisinya sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 tersebut.

Munas PDI pada tanggal 22 Desember 1993 tersebut diselenggarakan karena KLB PDI yang telah terselenggara di Surabaya pada tanggal 2-6 Desember 1993 dianggap gagal atau tidak pernah ada. Untuk itu melalui Mendagri Yogie S.M pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Tujuan diselenggarakannya Munas tersebut adalah untuk memilih pemimpin PDI dan menuntaskan kemelut intern yang ada dalam tubuh partai yakni PDI.⁶ Meski dapat dipastikan bahwa konflik intern dalam tubuh PDI tidak dapat dengan mudah diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena konflik intern yang ada dalam tubuh PDI tersebut dilandasi oleh kepentingan-kepentingan

⁵ Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 182.

⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 19.

pribadi dan sifat ambisius para tokohnya maka konflik yang terjadi didalamnya menjadi berkepanjangan bahkan tidak kunjung surut.

Maka untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat langkahnya dalam memimpin PDI sebagaimana yang terjadi dalam KLB PDI di Surabaya maka Megawati Soekarnoputri melakukan suatu rangkaian manuver politik yang cukup cerdas.⁷ Sebab manuver politik tersebut sekaligus menempati posisi ganda. Di satu sisi manuver tersebut sebagai gerakan masyarakat dan disisi lain menempati posisi sebagai partai dalam Munas PDI. Oleh karena itu dalam posisi manapun Megawati akan selalu diterima oleh MPR dan lembaga tersebut akan berhadapan dengan pemerintah dan penguasa.⁸

Serangkaian manuver politik yang dilakukan oleh Megawati antara lain dengan melakukan safari politik atau kunjungan ke sejumlah pejabat pemerintah terkait dan para pejabat tinggi ABRI. Mendagri Yogie S. M merupakan orang yang pertama ia kunjungi dalam langkah manuvernya. Kemudian Mega mengunjungi Menko Polkam Soesilo Soedarman, Kosospol ABRI Letjen Hariyoto PS, dan Pangdam Jaya Mayjen Hendro Priyono. Bahkan secara implisit Hendro menyatakan dukungannya terhadap Mega bahwa Megawati pasti menjadi Ketua Umum PDI. Sebelum Munas berlangsung Megawati juga mendapatkan undangan dari puteri sulung Pak Soeharto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbak Tutut merupakan salah seorang Ketua

⁷ *Ibid.*

⁸ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 67.

DPD Golkar. Meskipun tidak ada agenda khusus untuk pertemuan tersebut, Megawati pun memenuhi undangan tersebut.⁹

Sebenarnya dalam kancah politik nasional Indonesia pada pertengahan 1990-an dikenali tiga orang tokoh masyarakat sipil yang dapat melakukan manuver politik dengan sangat baik. Salah satu dari ketiga tokoh politik tersebut adalah Megawati Soekarnoputri. Sedangkan dua tokoh lainnya adalah Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid. Manuver politik ini dilakukan dalam upaya untuk mempengaruhi penguasa dan pemerintah yang berkenaan dua aspek politik yakni posisi kekuasaan dan kebijaksanaan politik.¹⁰ Sedangkan dalam langkah manuver politiknya PDI Megawati mendapat kemenangan politik. Kemenangan akhirnya diperoleh oleh Megawati pada saat pemilihan Ketua Umum PDI dalam Munas PDI yang berlangsung di Hotel Garden, Kemang, Jakarta Selatan yang bertepatan dengan hari Ibu 22 Desember 1993.

Dalam Munas tersebut langkah Megawati menuju tampuk pimpinan PDI tidak mendapatkan halangan sama sekali. Proses pemilihannya pun hanya berlangsung selama lima menit dan 59 DPD yang berasal dari 27 propinsi secara aklamasi semua peserta menyetujui Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Periode 1993-1998.¹¹ Dengan demikian kepemimpinan Megawati tidak hanya diakui secara *de facto* tetapi juga *de jure*, karena dalam Munas PDI Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI secara aklamasi.

⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 19-20. Baca juga Oka Kusumayudha, *Megawati Dari Istana Menuju Istana Negara, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 2001, hlm. 31. Baca juga Augs Basri & Nunik Iswardhani, "Mega dan Berbagai Tanda," dalam *Tempo* No. 43 Tahun XXIII Edisi 25 Desember 1993, hlm. 15.

¹⁰ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm.63.

¹¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 20. Baca juga Putut Trihusodo, dkk. "Lakon Megawati dalam Partai", dalam *Tempo* No. 43 Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993, hlm. 14-16.

Megawati merupakan seorang pendatang baru dalam kancah politik nasional. Meskipun tergolong baru dalam hal pendukung sangat besar sebab Megawati mendapatkan dukungan luas dari arus bawah (*grass root*) dan perjalanannya untuk menuju ke puncak karier politik tidak dapat dibendung oleh siapapun. Hal ini sungguh menarik karena kepemimpinannya dalam PDI merupakan suatu hal yang sangat fenomenal dan merupakan suatu kenyataan yang menakjubkan. Menurut penilaian Amien Rais, bahwa terpilihnya Megawati sebagai pemimpin PDI serta banyaknya dukungan dari arus bawah karena Megawati memiliki keuntungan yang sudah terpasang tetap (*built in*) dalam dirinya yaitu citra atau *image* yang positif sebagai seorang putri Bung Karno sang proklamator dan Preiden RI pertama dan politikus muda yang keibuan serta merakyat.¹²

Bagi para pendukung PDI khususnya golongan arus bawah merasa memerlukan sosok orang untuk menjadi simbol yang dapat menyalurkan perasaan mereka karena mereka mengalami kejenuhan dan menginginkan adanya perubahan yang dapat menyegarkan keadaan partai yang sarat dengan konflik. Sosok yang mereka cari, mereka temukan pada diri Megawati yang secara represif mengalami tekanan-tekanan dari penguasa.¹³ Mereka beranggapan bahwa Megawati merupakan tokoh yang paling mampu menjadi pemersatu dan perekat PDI diantara konflik-konflik yang berkepanjangan. Selain itu pentingnya Megawati memimpin PDI karena keretakan yang sudah semakin parah dalam tubuh PDI, sehingga diperlukan adanya pemimpin yang memiliki kharisma yang

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

¹³ *Ibid.*

mampu untuk menyatukan potensi-potensi partai.¹⁴ Megawati adalah sosok yang dipandang sebagai salah satu figur populis, sehingga sebagai seorang populis yang terjun dalam politik maka akan mendapatkan dukungan dari massa atas sikap politiknya.

Kepemimpinan Megawati merupakan harapan bagi para pendukung PDI yang berada ditengah-tengah trauma konflik setelah kegagalan kongres Medan dalam melakukan pemilihan pemimpin partai. Oleh sebab itu munculnya Megawati sebagai pemimpin PDI yang baru merupakan legitimasi yuridisnya diberikan melalui Munas PDI di Jakarta 22 Desember 1993 dapat menjadi suatu konfirmasi timbulnya harapan-harapan baru dalam diri pendukung PDI.¹⁵

Pertama, dalam tubuh partai PDI. Megawati berada pada titik yang relatif netral dalam struktur konflik PDI baik sebelum maupun sesudah terlaksananya kongres Medan 1993. Megawati tidak mewakili faksi tradisional manapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Megawati merupakan orang baru dalam politik yang tidak ada latar belakang interaksi yang intensif dengan faksi PNI. Meskipun jika kita tarik dari satu sisi ia merupakan anak Soekarno, maka seharusnya Mega menjadi orang PNI. Tetapi disini Megawati bukanlah orang PNI, ia merupakan orang baru yang terjun dalam politik nasional. Megawati juga tidak pernah dikenali atau diketahui tergabung dalam kelompok manapun. Hal inilah yang membangkitkan harapan terhadap Megawati bahwa ia merupakan sosok yang mampu mengelola konflik dalam tubuh partai (PDI). Kedua, Megawati berada dalam dua posisi yang sangat menguntungkan. Sebab setelah kongres gagal dalam

¹⁴ Rusdi Mughtar, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁵ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 25.

memilih pemimpin partai PDI berada dalam situasi tarik menarik dalam dua titik aspirasi. Dua titik aspirasi tersebut adalah pencarian payung pemerintah dan pemandirian partai. Ketiga, Megawati memiliki karakter yang lembut, keibuan, sedikit berbicara dan bukanlah sosok figur yang pandai mengumbar isu-isu kontroversial, tetapi juga dibayang-bayangi oleh sosok yang besar dan kharismatis Bung Karno. Dengan kata lain Megawati merupakan sosok pemimpin yang lembut tetapi kuat.¹⁶

Kehadiran Megawati sebagai pemimpin mewakili harapan-harapan warga PDI akan munculnya pemimpin alternatif. Megawati diharapkan untuk dapat menjadi “juru penengah konflik”, pemberi kesegaran baru bagi partai, perwujudan kehendak populis yang ingin melawan rekayasa politik dari atas dan merupakan pemimpin yang membawa kharisma karena Mega merupakan putri Bung Karno.¹⁷

Dengan pendukung yang dominan bukan berarti kepemimpinan Megawati dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Konflik tetap saja muncul. Bahkan dalam kepemimpinan Megawati konflik yang muncul semakin berat. Sebab Megawati harus menghadapi tantangan politik dari dua sisi baik dari dalam tubuh PDI maupun dari luar tubuh PDI dalam arti kekuatan pemerintah rezim Orde Baru.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25-26.

¹⁷ *Ibid.*

B. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Dalam Tubuh PDI Dihantam Oleh Badai Politik.

Kehadiran Megawati dalam dunia politik merupakan kecemasan bagi orang-orang yang telah lama terjun dalam kancah politik nasional. Khususnya dalam tubuh PDI sendiri dan bagi pemerintahan rezim Orde Baru. Sebab bagi pemerintah ketenaran Megawati di kalangan pendukung PDI yang sebagian besar merupakan golongan muda merupakan ketakutan akan munculnya kembali Soekarnoisme. Meskipun bagi PDI Megawati telah banyak berjasa dalam meningkatkan perolehan suara dalam dua periode pemilu yakni Pemilu 1987 dan Pemilu 1992. Megawati memang merupakan orang yang tergolong baru dalam sepak terjang politik tetapi Mega sudah banyak memiliki pengalaman akan kerasnya kehidupan dalam dunia politik nasional. Megawati juga memiliki guru besar yang tidak lain adalah ayahnya sendiri yang mengajarkannya tentang kehidupan politik nasional maupun internasional. Ia juga telah merasakan pasang surutnya karier politik yang dialami oleh ayahnya. Hal tersebut memberikan pemahaman dalam diri Megawati bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi dalam kehidupan politik hanyalah kepentingan.¹⁸

Sejak awal sebelum Mega memutuskan untuk menerima tawaran Soerjadi untuk bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Megawati telah menyadari benar konsekuensi apa yang akan ia hadapi jika ia memutuskan terjun dalam dunia politik yang sarat dengan konflik tersebut. Baik itu konflik yang

¹⁸ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 8-9.

terjadi karena kepentingan pribadi maupun perebutan kekuasaan.¹⁹ Oleh karena itu pada saat Megawati terjun dalam dunia politik ia mendapat berbagai kecaman yang ingin menyingkirkannya dalam perjalanannya meniti karier di dunia politik. Megawati yang sejak awal telah dianggap “melanggar” konsensus yang dibuat oleh keluarga Bung Karno pada tahun 1982 saat memutuskan terjun dalam kehidupan politik ia pun mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Badai politik mulai menghantam langkah Megawati ketika ia menerima tawaran dan bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PDI pada tahun 1993 dalam KLB. KLB tersebut diselenggarakan karena kongres IV PDI di Medan mengalami kegagalan dalam memilih Ketua Umum PDI, bahkan telah memicu bentrok antara kubu Soerjadi dan “kelompok 17” yang dipimpin oleh Marsoesi Dudi Singadilaga.²⁰

Dalam KLB langkah Megawati selalu dihalang-halangi, namun Megawati tidak tinggal diam dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDI. Megawati terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 tetapi bukan berarti ia dapat duduk dengan diam dan tenang tanpa bertindak apapun, tetapi ia harus berjuang keras untuk mencari jalan penyelesaian konflik dan melakukan perubahan. Menjadi Ketua Umum PDI, Megawati justru selalu diterpa oleh badai politik yang berusaha untuk menjatuhkannya dari kedudukannya sebagai pemimpin partai.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

B. 1. Munculnya DPP Resuffle Pimpinan Yusuf Merukh

Konflik demi konflik terus saja bergulir dan berupaya menyingkirkan Megawati dari posisi Ketua Umum DPP PDI. Setelah Mega memulai memimpin PDI dan membentuk pengurus DPP PDI konflik mulai muncul kembali bahkan kepemimpinan Mega belum genap ada satu tahun menjabat sebagai Ketua Umum PDI. Konflik demi konflik harus ia alami. Konflik berawal dari adanya isu tentang keterlibatan sejumlah pengurus PDI dalam G 30 S/PKI. Dengan adanya isu keterlibatan sejumlah pengurus PDI dalam G 30 S/PKI tersebut menyebabkan timbulnya pembelot-pembelot dalam DPP PDI pimpinan Megawati. Sejumlah eksponen PDI membentuk DPP *Reshuffle* yang dipimpin oleh Yusuf Merukh sebagai DPP tandingan terhadap DPP pimpinan Megawati. Secara terang-terangan Yusuf Merukh bersama para pendukungnya menentang kepemimpinan Megawati dalam PDI.²² DPP PDI *Reshuffle* itu dibentuk pada akhir Desember 1994 setahun setelah diadakannya Munas PDI di Jakarta dengan Gerry Matemboy sebagai deklaratornya. Dibentuknya DPP *Reshuffle* tersebut merupakan terpaan badai politik yang paling serius merongrong kepemimpinan Megawati dalam PDI yang datang dari kalangan internal PDI.²³

Menurut Yusuf Merukh tujuan dibentuknya DPP *Reshuffle* atau DPP tandingan ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, membersihkan PDI dari anasir-anasir PKI. Seperti yang ditudingkan oleh Yusuf Merukh kepada para pengurus PDI pimpinan Megawati, bahwa di dalam PDI Megawati ada sekitar 300 orang kader PDI baik dari pusat sampai daerah yang tersangkut dalam PKI. Tuduhan

²² *Ibid.*

²³ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 38.

tersebut juga dituduhkan kepada suami Megawati sendiri Taufik Kiemas yang juga terlibat dalam perkara tersebut. Taufik juga dituduh sebagai “orang yang tidak bersih lingkungan” yakni pada saat Taufik Kiemas masih aktif menjadi aktivis Sumatera Selatan. Kedua, mengembalikan PDI pada rel jalur Orde Baru sebab menurutnya (Yusuf Merukh) bahwa selama ini PDI pimpinan Megawati diwarnai oleh ajaran paham politik Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno yakni marhaenisme dan soekarnoisme. Ketiga, menyelesaikan konflik PDI melalui musyawarah Majelis Petimbangan Partai (MPP) yang dilaksanakan diantara dua kongres.²⁴

Tuduhan terhadap Taufik Kiemas berhasil dibersihkan, karena tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada suaminya tidak terbukti, Taufik Kiemas bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Taufik Kiemas berhasil lolos dari tuduhan tersebut karena setiap kali diadakan “Litsus” atau “bersih diri” oleh pihak penyelidikan baik Megawati maupun Taufik Kiemas selalu lolos dan terbukti bahwa dirinya bersih dari campur tangan atau keikutsertaan dalam PKI seperti yang telah dituduhkan oleh Yusuf Merukh kepada dirinya.²⁵

Megawati berhasil melalui ujian yang menghadang kehidupannya. Tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada para kader PDI pimpinannya dan kepada suaminya tidak membuat Megawati semakin kendur semangatnya untuk terus maju dalam karier politik. Megawati justru semakin paham akan kerasnya arus perlawanan yang ingin menyingkirkannya dari kancah politik nasional baik itu perlawanan yang datang dari pihak internal partai, eksternal maupun perlawanan

²⁴ Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 194.

²⁵ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 20.

dari konspirasi antara kedua sisi tersebut. Munculnya berbagai perlawanan dan ujian memang berhasil Megawati lalui dengan baik. Namun demikian untuk mengatasi konflik internal yang ada dalam tubuh PDI bukan persoalan yang gampang, karena konflik yang ada dalam tubuh PDI merupakan persoalan yang sulit untuk dapat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan persoalan-persoalan yang ada dalam tubuh PDI merupakan persoalan yang dilandasi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap kali konflik yang satu sudah dapat dicarikan pemecahannya maka muncul lagi konflik internal yang lainnya.

Sebagai sebuah partai PDI memang masih lemah dan kurang mandiri secara intern, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar partai terutama dari campur tangan pemerintah. Setiap kali konflik yang terjadi dalam PDI pemerintah selalu saja ada dan ikut campur tangan dalam mencari pemecahannya, dan selalu ingin melakukan "pembinaan politik".²⁶ Maka tidak heran jika adanya campur tangan pemerintah justru menimbulkan pemasalahan dan berdampak negatif bagi pihak-pihak internal PDI. Sebab mereka justru akan menjadi lemah dalam menghadapi berbagai persoalan dan selalu mengundang dan meminta bantuan pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah.²⁷ Hal tersebut membuat PDI semakin tergantung terhadap pemerintah maupun pihak luar jika setiap kali muncul masalah harus pemerintah yang menyelesaikannya. Pada hal belum tentu dengan selesainya masalah tersebut oleh campur tangan pemerintah akan memperbaiki keadaan karena dapat juga akan menimbulkan masalah-masalah intern baru dalam tubuh PDI.

²⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 22

²⁷ *Ibid.*

Dengan adanya pembinaan pun belum tentu dapat memperbaiki kondisi dalam tubuh PDI yang di dalamnya selalu terjadi konflik intern. Konflik tersebut tidak akan dapat terselesaikan hanya dengan pembinaan politik saja, karena pembinaan politik tersebut tidak mempunyai batas-batas dan ruang lingkup yang transparan akan menjadikan PDI maupun partai-partai lain menjadi tergantung pada pengakuan, dukungan, ijin, dan restu pemerintah oleh pengurus partai yang dinilai membelot dari pemerintah. Adanya pembinaan politik membuat pihak dari luar partai merasa benar dalam mencampuri, mengendalikan dan mengontrol para aktivis partai yang mencoba mencari jarak dengan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah tidak pernah memberikan pengakuan maupun dukungan yang bersifat final.²⁸ Seperti halnya yang telah dialami oleh Megawati pada saat ia menyatakan diri sebagai pemimpin PDI yang baru untuk periode 1993-1998 sehingga ia selalu menghadapi berbagai tekanan dalam menjalani kariernya.

B. 2. Kongres IV (Kedua) PDI di Medan: Pembelotan Fatimah Achmad Dari DPP PDI Megawati

Setelah Megawati berhasil melewati cobaan yang datang dari DPP Resuffle pimpinan Yusuf Merukh, tidak lama kemudian muncul perlawanan baru yang datang dari Clara Sitompul Tambunan. Clara Sitompul, anggota MPR dari DPP PDI Resuffle pimpinan Yusuf Merukh melakukan pembangkangan dengan

²⁸ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 38.

mengajukan penyelenggarakannya kongres PDI yang akan diadakan di Bandung.²⁹

Rencana KLB yang digerakkan oleh Clara Sitompul tersebut tidak terlaksana karena dilarang oleh aparat keamanan dan birokrasi pemda Jawa Barat. Alasannya adalah bahwa KLB tersebut tidak resmi dan justru akan memancing perselisihan.³⁰ Tampaknya larangan tersebut tidak menyurutkan tekad Clara Sitompul untuk menyelenggarakan kongres di tempat lain. Ia juga mengeluarkan pernyataan bahwa rencana pelaksanaan kongres tersebut telah mendapatkan dukungan dari 200 DPC dari 306 DPC PDI di seluruh Indonesia³¹

Adanya kalkulasi yang dilontarkan oleh Clara Sitompul tersebut tentang dukungan yang diberikan oleh 200 DPC dari 306 DPC PDI di seluruh Indonesia, Ketua Balitbang PDI Kwik Kian Gie kemudian mengambil tindakan dengan menyebarkan angket keseluruh DPC tentang sikap mereka dalam menghadapi rencana KLB.³² Angket yang disebarkan oleh Kwik Kian Gie tersebut berisi enam pertanyaan mengenai kongres yang harus dijawab oleh Ketua DPC PDI di seluruh Indonesia.³³ Pertanyaan-pertanyaan kuisioner tersebut adalah sebagai berikut;

1. Apakah cabang Saudara mempunyai kebutuhan diselenggarakannya kongres/KLB tersebut?
2. Kalau ya, siapa yang memberi ide kepada Saudara menyelenggarakan KLB tersebut? Saudara sendiri atau ada aparat pemerintah yang mengusulkan

²⁹ Mohammad Thoyibi, *Menentang Arogansi Kekuasaan: Kasus Mega Bintang*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999, hlm. 23.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Baca juga Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 43.

³² Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 24.

³³ Wawancara Kwik Kian Gie, *Kalau Soerjadi Menjadi Ketua, Seperti Apa Suasana PDI*, dalam <http://www.tempointeractive.com/ng/min/01/17/utama8.htm>.

kepada Saudara? Kalau Saudara sendiri merasa perlu diselenggarakan KLB dalam waktu dekat, apa dasar pikiran, alasan, dan keputusan yang diharapkan oleh para anggota cabang Saudara?

3. Apakah ada aparat pemerintah yang menghubungi Saudara dengan topik pembicaraan mengenai kongres/KLB?
4. Apa alasan yang diberikan aparat pemerintah tersebut supaya Saudara mengusulkan kepada DPP diselenggarakan KLB?
5. Sebutkan aparat pemerintah yang menganjurkan kepada Saudara seperti termaksud dalam nomor tiga tersebut di atas!
6. Sikap dan jawaban apa yang Saudara berikan kepada aparat pemerintah yang bersangkutan?³⁴

Jumlah jawaban yang masuk dari kuisisioner yang disebarkan ke berbagai DPD dan DPC PDI di seluruh Indonesia tersebut tidaklah banyak, karena mereka lebih memilih untuk memberikan jawaban secara langsung dan memilih memberikan pernyataan dukungan kepada DPP Megawati. Tetapi dari jawaban kuisisioner yang masuk secara tertulis menunjukkan adanya cabang yang mengalami intervensi dari aparat pemerintah. Misalnya, DPD PDI Aceh yang dalam jawaban kuisisionernya mengakui adanya faktor eksternal yang mengharapakan KLB dapat diselenggarakan untuk menjatuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. DPC PDI Aceh juga mengakui, berdasarkan laporan dari cabang-cabang PDI yang ada di Aceh hampir semua cabang "dibisiki" oleh instansi-instansi kadit/kakansospol supaya meminta KLB PDI, namun semua

³⁴ Wawancara Kwik Kian Gie, *Ibid.*

cabang menolaknya. Aparat pemerintah yang mengusulkan untuk meminta cabang-cabang PDI membuat permintaan KLB PDI, adalah instansi-instansi yang ada kaitannya dengan pembinaan politik, baik sipil maupun militer seperti kaditsospol/kakansospol serta kodim dan konem setempat.³⁵

Hal tersebut dengan jelas menunjukkan adanya faktor eksternal yang ikut campur tangan dan ingin memecahbelah PDI dengan menyingkirkan Megawati melalui kongres. Kemudian Sekjen DPP PDI Megawati Alex Litaay mengumumkan bahwa DPP menerima surat dari 27 DPP dan 250 DPC yang isinya dengan tegas menolak pelaksanaan KLB dengan alasan menganggap bahwa kegiatan tersebut bersifat inkonstitusional dan bukan merupakan kebutuhan organisasi. Mereka juga menyatakan dukungannya kepada Megawati.³⁶ Namun dengan ketiadaan Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) partai yang tidak pernah dibentuk oleh Megawati dalam kepemimpinannya dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Mega dengan menuding bahwa ia tidak mengindahkan amanat AD/ART PDI tahun 1986.³⁷ Sementara menurut Megawati bahwa DPP PDI pimpinannya menggunakan AD/ART PDI 1994 yakni anggaran dasar yang dihasilkan dalam Munas PDI 1993.

DPP PDI pimpinan Megawati kemudian mengadakan rapat di kantor DPP PDI sebagai upaya untuk menghadapi desas-desus tentang rencana penyelenggaraan KLB yang semakin santer menjadi permasalahan dalam PDI.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 24, dan Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 44.

³⁷ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 45-46.

Rapat DPP tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 1996 di kantor DPP PDI. Pelaksanaan rapat tersebut ternyata DPP PDI pimpinan Megawati terpecah menjadi dua kelompok: antara kelompok yang menyetujui dilaksanakannya KLB dan kelompok yang menolak KLB. Kelompok yang menolak KLB adalah "Kelompok 11". Kelompok ini merupakan kelompok yang mendukung kepemimpinan Megawati terdiri dari Megawati Soekarnoputri sendiri, Soetardjo Soerjogoeritno, Kwik Kian Gie, I Gusti Ngurah Sara, Suparlan, Mangara Siahaan, Alex Litaay, Syafei Ali Gumay, Haryanto Taslam, Laksmana Sukardi, dan Noviantika Nasution. Sedangkan kelompok yang menerima KLB adalah "Kelompok 16" yakni Fatimah Achmad, Panangian Siregar, Slamet Mulyadi, Ismunandar, Abdul Gani, Yahya Theo, Subagyo, KH. Abdul Kholiq Murod, Titi Yuliasih Kardjono, Ratih Ratna Purnami, Andi Chaerul Muis, Eddy Djunaedi, Mulyono Sutarno, Untung Sutomo, Neneng Amalia, dan Oerip Soedjono.³⁸

Rapat tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan baik kesepakatan menolak atau menerima diselenggarakannya KLB, namun rapat tersebut mengalami jalan buntu karena tidak dicapai kesepakatan. Pada tanggal 3 Juni 1996 dalam DPP PDI pimpinan Megawati diagendakan untuk mengadakan rapat tepatnya pada pukul 14.00 WIB dan hanya merupakan agenda rapat biasa bukan untuk membicarakan tentang penyelenggaraan kongres. Dalam rapat tersebut Fatimah Achmad kemudian mengeluarkan map yang berisi berkas-berkas tentang permintaan cabang-cabang untuk melaksanakan kongres. Fatimah

³⁸ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 24.

Achmad mengatakan: "ini ada berkas-berkas yang masuk mengenai usul pelaksanaan kongres dari 215 cabang." Fatimah Achmad juga mengusulkan agar rapat saat itu digunakan untuk membicarakan usulan diselenggarakannya kongres.³⁹

Rapat DPP PDI tanggal 3 Juni berjalan dengan alot karena tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Pada mulanya Megawati memang menyetujui untuk membicarakan usulan kongres dalam rapat tersebut, bahkan Mega mengusulkan agar Soetardjo Soerjogoeritno menjadi Ketua Kongres, dan Soebagyo dan Ismunandar sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris.⁴⁰ Nama-nama yang diusulkan oleh Megawati ditolak oleh Kelompok 16, karena mereka menginginkan Fatimah Achamadlah yang menjadi ketua kongres.

Megawati kemudian menghentikan rapat tersebut dan memutuskan agar rapat dilanjutkan keesokan harinya 4 Juni 1996, dan mencabut kembali keputusannya tentang penyelenggaraan kongres. Alasan Megawati mencabut kembali keputusannya karena belum dicapai kesepakatan mengenai panitia kongres. Selain itu Megawati menyetujui rapat penyelenggaraan kongres jika rapat tersebut satu paket dengan pembicaraan panitia kongres.⁴¹ Keputusan yang diambil oleh Megawati tidak dapat diterima oleh Kelompok 16 yang dipimpin oleh Fatimah Achmad. Mereka kecewa dan menolak keputusan Megawati dan merasa bahwa komposisi kepanitiaan tidak imbang. Dibawah pimpinan Fatimah

³⁹ Wawancara Kwik Kian Gie, *op. cit.* dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama8.htm>. Baca juga Putut Trihusodo, "Setelah Serangan Pagi di Markas PDI", dalam *Gatra* No. 38 Vol. II, Edisi 3 Agustus 1996, hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid.* Baca juga Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 24.

Achmad mereka menolak untuk melanjutkan rapat di kantor DPP dan mengadakan pemboikotan dengan mengadakan rapat di Hotel Wisata yang disebut dengan rapat tandingan. Rapat yang diselenggarakan oleh Fatimah Achmad tersebut dihadiri oleh Ketua DPP PDI Panagian Siregar, Ismunandar, Slamet Mulyadi, KH. Abdul Choliq Murod, Abdulgani. HA, Wakil Sekjen Andi Chaerul Muis Manggabarani, Lukman Mokoginto, Ratih Ratna Purnami, Eddy Djunaidi, Titi Juliasih Kardjono dan Wakil Bendahara Neneng Amalia Dendawacana.⁴²

Pada hari itu juga, 3 Juni 1996 42 DPP PDI dibawah pimpinan Ketua DPD Jawa Tengah Sumario menghadap Dirjen Sospol Depdagri Soetojo NK. Tujuan mereka menemui Soetojo NK adalah untuk menyerahkan 21 map yang berisi pernyataan tertulis dari 21 DPD dan 215 DPC PDI dari 305 DPC yang ada tentang keinginan mereka untuk menyelenggarakan kongres PDI untuk menyelesaikan kemelut internal yang terjadi dalam tubuh PDI. Rencana penyelenggaraan kongres tersebut mendapat persetujuan dari Soetojo NK karena menurutnya kongres tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Tumah Tangga (AD/ART) PDI. Oleh karena itu pemerintah tidak keberatan dan mengizinkan PDI menyelenggarakan kongres.

Bersamaan dengan diberikannya ijin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kongres, rapat DPP tandingan PDI pimpinan Fatimah Achmad di Hotel wisata juga menghasilkan kesepakatan tentang rencana KLB sekaligus susunan panitianya. Hasil keputusan rapat DPP tandingan tersebut memilih

⁴² Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 24-25.

Fatimah Achmad sebagai ketua kongres seperti yang diinginkan oleh Kelompok 16.⁴³

Sementara itu, Megawati beserta pengurus DPP PDI hasil Munas (Kelompok 11) tidak ikut hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Fatimah Achmad. Megawati menganggap Fatimah Achmad adalah penghianat partai. Kemudian bersama dengan kelompok 11 lainnya Megawati mengadakan rapat pada keesokan harinya 4 Juni 1996 sebagai kelanjutan dari rapat sebelumnya di kantor DPP pada tanggal 3 Juni 1996. Dalam rapat tersebut secara tegas Megawati dan DPP PDI yang tetap mendukungnya menolak rencana diselenggarakannya kongres.⁴⁴ Pada rapat sebelumnya, Megawati memang sempat menyetujui diselenggarakannya kongres karena Mega percaya kalau isi dari berkas-berkas yang diajukan oleh Fatimah Achmad memang benar adanya. Rapat yang tidak menghasilkan kesepakatan tersebut kemudian dihentikan oleh Megawati dan menarik kembali keputusannya menyetujui kongres tersebut.

Penolakan Megawati terhadap rencana penyelenggaraan kongres karena setelah berkas-berkas tersebut diteliti ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fatimah Achmad. Jumlahnya bukanlah 215 tetapi hanya berjumlah 141, selain itu berkas-berkas tersebut juga tidak ditandatangani oleh ketua cabang tetapi hanya oleh sekretaris. Banyak lagi kecacatan-kecacatan lain yang membuat Megawati dan 10 pengurus DPP lainnya mengambil keputusan tidak menyetujui diselenggarakannya kongres.⁴⁵ Kemudian Soetardjo

⁴³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* Baca juga Wawancara Kwik Kian Gie, *op. cit.*,

Soerjogoeritno didampingi oleh Kwik Kian Gie dan Sekjen Alex Litaay mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut mereka mengumumkan penolakan DPP PDI atas rencana penyelenggaraan kongres yang dipimpin oleh Fatimah Achmad dan 15 DPP PDI lainnya yang melakukan pembelotan.⁴⁶

Press Release keputusan rapat 3-4 Juni 1996 yang hanya dihadiri oleh 11 orang pengurus DPP termasuk Megawati dengan jelas menyebutkan: "Sehubungan dengan adanya permintaan dari 16 DPP dan 141 DPC PDI untuk menyelenggarakan kongres, dengan ini DPP PDI memutuskan menolak permintaan tersebut dan tidak akan melaksanakan kongres dalam waktu dekat oleh karena seluruh jajaran partai telah bertekad untuk menyukseskan Pemilu 1997 yang telah dimulai pelaksanaannya sejak 1 Mei 1996.⁴⁷ Alasan-alasan yang lain penolakan penyelenggaraan kongres tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Usulan 16 DPP dan 141 DPC PDI telah diteliti secara seksama ternyata tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan konstitusi partai yang berlaku.
- b. Usulan tersebut ternyata juga tidak dibuat berdasarkan rapat cabang, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- c. Menjaga stabilitas partai maupun stabilitas nasional menghadapi tugas nasional, suksesnya Pemilu 1997.⁴⁸

Keputusan rapat DPP PDI yang dengan tegas menolak menyelenggarakan kongres ternyata tidak menghentikan niat Fatimah Achmad dan pendukungnya

⁴⁶ Mohammad Thoyibi, *ibid.*, hlm 25.

⁴⁷ DPP PDI, *Press Release: Keputusan Rapat DPP PDI Tanggal 3-4 Juni 1996*, dalam http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/15/utama3_1.htm.

⁴⁸ *Ibid.*

untuk menggelar kongres. Rencana mereka justru semakin matang, bahkan pada tanggal 5 Juni 1996 Fatimah Achmad dan 15 pendukungnya yang lain DPP PDI yang membangkang dari kepemimpinan Megawati melaporkan rencana penyelenggaraan kongres kepada Dirjen Sospol Depdagri Soetojo NK dan menemui Letjen TNI Syarwan Hamid dengan tujuan yang sama. Soetojo NK dan Syarwan Hamid dengan tegas memberikan dukungan kepada Fatimah Achmad dan kelompoknya untuk menyelenggarakan kongres.⁴⁹ Sementara itu, Yogie S. Memet menjanjikan kepada kelompok Fatimah Achmad bahwa pemerintah akan memberikan ijin, dan memberikan bantuan dana bagi penyelenggaraan kongres.⁵⁰

Permohonan penyelenggaraan kongres tampak nyata bahwa kongres tersebut adalah untuk menumpas Megawati dari kepemimpinan PDI. Fatimah Achmad, salah satu Ketua DPP PDI di bawah Megawati yang juga menjabat Ketua Fraksi DPR-RI merupakan orang yang mengajukan permohonan kongres tersebut kepada Departemen Dalam Negeri. Fatimah juga menyatakan bahwa kongres tersebut didukung oleh 215 dari 306 Cabang dan mendapat sokongan 22 DPD dari 27 DPD. Serta 16 dari 27 fungsionaris DPP. Penyelenggaraan kongres semakin kuat dengan adanya persetujuan dan restu dari pemerintah.⁵¹ Kongres tersebut juga didukung oleh ABRI. Setelah memperoleh ijin dan restu dari pemerintah karena permohonan pelaksanaan kongres tersebut sudah sesuai dengan konstitusi partai, kemudian diputuskan kongres tersebut dilaksanakan di Medan pada tanggal 20-23 Juni 1996.⁵²

⁴⁹ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 25.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 26.

⁵¹ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, Hlm. 46.

⁵² Sumarno, *op. cit.*, Hlm. 22.

Tanggal pelaksanaan kongres telah ditentukan, hal itu membuat situasi dalam tubuh PDI semakin memanas. Para pendukung Megawati dengan keras menolak dan melakukan *Longmarch*. Dua hari menjelang diselenggarakannya kongres PDI (kedua) di Medan membuat garis pemisah antara posisi pemerintah, ABRI, dan kubu Fatimah Achmad dengan PDI Megawati semakin jelas. Garis pemisah tersebut semakin jelas dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996 tentang pembebas-tugasan 16 fungsionaris DPP PDI yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri.⁵³

Surat keputusan tersebut kemudian dibacakan dihadapan ratusan massa PDI di depan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat oleh Mangara Siahaan.⁵⁴ Keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996 tentang Pembebas-Tugasan 16 fungsionaris DPP PDI ini dilakukan karena ke-enambelas fungsionaris tersebut dianggap telah membahayakan keutuhan partai dan secara sengaja telah melanggar disiplin partai dengan melakukan kegiatan partai yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan partai seperti mengadakan rapat-rapat diluar Kantor Sekretariat dengan mengatasnamakan DPP PDI. Keenambelas fungsionaris tersebut juga membentuk Panitia Kongres PDI dan melaksanakan kongres pada bulan Juni tahun 1996 di Medan yang secara nyata bertentangan dengan keputusan Munas PDI tahun 1993 No. XVI/KPTS/Munas/PDI/1993 tentang struktur, komposisi dan personalia DPP PDI massa bhakti 1993-1998.⁵⁵

⁵³ Wartawan Tempo, *Antara Jakarta dan Medan*, dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama9.htm>.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ DPP-PDI, *Keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996 Tentang Pembebas-Tugasan Fungsionaris DPP PDI, 18 Juni 1996*, dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama3.htm>.



Dalam keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996 tersebut dengan tegas memutuskan dan menetapkan : Pertama, penggunaan wewenang Ketua Umum DPP PDI sebagaimana kewenangan yang telah ditetapkan dalam keputusan MPP No.XVII/MPP/1988 untuk menyelamatkan Partai. Kedua, Membebas-tugaskan 16 Fungsiaris DPP PDI dari jabatannya masing-masing sebagai mana daftar nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini. Ketiga, dengan pembebas-tugasan ini maka mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan tidak berhak melakukan tindakan, baik ke dalam maupun keluar, yang mengatasnamakan fungsiaris PDI.⁵⁶

Keenambelas fungsiaris yang dibebas-tugaskan dari jabatannya masing-masing adalah Ketua: HJ. Fatimah Achmad, SH, H. Ismunandar, Drs. H. Subagyo, Drs. H. Slamet Moelyadi, H. Abdulgani HA, BBA, KH. Abdul Kholiq Murod LC, DR. Panaggian Siregar, dan H. Yahya Theo. Wakil Sekjen: Eddy Djunaedi, SH, Dra. Titi Suliasih Jardjono, HJ. Ratih Ratna Purnami, MBA, dan Ir. Andi Chaerul Muis Mangga Barami, MSi. Wakil Bendahara: Dra. H. Mulyono Sutarmo, H. Untung Sutomo, MBA, HJ. Neneng Amalia Dendawacana, dan F.X. Oerip Sodjod.⁵⁷

Penyelenggaraan kongres tersebut memang tidak sepenuhnya ide datang dari Fatimah Achmad. Setelah diusut ternyata dibalik penyelenggaraan kongres tersebut terdapat nama-nama lain yang memiliki andil dan pengaruh besar. Orang-

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ DPP-PDI, *Lampiran Keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996: Daftar Nama 16 Fungsiaris DPP PDI yang Dibebas-Tugaskan dari Jabatannya Masing-Masing*, dalam <http://www.temppointeractive.com/ang/min/01/17/utama4/htm>.

orang tersebut diantaranya adalah Alex Widya Siregar. Selain itu dari pihak ABRI adalah Leten TNI Syarwan Hamid dan Kassospol ABRI yang merupakan penyeru gagasan utama untuk menyingkirkan Megawati dari PDI.⁵⁸ Sedangkan sebagai fasilitatornya adalah Mayjen TNI Syamsir Siregar.⁵⁹ Sementara Fatimah Achmad sendiri ditentukan sebagai Ketua Panitia penyelenggara kongres PDI di Medan tersebut.

Kongres tersebut diselenggarakan di Asrama Haji Pangkalan Mashur, Medan pada tanggal 20-23 Juni 1996 dan memperoleh kesepakatan bahwa secara aklamasi kembali kongres memilih dan menjadikan Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI yang baru.⁶⁰ Secara Legalitas kepemimpinan Soerjadi dalam PDI diakui secara sah oleh pemerintah. Kemudian tidak mengakui Megawati sebagai pemimpin PDI yang sebelumnya telah diakui oleh pemerintah berdasarkan “*asas legalitas*”. Pemerintah juga menganggap bahwa kepemimpinan Megawati sudah berakhir, karena sudah ada pemimpin PDI yang baru dari hasil keputusan kongres Medan yang legal dan demokratis.⁶¹

Hasil kongres tersebut tidak diterima oleh Megawati dan para pendukungnya. Meskipun kepemimpinan Megawati sudah tidak diakui lagi oleh pemerintah karena melalui kongres Medan Soerjadi telah terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI yang baru, tetapi bagi para pendukungnya Megawati tetaplah pemimpin PDI yang sah dan legal. Terlaksananya kongres IV (kedua)

⁵⁸ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, Hlm. 46.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 47.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 48.

⁶¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 23. Baca juga Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 41. Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 251.

PDI di Medan menyebabkan dalam tubuh PDI terdapat dualisme kepemimpinan, yakni kepemimpinan Soerjadi yang merupakan pimpinan PDI yang mendapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah dan kepemimpinan Megawati yang disokong oleh arus bawah. Dengan adanya dualisme kepemimpinan tersebut menyebabkan konflik baru dalam tubuh PDI sehingga partai semakin keruh dan rapuh.⁶²

Selain pemerintah tidak mengakui lagi kepemimpinan Megawati dalam PDI, pemerintah juga melarang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Megawati dan ruang geraknya semakin dipersempit. Ia juga tidak boleh tampil dalam acara-acara resmi yang diadakan oleh PDI pimpinannya, dan kader-kadernya yang masih setia memberikan dukungan kepada Mega juga dilarang mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan massa. Selain itu mereka juga mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah.⁶³ Terlaksananya Kongres Medan 20-23 Juni 1996 dan terpilihnya kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI yang baru membuat pemerintah kembali tidak mengakui kepemimpinan Megawati yang telah diakui berdasar asas legalitas melalui Munas PDI 1993. Tentu saja hal tersebut telah memicu sikap resisten pada kelompok anti kongres.⁶⁴

Pelaksanaan kongres tersebut tidak dihadiri oleh Megawati dan 11 fungsionaris lainnya karena pada saat pelaksanaan kongres IV Medan tersebut mereka tidak diundang oleh panitia penyelenggara kongres. Dengan adanya sikap yang resisten pada kelompok anti kongres tersebut maka dilakukan penjagaan

⁶² *Ibid.*, hlm. 251. Baca juga Sumarno, *op. cit.*, hlm. 23.

⁶³ Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 251.

⁶⁴ Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 1996, hlm. 214.

pada kantor DPP PDI di Jakarta secara ketat oleh kelompok pro Mega. Kemudian berbagai protes mulai bermunculan di daerah ibukota dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lainnya di luar kota Jakarta. Protes tersebut ditujukan kepada para kader PDI yang mendukung pelaksanaan kongres dan kepada pemerintah. Mereka mengadakan *Longmarch* yang didukung oleh ribuan kader PDI yang menolak kongres. Bahkan sempat menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan yang dikerahkan oleh pemerintah untuk menghalau orang-orang pro Mega dan para simpatisan yang melakukan protes. Longmarch tersebut juga melibatkan banyak aktivis politik, mahasiswa dan LSM-LSM lain yang mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Tekanan-tekanan dari pemerintah tidak hanya berhenti pada tergusurnya Megawati dari kepemimpinan dalam PDI melalui kongres Medan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lawan politiknya. Karena tujuan dari diselenggarakannya kongres tersebut untuk menggusur Megawati dari percaturan politik nasional.

B. 3. Peristiwa 27 Juli 1996, Puncak Penggusuran Megawati Soekarnoputri

Puncak dari upaya penggusuran Megawati dari percaturan politik nasional terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan peristiwa berdarah antara pendukung Megawati dan pendukung Soerjadi dalam upaya pengambilalihan kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat.⁶⁵ Peristiwa

⁶⁵ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 31.

tersebut menorehkan luka yang cukup dalam pada diri Mega dan pendukung-pendukungnya. Tragedi tersebut lebih dikenal dengan sebutan “Insiden Sabtu Kelabu”. Insiden tersebut terjadi setelah mimbar bebas yang dilakukan oleh pendukung Megawati baru saja usai dan sebagian besar massa yang hadir dalam mimbar bebas tersebut sudah meninggalkan kantor DPP PDI tersebut. Sedangkan para kader PDI pimpinan Megawati tetap tinggal dan berjaga-jaga dalam kantor DPP PDI. Pada saat itu kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro tersebut dikuasai oleh PDI pimpinan Megawati. Pada hari itu ratusan orang yang mengaku pendukung Soerjadi dengan mengenakan atribut merah pendukung kongres IV (kedua) Medan 1996 dan penutup kepala warna merah datang ke kantor tersebut dimana para kader PDI pimpinan Megawati sedang berjaga-jaga. Rombongan yang mengaku pendukung Kongres Medan tersebut berjumlah sekitar 200 orang.⁶⁶

Pada saat rombongan yang mengaku pendukung Soerjadi datang ke kantor DPP PDI pimpinan Megawati, tidak diketahui oleh kader-kader DPP PDI Megawati yang sedang berada di kantor tersebut. Rombongan tersebut berteriak-teriak dan mendekati kantor DPP PDI pimpinan Megawati untuk berusaha masuk secara paksa. Kemudian orang-orang yang mengaku pendukung Soerjadi tersebut melempari para pendukung Megawati dengan batu. Pada awalnya pendukung Megawati tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terdesak mereka pun melakukan perlawanan dan membalas dengan lemparan batu. Sesaat kemudian di depan kantor DPP PDI yang berada di Jl. Diponegoro tersebut menjadi tempat perang batu antara pendukung Soerjadi dan pendukung Megawati

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Soekarnoputri. Pendukung Megawati berhasil memukul mundur “pasukan” Soerjadi, namun para pendukung Soerjadi tersebut hanya mundur tidak jauh dari tantor DPP PDI berada. Meski demikian, para pendukung Megawati tidak melakukan pengejaran terhadap pendukung Soerjadi yang telah menyerang kantor DPP PDI pimpinan Megawati secara brutal.⁶⁷

Beberapa saat setelah pendukung Soerjadi berhasil dipukul mundur oleh para pendukung Mega, kemudian datang aparat keamanan dari berbagai satuan polisi dan ABRI, seperti Brimob, Kodam Jaya, Kostrad, dan pasukan Gegana. Keadaan pasukan aparat keamanan tersebut membangkitkan para pendukung Soerjadi dan kembali melakukan penyerangan bersama rombongan aparat keamanan.⁶⁸

Penyerangan kedua yang dilakukan oleh para pendukung Soerjadi yang dibantu oleh pasukan aparat keamanan terhadap para pendukung Megawati. Mereka menyerang dengan membabi buta para pendukung PDI Megawati yang berada dalam kantor tersebut sehingga para pendukung Megawati terdesak dan terjebak dalam gedung kantor DPP PDI tersebut.⁶⁹

Mereka menyerbu secara brutal dan kejam. Secara paksa masuk dalam kantor tersebut dengan menjebol dan merobohkan pagar, mereka kemudian masuk sembari meneriakan “bunuh PKI-PKI yang ada di dalam!!! Bunuh PKI!!!”. Setelah meneriakkan kata-kata tersebut dua kelompok orang-orang terutama yang mengenakan atribut pendukung kongres Medan melakukan penganiayaan

⁶⁷ *Ibid.* Baca juga Putut Trihusodo, “Setelah Serangan Pagi di Markas PDI” dalam *Gatra* No. 38 Vol. II, Edisi 3 Agustus 1996, hlm.22-24.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ “Perjuangan Merebut Benteng Keadilan”, dalam <http://.megaforpesident.org/books/htm>.

terhadap orang-orang pendukung PDI Megawati. Mereka juga melakukan pengrusakan serta menghancurkan barang-barang inventaris yang ada dalam kantor DPP PDI pimpinan Megawati di Jl. Diponegoro tersebut dengan pentungan dan bahkan ada juga yang menggunakan parang.⁷⁰

Atas tragedi tersebut dua puluh empat anak bangsa (versi Komnas HAM) hilang dan sebagian lagi menggelepar kesakitan, kaku, dan mati dengan tubuh berlumuran darah. Sedangkan sekitar 124 orang yang selamat diangkut oleh petugas ke Polda. Namun bukan keadilan yang mereka peroleh oleh para korban tersebut, tetapi justru dituduh sebagai terdakwa yang telah melakukan tindak kerusuhan pada hari sabtu itu, 27 Juli 1996. Dalam proses pengadilan mereka diperlakukan tidak adil bahkan ada yang mengalami pelecehan seksual oleh pihak aparat.⁷¹ Sementara mereka para pendukung Soerjadi yang dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan penyerangan dan penyebab utama terjadinya insiden tersebut justru tidak ada satupun yang ditangkap dan diproses di pengadilan.

Dengan adanya Insiden Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996 tersebut membuat massa pendukung Megawati murka. Ratusan pendukung Megawati berdatangan dari berbagai arah tetapi kedatangan mereka terhambat oleh oleh petugas keamanan yang berjaga-jaga di depan kantor DPP PDI tersebut. Hal tersebut membuat massa pendukung Megawati merasa kesal karena tidak diijinkan mendekati kantor DPP PDI. Larangan tersebut membuat emosi massa pendukung Megawati yang baru datang tersebut tidak terkendali. Mereka mulai menyerang

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

petugas keamanan dan melakukan aksi brutal di sekitar lokasi gedung DPP PDI.⁷² Insiden tersebut menimbulkan huru hara di berbagai daerah di Ibu kota seperti ke Jln. Kramat Raya Senen dan Jln. Salemba. Sejumlah gedung dan pertokoan serta mobil menjadi sasaran amuk massa tersebut. Mereka melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran. Bahkan gedung milik Departemen Pertanian ikut menjadi sasaran amuk massa.⁷³

Diambilalihnya kantor DPP PDI Megawati oleh Soerjadi, maka untuk sementara sekretariat DPP PDI Megawati menggunakan kediaman Megawati di Jl. Kebagusan. Pada awal September DPP PDI Megawati kemudian memutuskan untuk menyewa sebuah bangunan di daerah Condet sebagai markas baru. Penggunaan kantor DPP PDI Megawati tersebut diresmikan pada tanggal 9 september 1996. Kader-kader DPP PDI Megawati belum lama menempati kantor DPP PDI yang baru, tetapi pemerintah melakukan melakukan penyegelan terhadap markas tersebut pada tanggal 27 September 1996. Alasan pemerintah melakukan penyegelan tersebut adalah bahwa tempat tersebut bukanlah wilayah perkantoran melainkan pemukiman penduduk sehingga tidak bisa dijadikan tempat perkantoran.⁷⁴ DPP PDI Megawati kemudian kembali ke kediaman Megawati di Jl. Kebagusan sebagai markas PDI Megawati.

Pengambilalihan kantor DPP PDI Megawati di Jl. Diponegoro ini berarti para kader dan pendukung Megawati tidak lagi memiliki markas yang menjadi pusat kegiatan yang merupakan lambang perlawanan mereka terhadap kubu

⁷² Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 32.

⁷³ Putut Trihusodo, "Setelah Serangan Pagi di Markas PDI", dalam *Gatra*, No. 38 Vol. II Edisi 3 Agustus 1996, hlm. 22-24.

⁷⁴ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 32.

Soerjadi. Penggusuran Megawati oleh Soerjadi semakin lengkap dengan ditolaknya Daftar Caleg Sementara (DCS) PDI Megawati oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU).⁷⁵

Meskipun pihaknya dituduh sebagai terdakwa dan tergusur dari kepemimpinan legal PDI tidak membuat Megawati berhenti menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-haknya dan para pendukungnya. Bahkan pamor Megawati dalam dunia politik tidak menjadi surut karena insiden 27 Juli 1996 tersebut. Justru pamor Megawati semakin meningkat dan banyak simpatisan dari berbagai penjurur di tanah air yang mendukung perjuangan Megawati dalam mencari keadilan dan tegaknya demokrasi di Indonesia.

Tampak bahwa pemerintah gagal dalam menyingkirkan Megawati, bahkan meleset dari apa yang telah mereka perkirakan sebelumnya. Sebab setelah insiden 27 Juli 1996 dan menjatuhkan tuduhan terhadap kubu Mega atas terjadinya insiden tersebut mereka berharap Megawati akan kehilangan pamor dan tersingkir dari kancah politik nasional. Ternyata justru membuat pamor Megawati semakin melambung.

Bagi Megawati dan para pendukungnya, tergusurnya kepemimpinan Megawati dan diambilalihnya kantor DPP PDI pimpinan Megawati berarti memulai babak baru perjuangan panjang PDI Perjuangan untuk mendapatkan kembali pengakuannya sebagai pemimpin dan partai yang sah.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

C. Hikmah Dari “Insiden Sabtu Kelabu” 27 Juli 1996 Bagi Karier Politik Megawati Soekarnoputri.

Dalam setiap konsep kehidupan manusia selalu mengalami berbagai liku-liku kehidupan untuk mencapai suatu kesuksesan. Setiap kegagalan dan pengalaman pahit yang dialami setiap manusia pasti ada hikmahnya. Demikian halnya dengan Tragedi 27 Juli 1996 yang menimpa perjalanan karier Megawati dan para pendukungnya, dimana peristiwa tersebut menorehkan luka yang teramat perih. Namun di balik semua peristiwa tersebut ada hikmah dan berkah yang diperoleh oleh Megawati bagi perjalanan kariernya dalam politik.⁷⁶

Jika diruntut dari depan sebelumnya terjadi Insiden Sabtu kelabu 27 Juli 1996 ini berawal dari Kongres IV di Medan pada tahun 1993. Dalam kongres tersebut Soerjadi gagal terpilih sebagai ketua Umum DPP PDI sampai akhirnya muncul nama Megawati Soekarnoputri dalam daftar nama calon Ketua Umum DPP PDI. Kongres Medan 1993 yang mengalami kemacetan tersebut kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya KLB Surabaya pada bulan Desember 1993. dalam KLB tersebut menghasilkan keputusan bahwa Megawati secara *de facto* menyatakan dirinya sebagai ketua Umum DPP PDI untuk periode 1993-1998. Kepemimpinan Megawati kemudian dikukuhkan dan disahkan dan diakui oleh pemerintah berdasarkan asas legalitas pada Munas PDI tahun 1993 di Jakarta.⁷⁷

Peristiwa tersebut merupakan puncak dari segala konflik yang menghantam Megawati dan disertai kebrutalan dengan menyerbu kantor DPP PDI di JL. Diponegoro, Jakarta Pusat sehingga banyak menjatuhkan korban dari PDI

⁷⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 24.

⁷⁷ Andi Setiono, *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa di Indonesia*, Terawang Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 8-12.

pimpinan Megawati yang kemudian meluas ke berbagai daerah di Ibukota. Ironisnya setelah peristiwa tersebut justru massa PDI pro Mega-lah yang menjadi terdakwa dan dipersalahkan oleh penguasa Orde Baru padahal merekalah korban kebrutalan tersebut.⁷⁸

Namun tidak selamanya mendung itu kelabu. Sebab meski kubunya menjadi korban dan ia juga tersingkir dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PDI secara legal menurut versi pemerintah karena Soerjadi telah terpilih kembali melalui kongres Medan yang dianggap sah dan legal. Bukan berarti Megawati menjadi tidak berdaya tetapi ia tetap kokoh pada pendiriannya bahwa ia tetap Ketua Umum PDI yang sah dan terus berjuang demi keadilan dan tegaknya demokrasi di Indonesia. Megawati selalu menghadapi tekanan-tekanan dan kesewenang-wenangan penguasa dengan kepala dingin. Ia tidak bersikap frontal maupun melakukan perlawanan secara kasar.⁷⁹

Oleh karena sikapnya yang dingin dan tidak frontal itulah yang memberikan berkah bagi Megawati dan karier politiknya. Mega pun membangkitkan semangat para pendukungnya: "Jangan buang air matamu sia-sia. Kita akan melawan hak kita dan air mata itu tidak akan memberikan apa-apa."⁸⁰ Sikapnya yang dingin dan tenang dalam menghadapi badai politik yang terus menerus bahkan sampai pada puncaknya membuat Mega mendapatkan perhatian dan simpati yang semakin besar. Dukungan publik yang loyal dan fanatik semakin

⁷⁸ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 126.

⁷⁹ Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 225.

⁸⁰ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 24.

menguatkan posisi Megawati dalam perjalanan karier politiknya. Bahkan dukungan dari berbagai elemen kekuatan sosial semakin meningkat.⁸¹

Kekerasan demi kekerasan yang dialami Megawati memang merupakan upaya yang direncanakan oleh lawan-lawan politiknya yang ingin menyingkirkannya. Semakin keras perlawanan yang datang dan menghantamnya maka membuat Mega semakin dalam menancapkan kariernya dalam politik nasional. Maka semakin mantap pula posisi Mega sebagai simbol perlawanan terhadap kediktatoran.⁸² Peristiwa 27 Juli 1996 memang menimbulkan banyak kerugian bagi kubu Megawati dan membuatnya kehilangan salah satu simbol yang dapat digunakan sebagai penopang kiprah perjuangannya.⁸³

D. Pemilu 1997 : Megawati Soekarnoputri Menentukan Sikap Golput.

Berbagai upaya penjegalan untuk menghadang langkah Megawati dalam memimpin PDI terus saja dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pihak intern dalam partai maupun ektern partai yang datang dari pemerintahan Orde Baru. Bagi pemerintahan Soeharto munculnya Megawati dalam kancah politik nasional merupakan ancaman bagi pemerintahan Orde Baru akan bangkitnya Soekarnoisme. Upaya penjegalan terus saja dilakukan hingga Megawati tersingkir dari kepemimpinan PDI bahkan upaya tersebut terus dilakukan sejak Megawati secara *de facto* terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI sampai pada akhirnya terjadi tragedi berdarah 27 Juli 1996 yang menimpa PDI kubu Megawati. PDI

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 57.

Mega yang menjadi korban justru dituduh sebagai pelaku dan penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Sejak terjadinya tragedi 27 Juli tersebut Megawati bukan lagi milik PDI dalam artian PDI Soerjadi. Pendukung Megawati dalam kancah politik nasional semakin banyak. Para pendukungnya datang dari berbagai pihak yang tidak hanya sebatas konstituen tradisional saja dari golongan nasionalis, abangan, dan non muslim. Beratnya penderitaan yang ia alami dan kegigihan yang ia tunjukkan dalam menuntut hak-hak politik menjadi suatu magnet penarik massa yang sangat efektif. Setelah insiden 27 Juli tersebut Megawati menjelma sebagai simbol gerakan protes massa terhadap kecongkakan penguasa pada saat itu. Simbol perlawanan kepada kekuasaan yang respektif ini semakin melekat erat pada diri Megawati Soekarnoputri. Perlawanan itu tampak pada saat menjelang pemilu 1997 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru. Sebab pada saat akan dilaksanakannya Pemilu 1997 tersebut dalam tubuh PDI terjadi ambiguitas kepemimpinan yang disebabkan oleh kongres Medan pada 20-23 Juni 1996.

Pada saat pemerintah akan menggelar pemilu sempat muncul polemik tentang PDI dari kubu mana yang akan menjadi kontestan dalam pemilu tersebut. Apakah itu PDI pimpinan Megawati yang mendapat dukungan dari arus bawah tetapi tidak diakui oleh pemerintah ataukah PDI pimpinan Soerjadi yang mendapat dukungan dari pemerintah dan dianggap kepemimpinan yang sah dan legal. Hal tersebut sempat menimbulkan kebingungan karena diantara dua kubu PDI merasa bahwa PDI pimpinannya lah yang berhak maju sebagai kontestan dan

mewakili parli berlambang kepala banteng tersebut dalam pemilu 1997.⁸⁴ Tetapi sudah dapat diduga oleh berbagai pihak terutama oleh PDI pimpinan Megawati bahwa pemerintah hanya akan mengakui PDI Soerjadi yang sah dan legal serta demokratis menurut pemerintah sehingga tentu saja PDI pimpinan Soerjadi-lah yang akan maju menjadi kontestan dalam pemilu 1997. Sedangkan bagi pemerintah Orde Baru, kepemimpinan Megawati dalam PDI bukanlah kepemimpinan yang sah dan konstitusional. Selain itu kebesaran nama Megawati dalam kancah politik nasional bukanlah hal yang menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan pemerintahan Orde Baru.

Dengan tidak diikutsertakannya PDI pimpinan Megawati dalam Pemilu 1997 dan dilakukannya berbagai kecurangan lainnya untuk menyingkirkan Megawati sejak dimulainya proses pemilu sampai pada terjadinya insiden 27 Juli 1996 yakni pembabatan terhadap kelompok pro demokrasi seperti perebutan posko PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu 1997 adalah pemilu yang penuh dengan kecurangan dan kebobrokan demokrasi di Indonesia.⁸⁵ Pemboikotan terhadap Pemilu 1997 tidak hanya dilakukan oleh Megawati yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tersebut. Tetapi pemboikotan tersebut juga dilakukan oleh partai lain yakni PRD dari masing-masing komite Pimpinan Kota-PRD di berbagai daerah di Indonesia secara serentak. Seperti Jabotabek, Lampung, Medan, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya,

⁸⁴ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 29.

⁸⁵ Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat Demokratik, *Siaran Pers: Aksi corat-Coret (Graffiti Action) dan Penempelan Poster Boikot Pemilu 1997*, dalam <http://www.xs4all.nl/~peace/arc/arceng/state/stprdf3.html>.

Palu, dan Manado. Aksi pemboikotan tersebut dilakukan dengan melakukan corat-corek (*grafitty action*) dan penempelan poster yang berisikan tentang ajakan boikot pemilu 1997.⁸⁶

Pemerintah yang tidak mengikutsertakan PDI Megawati dalam Pemilu 1997 membuat Megawati harus menentukan sikap politiknya. Sebab jika PDI pimpinannya tidak diakui dan tidak terpilih menjadi kontestan dalam pemilu 1997 maka tidak mungkin Mega memberikan suaranya kepada PDI Soerjadi dan menganjurkan kepada para pendukungnya untuk menyalurkan aspirasinya pada PDI Soerjadi. Sedangkan para pendukungnya sendiri menganggap bahwa kepemimpinan Soerjadi dalam PDI tidak sah dan bagi mereka Soerjadi merupakan orang yang menjarah kedudukan Megawati sebagai pemimpin PDI melalui cara yang curang.⁸⁷ Mereka memilih menunggu kepastian sikap politik yang akan diambil oleh Megawati karena mereka tidak mungkin menyalurkan suaranya dan memilih Megawati dalam Pemilu 1997 sebab Megawati bukanlah kontestan dalam pemilu tersebut.

Mengetahui kebingungan yang dialami oleh para pendukungnya kepada siapa akan menyalurkan aspirasinya dan memberikan suaranya. Maka Megawati akhirnya menentukan sikap politiknya dan dengan tegas memutuskan bahwa ia tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1997. Dalam artian bahwa ia memutuskan untuk golput. Keputusan tersebut ia ucapkan dalam pesan harian pada tanggal 22 Mei 1997 didepan para pendukungan satu minggu sebelum

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 29.

pelaksanaan pemilu di rumah kediamannya Kebagusan Jakarta Selatan.⁸⁸ Pada saat membacakan keputusannya tersebut Megawati mengenakan pakaian putih-putih sebagai simbol dari golongan putih alias golput.⁸⁹

Megawati dengan lantang menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 29 Mei 1997. Pernyataan Megawati disambut gembira oleh para pendukungnya, meskipun dalam menyatakan sikapnya tersebut Megawati tidak mengajak para pendukungnya untuk mengikuti langkah yang telah ia ambil. Sikap Megawati tersebut diartikan sebagai pemboikotan oleh para pendukungnya dan para simpatisan. Kemudian bagi para pendukung PDI Megawati, memilih PDI Soerjadi dalam pemilu 1997 berarti tidak sah secara konstitusional. Hal tersebut telah ditegaskan dan ditekankan oleh Megawati saat ia berpidato dalam menentukan sikapnya.⁹⁰

Adanya sikap politik yang dipilih oleh Megawati untuk golput semakin menunjukkan bahwa dirinya sebagai simbol perlawanan politik yang selama ini telah melakukan berbagai intimidasi, manipulasi dan ketidakadilan terhadap dirinya. Sikap politik tersebut menimbulkan dampak yang luas dalam pemilu 1997. Dampak tersebut sangat dirasakan oleh PDI pimpinan Soerjadi, sebab dengan tidak adanya Megawati mendukung setiap kampanye PDI dalam Pemilu 1997 dapat berimbas pada perolehan suara yang akan diperoleh oleh PDI pimpinan Soerjadi yang sudah dapat dipastikan akan mengalami kemerosotan

⁸⁸ Oka Kusunayudha, *op. cit.*, hlm. 55. Sumarno, *op. cit.*, hlm. 29.

⁸⁹ Sumarno, *Ibid.*

⁹⁰ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 55.

secara drastis. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh PDI Soerjadi yang telah bertindak tidak adil terhadap Megawati.

Dalam Pemilu 1997 PDI Soerjadi suara yang diperoleh oleh PDI Soerjadi hanyalah 3,06 % atau 3,43 suara dari 124,7 juta suara pemilih artinya PDI Soerjadi hanya memperoleh 11 kursi dalam DPR-RI. Jadi jika dibandingkan dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya PDI Soerjadi kehilangan 45 kursi dalam DPR-RI dari pemilu sebelumnya pada tahun 1992 yang memperoleh 56 kursi dalam DPR-RI pada saat Megawati masih aktif dalam PDI pimpinan Soerjadi.⁹¹

Perolehan suara tersebut sangat jauh berada pada perolehan pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 1987 PDI Soerjadi memperoleh 10,87% suara dan pada Pemilu 1992 memperoleh 14,87% suara.⁹² Pada saat Megawati memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1997 alias golput membuat PDI pimpinan Soerjadi turun drastis dalam memperoleh suara. Sikap Mega ini memberikan keberuntungan bagi partai lain yakni PPP. Karena itu dengan adanya keputusan tersebut memunculkan fenomena yang menguntungkan perolehan suara PPP yakni munculnya aliansi Mega-Bintang.

Dibentuknya aliansi Mega-Bintang ini menurut Tomo Ngadimo salah satu tokoh PDI-Perjuangan mempunyai empat tujuan. Keempat tujuan tersebut adalah: (1) untuk menjaga citra Megawati sebagai figur yang memperjuangkan nasib rakyat kecil dan lambang demokratisasi di Indonesia; (2) untuk memberikan jawaban terhadap upaya-upaya penyumbatan saluran politik yang dilakukan oleh penguasa; (3) untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan kehidupan politik melalui

⁹¹ *Ibid*, hlm. 56.

⁹² Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31.

berbagai perubahan menuju tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis; dan (4) menghindari kemungkinan massa PDI Perjuangan terpecah-belah dan menjadi rebutan baik oleh Golkar maupun PDI-Soerjadi.⁹³ Sedangkan alasan PDI-Perjuangan melakukan aliansi dengan PPP adalah: (1) PDI dan PPP tidak pernah mempunyai pengalaman konflik, apalagi yang melibatkan bentrokan fisik sebagaimana yang terjadi antara massa PDI dan massa Golkar; (2) PPP di Surakarta Cabang Surakarta di bawah kepemimpinan Mudrik dipandang memiliki kesamaan dasar perjuangan dan wawasan politik dengan PDI, sebagaimana ditunjukkan melalui perhatiannya pada nasib rakyat kecil dan upaya-upaya demokratisasi.⁹⁴

Aliansi Mega-Bintang ini dibentuk oleh massa pendukung PDI-Megawati yang dipimpin oleh Tomo Ngadimo dan massa pendukung PPP yang dipimpin oleh Mudrik melalui suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang aliansi Mega-Bintang dan menghasilkan tiga kesepakatan. Ketiga kesepakatan tersebut adalah: Pertama, massa PDI pro-Mega akan mendukung PPP dalam kampanye; Kedua, PPP akan mengumumkan pencalonan Megawati sebagai presiden; dan, Ketiga, dukungan PDI pro-Mega dapat ditarik kembali sewaktu-waktu jika PPP tidak lagi konsisten memperjuangkan hak-hak asasi manusia, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan nasib rakyat banyak.⁹⁵

Terbentuknya aliansi Mega-Bintang, jika dilihat dari hasil kesepakatannya hanya bersifat sementara. Secara khusus aliansi ini lebih bersifat jangka pendek

⁹³ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 38.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 39

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 40.

untuk kepentingan kampanye dan Pemilu 1997. Aliansi ini bahkan dalam pembentukannya tidak secara resmi melibatkan kepengurusan DPC PDI Perjuangan, karena itu aliansi ini hanyalah bersifat fungsional. Tema dari aliansi PDI-Perjuangan meliputi tujuh persoalan pokok, yaitu: (1) Kepentingan Rakyat Banyak; (2) Demokrasi; (3) Persatuan dan Kesatuan; (4) Hak Azasi Manusia; (5) Dwi Fungsi ABRI; (6) Kesenjangan Sosial; (7) Pembangunan Nasional.⁹⁶ Sedangkan yang menjadi tema perjuangan PDI-Perjuangan untuk diangkat oleh Mega-Bintang, yaitu: (1) hak-hak asasi manusia; (2) keadilan hukum; (3) keadilan ekonomi; (4) penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; (5) pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil; serta (6) keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak. Tema-tema tersebut kemudian dimunculkan dalam kampanye dan dalam kegiatan lainnya.

Munculnya aliansi Mega-Bintang ini semakin menyulitkan dan menggelisahkan para elite politik Golongan Karya dan pemerintahan Orde Baru yang mengharapkan akan memperoleh hasil yang besar dari kemelut PDI yang juga ikut diciptakannya.⁹⁷ Aliansi Mega-Bintang ini pertama kali muncul di Solo yang secara sengaja sejumlah besar massa pro Mega mendatangi kantor DPC PPP untuk menitipkan suaranya pada PPP dan dengan cepat merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Spanduk-spanduk yang menunjukkan aliansi Mega-Bintang pun muncul di berbagai tempat. Namun perjalanan koalisi Mega-Bintang tidak berlangsung lama karena pemerintah mulai memunculkan larangan-larangan terhadap aliansi Mega-Bintang yang tidak sampai menimbulkan kekerasan. Meski

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 48.

⁹⁷ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 106.

terjadi larangan-larangan tentang penggunaan simbol aliansi Mega-Bintang, tidak membuat penggunaan simbol langsung hilang begitu saja, karena masih banyak sisa-sisa dari pendukung aliansi Mega-Bintang yang terus melakukan perlawanan politik terhadap kekuasaan dan kediktatoran pemerintahan Orde Baru.⁹⁸

Tindakan DPP Megawati yang lebih memilih untuk memperkarakan keabsahan tindakan Soerjadi dan kawan-kawannya sebagai pelaku kongres Medan ke meja hijau atau pengadilan dari pada memperkarakan campur tangan pemerintah dalam PDI. Tindakan tersebut didasari oleh pertimbangan yang berdasarkan pada realitas politik. Sebab sudah dapat dipastikan bahwa dalam pemerintahan Orde Baru pengadilan tidak mungkin menjatuhkan keputusan bahwa pemerintah bersalah atas campur tangannya dalam PDI. Tetapi DPP Megawati juga tidak ingin dituduh telah menggagalkan pembangunan nasional karena telah menyita waktu dan perhatian pemerintah atas perkara tersebut. Sebab upaya dan proses pengadilan itu juga untuk menegakkan konstitusi partai dan menggalang dukungan dan kohesi partai.⁹⁹ Hal tersebut jugalah yang mendasari Megawati mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1997.

E. Pengakuan Pemerintah Terhadap Partai Demokrasi Indonesia Pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Setelah mengalami berbagai tekanan dalam perjalanan kariernya baik itu dari pihak intern PDI maupun ektern terutama yang datang dari pemerintahan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 61.

Orde Baru membuat Megawati semakin mantap menjejak langkahnya dalam karier politik. Bahkan ketika terjadi Insiden Sabtu Kelabu pada 27 juli 1996 tidak membuat Megawati menjadi orang yang lemah dan gampang menyerah. Meskipun pada peristiwa tersebut sebagai korban kubu Megawati tidak memperoleh keadilan justru pihaknya dituduh sebagai terdakwa ang menyebabkan insiden tersebut sehingga jatuh banyak korban jiwa.

Pecahnya insiden 27 juli 1996 tersebut memang berawal dari adanya Kongres Medan yang dilaksanakan oleh pihak Soerjadi atas dukungan pemerintah untuk menyingkirkan Megawati. Pada saat pemerintah akan mengadakan pemilu 1997 PDI telah pecah menjadi dua kubu yakni PDI Soerjadi yang mendapatkan dukungan pemerintah dan PDI Megawati yang didukung oleh arus bawah. Kemudian konflik berlanjut dengan penyerangan terhadap kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat. Oleh pemerintah PDI pimpinan Megawati tidak diikutsertakan dalam pemilu 1997 karena setelah terpilihnya soerjadi menjadi pemimpin PDI yang diakui secara legalitas. Kemudian kepemimpinan Megawati yang beberapa tahun sebelumnya diakui berdasar pada asas legalitas menjadi tidak diakui oleh pemerintah dan kepemimpinannya dianggap tidak sah.

Keadaan menjadi berubah setelah dilaksanakannya pemilu 1997 dan setelah Sidang Paripurna X SU MPR pada 10 Maret 1998 yang menghasilkan keputusan untuk menetapkan kembali Soeharto sebagai Presiden RI atau Mandataris MPR untuk keenam kalinya periode 1998-2003.¹⁰⁰ Kemudian MPR mensahkan Soeharto sebagi Presiden RI, kemudian pada tanggal 14 Maret

¹⁰⁰ Mohammad Thoyibi, *op. cit.*, hlm. 64.

1998 Soeharto mengumumkan nama-nama yang duduk dalam kabinet sekaligus jabatannya masing-masing. Kabinet tersebut terdiri dari empat menko, 20 menteri departemen, 10 menteri dan 2 pejabat tinggi setingkat menteri di Istana Negara.¹⁰¹

Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden dan terbentuknya susunan Kabinet Pembangunan IV melahirkan gelombang protes besar mahasiswa yang sekaligus merupakan titik tolak pergeseran tema dan pola demonstrasi mahasiswa. Pada demonstrasi-demonstrasi sebelumnya mahasiswa terpatok pada tema tuntutan penyelesaian atas krisis ekonomi yang telah terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pelaksanaan demo juga hanya dilakukan di lingkungan kampus saja. Namun sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan IV para mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Tema demonstrasi berubah menjadi ketidakpercayaan pada sejumlah anggota kabinet yang diragukan kecakapan, integritas kepribadian, dan keberpihakannya pada rakyat.¹⁰²

Turunnya mahasiswa-mahasiswa ke jalan menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Gerakan turun ke jalan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dinamakan sebagai gerakan reformasi, suatu gerakan yang menuntut adanya perubahan dalam pemerintahan. Tanggal 12 Mei 1998 merupakan puncak perjuangan dari gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana dalam gerakan reformasi tersebut empat orang mahasiswa dari Universitas Trisakti tertembak mati oleh aparat keamanan.

Peristiwa penembakan terhadap empat mahasiswa Tri Sakti tersebut kemudian dikenal dengan Insiden Trisakti. Kejadian tersebut menyulut kemarahan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 65.

masyarakat yang mendukung gerakan moral mahasiswa, sehingga menyebabkan kerusuhan dan aksi pembakaran terjadi diseluruh Jakarta. Massa beramai-ramai turun di jalan merusak, dan membakar pertokoan serta menjarah barang-barang dagangan. Mereka juga merusak dan membakar kantor-kantor bank, gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Hal serupa juga terjadi di Solo, dimana massa mengamuk dan melakukan pengrusakan.¹⁰³ Tuntutan gerakan moral mahasiswa yang kemudian disebut dengan gerakan reformasi tersebut semakin bulat, yaitu reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum meski tuntutan tersebut masih bersifat jangka pendek. Dalam tuntutan tersebut yang menjadi target jangka pendek adalah 1) Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden atau mandataris MPR; 2) Keluarga Soeharto yang menjadi anggota MPR mundur dari keanggotaan MPR; 3) MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memilih presiden atau mandataris MPR yang baru.¹⁰⁴

Dalam aksi *Longmarch* yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas se-jabotabek berhasil menduduki gedung DPR/MPR pada 19 Mei 1998 dan secara bergantian mereka melakukan orasi menuntut agar MPR melakukan Sidang Istimewa dan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto lengser alias mengundurkan diri dari jabatan presiden dan disambut dengan sorak kemenangan oleh para mahasiswa. Kemudian Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie dilantik sebagai presiden.¹⁰⁵ Munculnya gerakan reformasi itu merupakan jalan

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁰⁵ Wolas Krenak, *PDI-P Jangan Sampai "Terbonsai" Akibat Konflik, Utamakan Kepentingan Rakyat*, dalam <http://www.suarapembaharuan.com/News/2000/09/11/Nasional/na02/na02.html>.

bagi Megawati untuk terus maju dan bangkit memperjuangkan hak-haknya terutama tuntutan dan aspirasi rakyat pendukungnya. Lengsernya Soeharto yang ditandai dengan pernyataan pengunduran diri oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia setelah selama tiga dasa warsa lebih ia memegang jabatan tersebut.¹⁰⁶

Pengunduran diri Soeharto menandakan bahwa kekuasaan Orde Baru semakin surut dan kondisi partai golongan karya berada pada “*status quo*”. Selain itu lengsernya Soeharto merupakan suatu titik terang bagi karier politik Megawati, sebab dengan semakin surutnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru maka semakin memperingan penderitaan politik yang selama ini dideritanya bersama para pendukungnya.¹⁰⁷

Perjalanan karier politik Megawati semakin membaik serta membawa keberuntungan bagi Megawati dan para pendukungnya. PDI yang merupakan pecahan dari PDI Soerjadi semakin memperoleh jalan untuk terus bangkit dan berdiri ketika Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Sebab dilantiknya Habibie sebagai presiden menggantikan pemerintahan Soeharto telah memberikan peluang besar bagi PDI pimpinan Megawati karena pemerintahan B.J. Habibie telah membuka jalan selebar-lebarnya kehidupan politik nasional bagi orang-orang maupun seluruh komponen masyarakat untuk mendirikan partai yang sesuai dengan aspirasi ideologisnya.¹⁰⁸ Dalam kepemimpinan Presiden BJ. Habibie terjadi perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

¹⁰⁶ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁰⁷ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31,

¹⁰⁸ *Ibid.*

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap warga negara dapat mendirikan partai politik. Pada saat itulah keberadaan PDI-Perjuangan pimpinan Megawati diakui oleh pemerintah.¹⁰⁹

Runtuhnya rezim Soeharto dianggap sebagai kemenangan bagi para pendukung Megawati. Sebab pada saat rezim Soeharto masih memerintah negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada kebebasan bagi Megawati dan para pendukungnya dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap gerak gerik mereka selalu diawasi dan dihalang-halangi oleh pemerintahan Orde Baru karena dianggap sebagai suatu ancaman akan munculnya kembali Soekarnoisme. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan merupakan saat-saat bagi Megawati untuk membawa partainya menuju puncak demokrasi.

Pada pemerintahan B.J. Habibie, Megawati memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kongres di Bali. Namun ternyata sebelum memberikan ijin kepada Megawati, Presiden Habibie juga memberikan ijin kepada PDI Soerjadi untuk menyelenggarakan Kongres V PDI di Palu, Sulawesi Tengah pada bulan Agustus 1998. Melalui kongres tersebut menghasilkan keputusan bahwa Budi Hardjono terpilih sebagai ketua Umum DPP PDI menggantikan Soerjadi.¹¹⁰ Sedangkan PDI Megawati menggelar Kongres V PDI di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998.¹¹¹ Kongres tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar yang diikuti oleh 1023 orang yang terdiri dari 906 utusan dari 302 DPC, 81 orang mewakili 27 DPD, 10 orang DPP dan 22 orang Litbang PDI serta empat

¹⁰⁹ Wolas Krenak, *op. cit.*, dalam

<http://www.suarapembaharuan.com/News/2000/09/11/Nasional/na02/na02.html>.

¹¹⁰ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 57. baca juga Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 196.

¹¹¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31.



deklarator.¹¹² Kongres tersebut sebelumnya dengan deklarasi nama PDI-Perjuangan di Stadium Utama Senayan Jakarta.¹¹³ Sebelumnya Presiden Habibie ragu dalam memberikan ijin kepada PDI Megawati untuk menyelenggarakan kongres seperti halnya dengan PDI Soerjadi yang juga sempat tidak memperoleh ijin karena keragu-raguan Presiden Habibie. Namun atas desakan arus reformasi yang semakin kuat dan kegigihan Megawati yang bersikokoh untuk menyelenggarakan Kongres V PDI pimpinannya di Sanur, Bali maka akhirnya pemerintah memberikan ijin tersebut.

Pemerintah yang sempat mengalami keragu-raguan dalam memberikan ijin kepada kedua PDI tersebut untuk menggelar kongres menunjukkan bahwa pemerintahan B.J Habibie tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Sebab Habibie sendiri juga merupakan orang bentukan dari partai Golongan Karya dan rezim Orde Baru. Dengan memberikan ijin menyelenggarakan kongres kepada dua PDI juga menunjukkan bahwa pemerintahan Habibie tetap melanggengkan adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDI seperti halnya pada saat pemerintahan Soeharto yang dapat dikatakan ikut menciptakan keambiguan kepemimpinan dalam PDI.

Meski demikian kedua PDI tersebut tetap menyelenggarakan kongresnya masing-masing. PDI Megawati yang menyelenggarakan kongres V di Bali menjelang pelaksanaan kongres datang para simpatisan dan pendukung Megawati yang terus mengalir di tempat dilaksanakannya kongres. Penyelenggaraan kongres

¹¹² Andi Setiono, *op. cit.*, hlm. 15.

¹¹³ Wolas Krenak, *op. cit.*, dalam <http://www.suarapembaharuan.com/News/2000/09/11/Nasional/na02/na02.html>.

PDI pimpinan Megawati di Bali membuat Pulau Dewata bagaikan lautan merah yang mengelu-elukan nama Megawati Soekarnoputri dengan berbagai yel-yel dan spanduk. Dukungan pun tidak hanya datang dari arus bawah, tetapi juga datang dari golongan elite, para jendral purnawirawan ABRI.¹¹⁴ Orang-orang dari partai Golongan Karya yang banyak berhibah ke partai PDI pimpinan Megawati yang nantinya dikenal dengan PDI-Perjuangan sesuai dengan jalan perjuangan yang ditempuh Mega dan para pendukungnya dalam mewujudkan terbentuknya partai tersebut. Oleh karena itu munculnya tokoh-tokoh militer dan orang-orang dari partai Golkar sempat menimbulkan kecurigaan dan perdebatan dalam tubuh PDI-Perjuangan.

Tujuan diselenggarakannya Kongres V PDI di Bali tersebut adalah untuk membicarakan calon ketua umum, calon presiden, dan formatur tunggal yang dipegang oleh Megawati. Sebelumnya formatur tersebut dipegang oleh empat orang. Formatur tunggal tersebut dipilih dengan tujuan untuk menghindari terjadinya rekayasa pengurus partai dalam DPP PDI Perjuangan.¹¹⁵ Sebab seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dalam tubuh PDI terdapat orang-orang dari Orde Baru yang berhibah ke PDI Perjuangan, seperti Theo Syafei, dan Sembiring Meliala. Untuk itu formatur yang digunakan adalah formatur tunggal dan langsung dipegang oleh Megawati dengan harapan PDI pimpinan Megawati tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah.

Keputusan hasil kongres PDI di Bali tersebut menunjukkan bahwa Megawati tetap eksis bahkan pendukungnya semakin besar. Megawati juga tetap

¹¹⁴ Mukhlisin dan Damarhudha, *op. cit.*, hlm. 196.

¹¹⁵ Andi Setiono, *op. cit.*, hlm. 16.

terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Alex Litaay sebagai sekjen PDI. Keputusan lain yang menunjukkan kebesaran Megawati dalam kancah politik nasional adalah Megawati ditetapkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang harus diperjuangkan dengan keras dalam Pemilu 1999 dan Sidang umum MPR 1999.¹¹⁶ Keputusan kongres tersebut semakin memperkuat posisi Megawati dalam kancah politik nasional kontemporer. Kongres juga memutuskan memberikan patokan bahwa PDI Perjuangan akan memperoleh 55% suara dalam Pemilu 1999 atau 200 kursi dalam lembaga perwakilan rakyat.¹¹⁷

F. Megawati Soekarnoputri : Kemenangan Mayoritas PDI Perjuangan Dalam Pemilu 1999.

Berbagai ujian telah Megawati lalui untuk mencapai puncak pimpinan partai. Selama masa pemerintahan rezim Orde Baru setiap langkah Megawati selalu mengalami hambatan yang datang dari berbagai pihak baik itu dari dalam tubuh PDI maupun dari pihak luar terutama pemerintah. Sebab selama itu segala hal yang ada dalam tubuh PDI sebagian besar merupakan “campur tangan” dan “rekayasa” pemerintah. Pada saat terjadi tragedi 27 Juli 1996 yang dikenal dengan sebutan “Insiden Sabtu Kelabu” bisa jadi merupakan rekayasa pemerintah sebagai sarana untuk menjegal langkah Megawati menuju puncak kariernya dalam dunia

¹¹⁶ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31. Lihat juga Nur Hidayah, *Kontroversi Presiden Wanita*, Pabelan, Jakarta, 1998, hlm. 19

¹¹⁷ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 58.

politik nasional. Tragedi 27 Juli 1996 memang merupakan klimaks dari konflik intern PDI dalam upaya untuk menyingkirkan Megawati.

Namun nasib berkata lain, karena dengan terjadinya insiden 27 Juli 1996 tersebut mengalir para simpatisan yang mendukung Megawati. Pada saat itu kantor tersebut dikuasai oleh Megawati dan para pendukungnya dan hendak diambilalih oleh pendukung-pendukung PDI Soerjadi. Dalam insiden 27 Juli 1996, telah banyak menjatuhkan korban terutama dari para pendukung pro Megawati. Tetapi dalam pengusutannya justru kubu Megawatilah yang menjadi korban dan dituduh sebagai terdakwa utama pelaku insiden tersebut. Meskipun para pendukungnya yang dituduh sebagai terdakwa dan korban tetapi hal tersebut tidak membuat langkah Mega menjadi surut. Setelah insiden tersebut Megawati justru semakin banyak pendukungnya terutama dari kalangan arus bawah. Mereka menjadi bersimpati terhadap kegigihan Megawati dalam mencari keadilan dan selalu bersikap dingin dalam menghadapi masalah tersebut.

Sungguh keberuntungan berada di pihak Megawati, karena meski menjadi korban sekaligus terdakwa dalam insiden 27 Juli 1996 dan tidak mendapatkan keadilan pada saat ia memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan, Mega tetap sabar dan tenang. Bahkan pada saat akan dilaksanakan Pemilu 1997 Megawati terhalang langkahnya karena kepemimpinannya dianggap tidak sah oleh pemerintahan Soeharto. Maka untuk menghadapi sikap politik pemerintah ia pun menjawab dengan mengambil sikap politik dan memutuskan untuk "Golput". Mega tidak akan memilih maupun mencoblos wakil dari partai manapun. Tindakannya tersebut juga diikuti oleh pendukung fanatiknya yang menyatakan setia terhadap kepemimpinan Mega. Sikap politik yang diambil Mega sangat

berdampak pada perolehan suara yang diperoleh oleh PDI pimpinan Soerjadi dalam Pemilu 1997 saat itu.

Tanpa adanya Megawati terjun dalam kampanye PDI pada Pemilu 1997 merupakan suatu pengembosan besar-besaran terhadap perolehan suara PDI Soerjadi. Akibatnya perolehan suara yang diperoleh oleh PDI Soerjadi dalam Pemilu 1997 merosot cukup tajam. Sebab jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana masih ada Megawati yang ikut berkampanye suara yang diperoleh PDI pada Pemilu 1997 jauh berada di bawahnya. Pada saat ada Megawati yang tampil dalam setiap kampanye PDI secara maksimal sebagai juru kampanye pemilu-pemilu sebelumnya yakni Pemilu 1987 dan 1992 PDI memperoleh peningkatan perolehan suara dan kursi dalam parlemen. PDI memperoleh suara 10,87 % pada Pemilu 1987, dan dalam Pemilu 1992 PDI memperoleh suara 14,89 %. Namun setelah Megawati tersingkir dari kepemimpinan setelah insiden 27 Juli 1996 sehingga Megawati mengambil keputusan Golput dalam Pemilu 1997, perolehan suara PDI terperosok sangat dalam. PDI Soerjadi hanya mendapatkan perolehan suara 3,05 %. Bahkan banyak para pendukung PDI yang mengalihkan suaranya kepada partai yang berlambang bintang yakni PPP, sehingga terbentuk aliansi Mega-Bintang.¹¹⁸ Hal tersebut memberikan keberuntungan bagi PPP karena perolehan suara partai tersebut dalam Pemilu 1997 mengalami peningkatan dan merupakan pukulan berat bagi PDI Soerjadi.

Nasib memang berkata lain karena ketika terjadi reformasi politik pada tahun 1998 yang menuntut Soeharto untuk turun dari kepresidenan. Hal tersebut

membuat pemerintahan rezim Orde Baru semakin ketakutan terhadap kekuatan PDI dan massa pendukungnya yang semakin besar. Bagi pemerintahan rezim Orde Baru, Megawati dan para pendukungnya merupakan suatu ancaman terhadap kekuasaannya. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk membendung arus reformasi oleh pemerintah.

Dengan adanya arus reformasi ini yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut lengsernya Soeharto. Hal tersebut membuat Megawati semakin terhindar dari penderitaan. Awan gelap yang telah sekian lama menggelayuti setiap langkah Megawati dalam dunia politik semakin sirna. Apalagi ketika kepemimpinan Soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada era pemerintahan B.J Habibie membuka selebar-lebarnya bagi setiap komponen masyarakat yang ingin mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya.¹¹⁹ Meskipun pemerintah B.J. Habibie tetap mengakui PDI Soerjadi yang kemudian menjadi PDI Budi Hardjono, tetapi pemerintah tidak lagi kuasa menahan PDI Megawati untuk maju dalam Pemilu 1999. Pada akhirnya pemerintah harus mengakui keberadaan PDI Megawati, bahwa Megawati adalah pemimpin dari partai politik yang mempunyai pendukung yang cukup besar. Perolehan suara PDI pimpinan Megawati bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendukung partai PDI pimpinan Budi Hardjono. Dengan dikeluarkannya ijin yang diberikan oleh pemerintah di mana Megawati dapat mengadakan kongres PDI di Bali

¹¹⁸ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 30.

¹¹⁹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31.

merupakan “kekalahan” pemerintah dalam menghadapi kekuatan PDI Megawati.¹²⁰

Kesempatan tersebut merupakan peluang besar bagi PDI Megawati dan para pendukungnya. Pada kongres V PDI di Bali yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Oktober 1998 membuat langkah Megawati mantap bersama PDI-Perjuangan. Dalam kongres tersebut salah satu keputusan terpentingnya adalah ditetapkannya Megawati sebagai calon presiden Republik Indonesia yang harus diperjuangkan dalam Pemilu 1999 dan SU MPR 1999.¹²¹ Dalam kesempatan di mana PDI Megawati memperoleh ijin menyelenggarakan kongres V PDI di Bali oleh pemerintah, maka sudah dapat dipastikan bahwa partai yang dipimpin oleh Megawati akan menjadi salah satu kontestan diantara partai-partai kontestan lain dalam pemilu berikutnya Pemilu 1999.¹²²

Keputusan kongres semakin memperteguh posisi Megawati dalam percaturan politik Indonesia kontemporer. Pamor partai yang berada di bawah pimpinannya (PDI-P) juga semakin berkibar di tengah-tengah eforia rakyat yang tengah menikmati kemenangan dan kebebasan dari segala bentuk pemasungan politik sampai pada akhirnya pilar-pilar kekuasaan Presiden Soeharto runtuh oleh gerakan reformasi yang digerakan oleh mahasiswa.¹²³

PDI pimpinan Megawati atau PDI-Perjuangan dulunya dikenal sebagai “partai gurem”. Sebab dalam setiap konflik dalam tubuh PDI selalu ada campur tangan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu

¹²⁰ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 146.

¹²¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 31.

¹²² Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 146.

¹²³ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 32.

konflik selalu saja muncul bahkan tidak ada surut-surutnya. Bahkan kepemimpinannya tidak diakui oleh pemerintah. Setelah melalui perjuangan panjang PDI pimpinan Megawati mulai bangkit dan menampakkan dirinya sebagai partai yang mempunyai masa depan. Terutama dalam Pemilu 1999. Untuk menyongsong Pemilu 1999 dan agar massa mengenal dengan baik PDI yang dipimpinnya serta dapat membedakan antara PDI-Perjuangan dengan PDI pimpinan Budi Harjono yang menjadi seterunya maka ia memproklamkan berdirinya PDI-Perjuangan. Pada saat memproklamkan berdirinya PDI-Perjuangan, Mega juga menyampaikan apa yang menjadi perbedaan lambang antara PDI-Perjuangan dengan PDI Budi Hardjono. Selain itu proklamasi PDI-Perjuangan tersebut merupakan sarana untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan dari partai yang berlambangkan kepala banteng.¹²⁴

Popularitas PDI-Perjuangan semakin tampak dengan jelas selama kampanye Pemilu 1999 berlangsung. Di berbagai tempat di setiap penjuru kota dan seluruh jalan di Indonesia banyak didirikan posko-posko PDI dengan cat-cat yang warnanya sangat mencolok yakni merah dan hitam sebagai warna kebesarannya. Selain dengan warna-warna yang mencolok sebagai warna kebesaran, dalam setiap posko-posko PDI-Perjuangan juga terpampang dengan jelas gambar-gambar dan poster-poster Megawati Soekarnoputri dan almarhum Bung Karno dalam ukuran yang cukup besar. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa popularitas PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati ada di mana-mana dan dikenal oleh setiap massa pendukungnya yang sangat tampak selama kampanye

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 33.

Pemilu 1999 berlangsung. Pada kampanye Pemilu 1999 sebagian besar kota-kota di Indonesia bagaikan lautan merah. Warna yang merupakan warna kebanggaan PDI Perjuangan yang berlambang banteng gemuk bermoncong putih.

Nama Megawati dielu-elukan bagaikan seorang dewi. Sebab di mata para pendukungnya, Megawati dianggap bukan hanya sekedar pemimpin partai saja tetapi seolah-olah Mega sudah menjadi seorang presiden Republik Indonesia.¹²⁵ Di mata para pengagum fanatiknya Megawati merupakan figur pemimpin yang nyaris tanpa cela. Penampilannya yang kalem, murah senyum, keibuan, merakyat dan sedikit bicara dianggap sesuai untuk menjadi pemimpin dalam kondisi psikologi politik publik Indonesia yang menghargai kerendahan hati, ramah tamah dan sifat yang tidak suka menonjolkan diri sendiri.¹²⁶ Berbagai kritikan dan hujatan yang ditujukan kepadanya justru mengundang banyak simpati dari berbagai kalangan sehingga semakin memperbesar namanya di kancah politik nasional.

Melihat dari banyaknya pendukung yang cukup besar mendukung langkah Megawati dan PDI-Perjuangan pada Pemilu 1999, maka tidak sulit bagi partai pimpinan Megawati untuk masuk menjadi salah satu kontestan dalam Pemilu 1999. Pemilu bulan Juni 1999 tersebut merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa Orde Baru adalah pemilu yang sangat demokratis, tanpa dipengaruhi oleh tindakan kekerasan yang berarti, serta tanpa adanya penekanan dari salah satu kontestan yang dominan.¹²⁷ Meskipun demikian partai

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 61

¹²⁷ Tjuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa*, CV. Jakarta Cooperation, Jakarta, 2002, hlm. 187.

pimpinan Megawati harus tetap waspada dan bekerja keras agar dapat memenangkan perolehan suara dalam pemilu tersebut. Mengingat diantara PDI-P banyak partai-partai besar yang sudah mendapatkan pendukung yang pasti sehingga dapat diperkirakan akan memperoleh suara yang relatif besar pada Pemilu 1999. Partai-partai tersebut adalah PKB, dan PAN selain itu Golkar juga masih eksis dan tetap akan mendapatkan suara pendukung yang relatif besar meskipun setelah lengsernya Soeharto akan mengalami penurunan. Sementara PAN dan PKB merupakan partai-partai yang berbasis Islam dan sudah mempunyai pendukung yang relatif jelas. Warga yang sebagian besar warga Nahdatul Ulama (NU) dapat diperkirakan akan memilih PKB, sedangkan warga yang sebagian besar Muhammadiyah dapat diperkirakan akan memilih PAN.

Sementara PDI Perjuangan pimpinan Megawati meskipun mempunyai massa yang cukup besar dan telah dikenal di berbagai golongan tetapi PDI Perjuangan masih tergolong sebagai partai baru yang ikut dalam Pemilu 1999. Meskipun demikian mempunyai kesempatan untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilu tersebut. Setelah lengsernya Soeharto dari kepresidenan dan pemerintahan dipegang oleh B.J. Habibie banyak “pendukung baru” yang sebelumnya merupakan orang-orang dari partai Golkar maupu orang yang sebelumnya tidak berani memilih PDI beralih haluan menjadi pendukung PDI-P dalam pemilu. Para jendral purnawirawan bahkan ikut serta bergabung dalam PDI Perjuangan.¹²⁸ Hal tersebut membuat basis Megawati dan PDI-P menjadi semakin kuat dan memantapkan perjalanannya dalam karier politik nasional. Meski selama

¹²⁸ Cornelis Lay, *op. cit.*, hlm. 146.

melakukan perjalanan politik Megawati selalu dihadapkan oleh berbagai cobaan yang selalu menghalangi langkahnya dalam dunia politik. Masalah *gender* dan syariah Islam juga disinggung-singgung masih memperdebatkan tentang tidak atau diperbolehkannya seorang wanita menjadi presiden. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah Megawati dalam politik nasional.

Akhirnya Megawati bersama kawan-kawannya menuju Pemilu 1999 dengan tanda gambar baru yang berbeda dengan gambar PDI Budi Hardjono. Kemudian ia mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Kehakiman sebagai partai yang baru. Sebab menurut Undang-Undang baru tentang partai politik yang disetujui oleh DPR RI 28 Januari 1999 memang mengharuskan Megawati untuk membuka lembaran baru dalam memperjuangkan partainya. Salah satu pasalnya menyiratkan tentang tidak boleh ada tanda gambar yang sama dalam organisasi politik peserta pemilu.¹²⁹

Dalam Pemilu 1999, PDI Perjuangan partai pimpinan Megawati resmi terjun dalam kompetisi memperebutkan perolehan suara dan kursi parlemen dengan partai-partai lainnya. Baik itu partai-partai besar yang sudah lama eksis dalam pemilu maupun partai-partai kecil yang baru terbentuk, seperti halnya partai pimpinan Megawati PDI Perjuangan yang merupakan partai baru. Akan tetapi pada Pemilu 1999 tersebut PDI Perjuangan dapat digolongkan sebagai partai besar jika dilihat dari cukup besarnya massa yang mendukung PDI Perjuangan pada Pemilu 1999.

¹²⁹ Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm.64.

Partai-partai yang berkompetisi pada Pemilu 1999 bersama PDI Perjuangan pada Pemilu 1990 antara lain : Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Pekerja Nasional, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Musyawarah kekeluargaan Gotong Royong, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Pilihan Rakyat, Partai Ummat Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Republik, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Katolik Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Buruh Nasional, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Islam Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Daulat Rakyat, Partai Persatuan, Partai Abul Yatama, Partai Indonesia Baru, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Syariat Islam Indonesia 1905, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat Indonesia, Partai Golkar, Partai Rakyat Demokratik, dan Partai Uni Demokrasi Indonesia.¹³⁰

Pemilu yang diikuti oleh banyaknya peserta partai-partai politik tampaknya memang sudah menjadi milik Megawati meskipun ia harus bersaing keras. Terbukti bahwa dalam Pemilu 1999 seperti telah diduga sebelumnya PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang dengan perolehan yang sungguh luar biasa sebagai partai yang masih tergolong baru. Dalam pemilu yang diikuti oleh 47 partai politik lainnya PDIP berhasil memperoleh suara hampir mencapai 34 %

¹³⁰ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 30.

atau mencapai 153 kursi yang diperoleh dalam DPR.¹³¹ Dengan perolehan tersebut berarti PDI-P pimpinan Megawati telah menggeser posisi Partai Golkar yang selalu menduduki posisi utama perolehan suara dalam setiap pemilu selama 32 tahun sebelumnya. Namun pada akhirnya Partai Golkar turun pada posisi kedua dalam perolehan suara Pemilu 1999 dan harus berada dibawah perolehan suara PDIP.¹³² Kemenangan PDI bahkan telah mengungguli lawannya lima partai besar lainnya yaitu Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PK.¹³³

Suara yang diperoleh oleh PDIP memang tidak sesuai target yang ditetapkan pada saat kongres PDIP di Bali. Pada saat itu kongres PDIP membuat patokan bahwa PDIP akan mendapatkan 200 kursi di lembaga perwakilan rakyat. Namun perolehan suara PDIP dalam pemilu tersebut meski tidak mencapai pada patokan yang telah ditentukan sudah merupakan hal yang luar biasa baik bagi Megawati maupun bagi PDIP karena dengan kemenangan tersebut merupakan kemenangan bagi Megawati setelah bertahun-tahun selalu dihalang-halangi dalam meniti karier politiknya. Sementara pada Pemilu 1999 tersebut, meski telah dianggap sebagai partai yang tidak mempunyai tujuan atau dalam "*status quo*" setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan tetap saja Golkar merupakan partai yang tetap eksis dalam pemilu dan mendapatkan perolehan suara yang besar meski tidak menempati posisi pertama untuk pertama kalinya selama Pemilu. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 58 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 50 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN)

¹³¹ Sumarno, *op. cit.*, hlm. 34 dan 93.

¹³² *Ibid*, hlm. 93. Dan Oka kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 65

¹³³ Tjuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 187.

memperoleh 34 kursi, dan Partai Keadilan (PK) mendapatkan 7 kursi dalam lembaga perwakilan rakyat.¹³⁴

Setelah mengalami berbagai ujian dalam meniti karier politik sampai berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya Megawati dapat memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Kemenangan PDI Perjuangan berarti kemenangan pula bagi Megawati Soekarnoputri yang semakin mendekatkannya pada jabatan presiden.

Pemilu 1999 tersebut memang dimenangkan oleh PDI-Perjuangan. Namun kemenangan tersebut bukanlah kemenangan dengan suara mayoritas mutlak (*Single Majority*) tetapi merupakan mayoritas sederhana (*Simple Majority*).¹³⁵ Sebagai pemenang dalam pemilu dengan perolehan suara terbanyak bukan berarti langkah Megawati sebagai presiden dapat langsung terwujud, sebab pencalonannya sebagai presiden justru menimbulkan polemik bagi kalangan ulama dimana PDI keluar sebagai pemenang dan mengalahkan partai-partai yang berbasis Islam dan Golkar. Selain itu, jika kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999 menjadikan Megawati akan terpilih secara otomatis menjadi presiden dalam sidang umum MPR yang digelar setelah pemilu, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kelaziman demokrasi yang hanya melegitimasi kemenangan suatu partai di atas 50% atau yang mencapai "*Single Majority*" untuk dapat memimpin pemerintahan secara otomatis.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Sumarno, *Ibid.* hlm 34 dan 93.

¹³⁶ Tjuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 188.

Meskipun kemenangan dan pencalonannya sebagai presiden untuk periode 1999-2004 menimbulkan polemik di kalangan para ulama, salah satu fungsionaris PDI Perjuangan Aberson Malhe Sihalohe dengan sangat optimis mengatakan, “bahwa MPR hanya tinggal menyetujui palunya untuk mengesahkan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia ke 4 periode 1999-2004.”¹³⁷ Dengan banyaknya kelompok yang tidak menerima dan kontra terhadap kemenangan yang diperoleh oleh Mega dan PDI Perjuangan serta pencalonan Megawati sebagai presiden tidak membuat Megawati menjadi kendor dan surut langkah. Tetapi justru membuat Megawati semakin keras berjuang untuk terus maju dalam pemilihan presiden. Dengan banyaknya pihak-pihak yang menentang langkah Mega membuat nama Megawati dan PDI-Perjuangan semakin melambung ke setiap penjuru daerah di Indonesia dan tetap menjadi pemenang.

Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999 ini sebenarnya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak terutama dukungan dari kalangan arus bawah dan karisma almarhum Bung Karno. Menurut Ahmad Suhelmi, salah seorang pengamat politik Universitas Indonesia menilai bahwa kemenangan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab kemenangan partai tersebut dalam, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan sangat baik dalam memanfaatkan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. PDI perjuangan mengklaim dirinya sebagai partai reformis yang berusaha melakukan perubahan secara radikal dari masa Orde Baru ke masa reformasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, keadilan, dan

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 34

kesejahteraan. Kedua, banyak kalangan yang memberikan dukungan pada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri karena pengetahuan politik mereka yang terbatas. Ketiga, Megawati berhasil menempatkan posisi partainya sebagai artikulasi kaum tertindas. Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya penindasan politik yang dilakukan selama masa rezim Orde Baru terhadap Megawati Soekarnoputri. Keempat, tidak dapat disangkal bahwa kharismatik Soekarno turut mendukung suksesnya Megawati dalam meniti karier politik. Kelima, karena adanya polarisasi dan konflik internal antar partai-partai Islam sangat menentukan kemenangan barisan Megawati.¹³⁸

Sementara itu, menurut Sabam Sirait bahwa Megawati dapat menang dalam Pemilu 1999 karena dukungan terhadapnya menjadi besar. Hal tersebut terjadi karena rakyat menghendaki adanya suatu perubahan. Mereka juga mencari sesuatu yang baru yang belum ditemukan dalam diri Soekarno maupun Soeharto, sehingga ingin mencari figur pemimpin yang dapat memimpin dengan baik menuju perubahan, dan figur pemimpin yang mereka cari ada dalam diri Megawati. Rakyat yakin bahwa Megawati dapat mengerjakan sesuatu yang besar bagi bangsanya.¹³⁹

Akan tetapi, keinginan pendukung PDI-P untuk menjadikan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden tidak terlaksana. Sebab dalam acara pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999, Megawati menghadapi banyak

¹³⁸ Rusdi Muchtar, *op. cit.*, hlm. 32. Baca juga Arif Zulkifli, *op. cit.*, hlm. 200.

¹³⁹ Rusdi Muchtar, *Ibid.*

kendala secara eksternal maupun internal agar dalam SU MPR 1999 Megawati tidak terpilih menjadi presiden meskipun dalam Pemilu 1999 unggul.¹⁴⁰

Adapun kendala-kendala eksternal yang dihadapi oleh Megawati adalah sebagai akibat adanya resistensi yang cukup kuat di kalangan Islam terhadap figur wanita Megawati, antara lain secara langsung mulai muncul fatwa dari Kongres Umat Islam di Jakarta yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus seorang laki-laki. Kendala lainnya adalah adanya sikap dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia yang menyatakan bahwa haram hukumnya untuk memilih preside wanita. Selain itu muncul pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Megawati merupakan representasi dari kalangan nasionalis sekuler dan sekaligus juga dianggap sebagai non-representasi dari gerakan reformis.¹⁴¹

Sedangkan kendala internal yang menghadang langkah Megawati untuk terus maju ke kursi kepresidenan adalah sikap pribadi Megawati sendiri yang lebih menonjolkan unsur dari ayahandanya Ir. Soekarno yang dinilai dekat dengan kultur Jawa yang abangan. Sedangkan unsur ibundanya Fatmawati yang dekat dengan kalangan pesantren kurang ditonjolkan dalam sikap pribadi Megawati, sehingga menyebabkan Megawati kurang dalam merangkul tokoh-tokoh Muslim dan kurang sensitif terhadap aspirasi Islam. Kendala internal lainnya adalah tentang kemampuan intelektual Megawati yang diragukan oleh kalangan kaum nasionalis yang merupakan kubu pendukungnya. Selain itu visi Megawati terhadap penanggulangan krisis ekonomi dan keuangan yang sangat parah juga

¹⁴⁰ Tjuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 196.

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 197.

diragukan terlebih dengan sikap pendiam dan tertutup kepada pers.¹⁴² Mengingat kendala tersebut diatas maka Sidang Umum MPR tahun 1999 memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri hanya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid menjalankan tugas-tugasnya.



¹⁴² *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai “Peranan Megawati Soekarnoputri Sebagai Politisi Tahun 1987-1999” membahas tiga permasalahan yaitu apa pengalaman politik Megawati Soekarnoputri dari masa kanak-kanak tahun 1947-1987?, apa saja peranan Megawati Soekarnoputri dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tahun 1987-1993?, dan mengapa Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan perebutan jabatan Ketua Umum PDI tahun 1993-1999?. Dari ketiga permasalahan tersebut maka dapat dibuat hipotesis kalau dalam keluarga Megawati Soekarnoputri memperoleh pendidikan dan pengetahuan politik dengan baik maka ia tidak akan canggung lagi berkarier dan memimpin partai politik. Kalau banyak berjasa dalam Partai Demokrasi Indonesia maka ia akan dipilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Kemudian kalau Megawati sabar dan rendah hati dalam menghadapi berbagai tekanan serta dapat memahami masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh partai maka Megawati akan memperoleh banyak pendukung untuk memenangkan perebutan jabatan sebagai Ketua Umum PDI. Dari uraian bab II, III, dan IV maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang kehidupan politik Megawati Soekarnoputri yang berawal sejak tahun 1987-1999. Dalam kehidupan Megawati sejak lahir telah mengalami berbagai hal yang menyangkut masalah politik, sebab sebagai anak seorang presiden Megawati harus berhadapan pada berbagai masalah politik yang dihadapi oleh Bung Karno sebagai presiden. Setelah meninggalnya Bung Karno, Megawati dan keluarga besar Bung Karno

tidak lepas dari pengawasan dan tekanan dari pemerintahan Soeharto. Kemudian keluarga besar Bung Karno sepakat untuk membuat konsensus yang ditandatangani oleh anak-anak Bung Karno untuk tidak terjun dalam organisasi politik manapun. Termasuk juga dalam Partai demokrasi Indonesia (PDI). Sampai pada akhirnya Soerjadi mendatangi anak-anak Bung Karno dan mengajak mereka bergabung dalam PDI. Ajakan Soerjadi disambut oleh Megawati Soekarnoputri setelah gagal merekrut Guntur Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI.

PDI merupakan partai yang terbentuk sebagai hasil fusi lima partai pada tahun 1973 dibawah pemerintahan Soeharto. Kelima partai yang bergabung dalam PDI adalah PNI, IPKI, Partai Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Partai PDI merupakan partai yang penuh dengan konflik intern karena partai-partai yang berfusi dalam PDI merupakan partai yang berbeda-beda ideologi, sehingga muncul berbagai konflik baik itu konflik pergantian pemimpin maupun identitas partai. Sejak terbentuk sebagai partai dengan nama PDI bahkan konflik intern PDI tidak pernah ada surutnya, partai tersebut tidak pernah memperoleh suara banyak dalam pemilu. Keadaan menjadi berubah setelah Megawati bergabung dalam PDI dan mendapatkan peran sebagai juru kampanye PDI, dalam setiap pemilu berhasil mendobrak perolehan suara PDI dalam Pemilu 1987 dan Pemilu 1992.

Kehadiran Megawati selalu ditunggu-tunggu oleh para pendukung PDI terutama mereka yang merupakan bekas pendukung PNI dan pengikut Bung Karno. Pada awalnya pemerintah membiarkan kiprah Megawati dalam PDI karena sikap diam Megawati dianggap tidak berbahaya. Setelah kongres PDI di Medan pada tahun 1993 mengalami kegagalan dalam memilih ketua umum partai, Megawati dimunculkan sebagai kandidat calon oleh orang-orang PDI yang

menginginkan adanya perubahan dan mencari figur pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah internal PDI dalam KLB PDI yang dilaksanakan di Surabaya tahun 1993.

Langkah Megawati berkarier dalam dunia politik nasional mulai mendapat berbagai cobaan dan perlawanan yang datang dari intern PDI maupun pemerintah Orde Baru. Kemajuan Megawati dalam meniti karier politik nasional dianggap sebagai kebangkitan kembali Soekarnoisme. Dalam KLB PDI di Surabaya konflik juga terjadi karena perbedaan pendapat sistem pemilihan ketua umum karena para pendukung Megawati menginginkan pemilihan berdasar suara terbanyak dan para *Caretaker* pimpinan Latief Pudjosakti menghendaki sistem formatur sehingga kongres diskors. Megawati berhasil menyingkirkan kandidat calon lainnya yang mendapat dukungan dari pemerintah, dan secara *de facto* terpilih sebagai pemimpin PDI. Kemudian secara aklamasi kepemimpinannya diakui melalui Munas PDI tahun 1993 di Jakarta.

Belum lama Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI dan membentuk pengurus DPP mulai muncul konflik yang mengguncang kepemimpinan Megawati dalam PDI. Konflik pertama yang muncul dalam kepemimpinan Megawati yakni pada saat muncul isu-isu keterlibatan sejumlah pengurus PDI dalam G 30 S/PKI. Isu tersebut menyebabkan munculnya pmbelot-pembelot dalam DPP PDI pimpinan Megawati dan bahkan secara terang-terangan dibawah pimpinan Yusuf Merukh membentuk DPP *Resuffle* dan menentang kepemimpinan Megawati dalam PDI. Megawati berhasil menghadapi perlawanan DPP *Resuffle*, tetapi konflik terus saja muncul dalam kepemimpinan Megawati. Perlawanan yang lain datang dari koleganya sendiri Fatimah Achmad yang

melakukan pembelotan terhadap kepemimpinan Megawati. Pembelotan Fatimah Achmad ini berawal dari adanya usulan diselenggarakannya kongres PDI. DPP PDI pimpinan Megawati pun terpecah menjadi dua yakni “Kelompok 11” pimpinan Megawati dan “Kelompok 16” pimpinan Fatimah Achmad. Perpecahan DPP PDI pimpinan Megawati karena adanya perbedaan pendapat dimana Megawati dan para pendukungnya menolak dilaksanakannya kongres, sedangkan Fatimah Achmad dan pendukungnya menuntut diselenggarakannya kongres PDI. Kongres PDI kemudian dilaksanakan di Medan dan secara aklamasi memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI sehingga PDI terdapat dua pemimpin meskipun pemerintah tidak menganggap terjadi keambiguan dalam PDI.

Konflik Kongres IV PDI (kedua) di Medan semakin meluas. Puncak dari konflik tersebut adalah penyerangan yang dilakukan oleh para pendukung kongres IV PDI (kedua) di Medan terhadap kantor DPP PDI yang terletak di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, kantor tersebut merupakan kantor DPP PDI pimpinan Megawati. Dalam penyerangan tersebut kubu Megawati mengalami ketidakadilan dan dituduh sebagai terdakwa pelaku utama penyerangan. Kekerasan mulai muncul di berbagai daerah di Jakarta dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Megawati sebagai seorang pemimpin melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan bagi para pendukungnya. Ketidakadilan yang ia alami bersama dengan para pendukungnya telah membawa hikmah dengan mengalirnya para pendukung dan simpatisan yang datang dari berbagai pihak. Menjelang pemilu 1997 Megawati mengambil sikap tidak menggunakan hak pilihnya setelah PDI pimpinannya tidak diikutsertakan sebagai kontestan pemilu 1997 karena kepemimpinannya dianggap ilegal.

PDI pimpinan Megawati terus berjuang dan mulai bangkit kembali. Pada masa reformasi, para mahasiswa dibantu oleh berbagai LSM melakukan demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Lengsernya Soeharto membawa Megawati dan PDI Perjuangan bangkit, apalagi setelah Wakil Presiden B. J. Habibie diangkat sebagai presiden menggantikan Soeharto. Diangkatnya B. J. Habibie sebagai presiden memberikan peluang bagi setiap orang atau organisasi yang ingin mendirikan partai. Kesempatan tersebut digunakan oleh Megawati untuk minta ijin menyelenggarakan kongres PDI ke V. Melalui kongres PDI V di Bali, secara aklamasi Megawati terpilih sebagai ketua Umum PDI Perjuangan. Pada kongres PDI V tersebut diputuskan juga untuk memenangkan Pemilu 1999 dan memperjuangkan Megawati sebagai calon presiden dalam Sidang Umum MPR.

Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan muncul sebagai pemenang dengan memperoleh suara terbanyak sebanyak 34% dan mengalahkan lima partai besar lainnya. Meskipun menang dalam pemilu dengan suara terbanyak tetapi Megawati tidak secara langsung dapat menjadi presiden, karena suara yang ia peroleh tidak mencapai 50%. Selain itu muncul fatwa dari Kongres Umat Islam yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus seorang laki-laki dan adanya sikap dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia yang menyatakan bahwa haram hukumnya untuk memilih presiden wanita. Untuk itu dalam sidang Umum MPR tahun 1999, akhirnya Megawati hanya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden Republik Indonesia keempat.

Kegigihan Megawati dalam menjalani kariernya di dunia politik menunjukkan bahwa tidak hanya orang yang berlatar pendidikan politik saja yang dapat meniti karier di dunia politik. Orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan politik pun dapat menjadi seorang politikus meskipun hanya mengalami berbagai pengalaman kerasnya kehidupan politik. Megawati Soekarnoputri contohnya, meskipun ia tidak menempuh pendidikan politik di sekolah tetapi ia mengalami berbagai pengalaman tentang kerasnya kehidupan politik yang menimpa ayahnya Bung Karno dan keluarganya, dan memperoleh pendidikan politik dari ayahandanya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Megawati juga menunjukkan bahwa seorang wanita dapat berperan aktif dalam suatu organisasi atau partai politik sebagai juru kampanye maupun pemimpin partai. Meskipun dalam menjalani kariernya banyak sekali perlawanan yang muncul untuk menyingkirkan Megawati dari kedudukannya sebagai pemimpin partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Elisabeth Sukanto, dkk. *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. Gramedia. Jakarta. 1991.
- Andi Setiono, dkk. *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa Di Indonesia*. Tarawang Press. Jakarta. 2000.
- Arif Budiman. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Gramedia. Jakarta. 2002.
- Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 1996.
- Cindy Adam, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1966.
- Dhakidae, Daniel. *Partai-Partai Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program (Edisi Pemilu)*. Kompas Mesia Nusantara. Jakarta. 1999.
- Gottchalk, Louis. *Mengerti sejarah*. UII Press. Jakarta. 1969.
- Harsono Suwardi, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Hasrullah. M.A, *Megawati Dalam Tangkapan Pers*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Heuken SJ, A. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila. Jilid IV: A-Z. Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta. 1989.*
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu sejarah*. Yayasan Bentang Budaya. Yogyakarta. 1995.
- Lay, Cornelius, dkk. *Megawati Soekarnoputri Menolak Politik Anti Nurani*. BIGRAF Publishing. Yogyakarta. 1999.
- Manuel Kaisepo, *Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas*. Prisma No. 12 Desember 1981.
- Megawati Soekarnoputri, *Bendera Telah Saya Kibarkan: Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dian Rakyat. Jakarta. 1972.
- _____. *Partisipasi Partai Politik*. Gramedia. Jakarta. 1981.



Mohammad Thiyibi, *Menentang Arogasi Kekuasaan Kasus Mega Bintang*, Nuhannadiyah University Press, Surakarta, 1999.

Mukhlisin dan Damarhuda, *Ratu Adil dan Perjalanan Spiritual Megawati*, Yayasan Penerbit Purbakala, Bali, 1999.

Nur Hidayah. *Kontroversi Presiden Wanita*. Pabelan Jakarta. 1998.

Oka Kusumayudha, dkk. *Megawati Dari Istana Menuju Istana Negara. Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta. 2001.

....., *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejahteraan Suatu Prasarana Pada Berbagai Lokakarya. Jilid I*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta. 1983.

Poerwodarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976.

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jilid II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1992.

Ratvic, Diane. *Apakah Demokrasi Itu? (Terjemahan)*. USIA.

Rusdi Mughtar, dkk. *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*. Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2002.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Edisi Pertama*. Modern English Press. Jakarta. 1991.

Soedjono Dirdjosisworo. Prof. Dr, *Megawati Dalam Babar Sejarah Pemimpin Perempuan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Soelistyowati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Sri Sukesi Adi Wimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jilid II*. Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta. 1983.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Balai Pustaka. Jakarta. 1991.

Sumarno. *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. Rumpun Dian Nugraha. Depok. 2002.

Surensen, George. *Demokrasi dan Demokrasi (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003.

Tjuk Setyohadi. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*, CV. Jakarta Cooperation, Jakarta, 2002.

Umarudin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, I.kiS, Yogyakarta, 1999.



Majalah:

- A. Luqman, A., "PDI: Sang Bima Masa Depan", *Tempo* No. 47 Tahun XVI, Edisi 17 Januari 1987.
- Agus Basri & Nunik Iswardhani, "Mega dan Berbagai Tanda", *Tempo* No. 43 Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993.
- Ardian Taufik Gesuri, "Mereka Ahli Waris Nama Besar", *Tempo* No. 42 Tahun XXIII, Edisi 18 Desember 1993.
- Ardian Taufik Gesuri, "Pergulatan Arus Atas dan Bawah", *Tempo* No. 40 Tahun XXIII, Edisi 4 Desember 1993.
- Budiman S. Hartoyo, dkk, "Apa di Balik Mega", *Tempo* No. 41 Tahun XXIII, Edisi 11 Desember 1993.
- Putut Trihusodo, dkk, "Lakon Megawati dalam Partai", *Tempo* No. 43 Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993.
- _____, "Mega Menang, Mega Dijegal", *Tempo* No. 41 Tahun XXIII, Edisi 11 Desember 1993.
- _____, "Setelah Serangan Pagi di Markas PDI", *Gatra* No. 38. Vol. II, Edisi 3 Agustus 1996.
- Putut Trihusodo, & Linda Djalil, "Mencari Bayang-Bayang Bung Karno", *Tempo* No. 42 Tahun XXIII, Edisi 18 Desember 1993.
- Putut Trihusodo & Ardian Taufik Gesuri, "Nama Besar di Balik Megawati", *Tempo* No. 40 Tahun XXIII, Edisi 4 Desember 1993.

Sumber Internet:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, *Press Release: Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Tanggal 3-4 Juni 1996*,
http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/15/utama3_1.htm.

DPP PDI, *Keputusan Ketua Umum DPP PDI No: 01-KU/KPTS/VI/1996 Tentang Pembebas-tugasan 16 Fungsionaris DPP PDI*,
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama3.htm>.

Edi. W, *Peta Kerusuhan 27 Juli 1996*, dalam
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/23/utama.htm>

Komite Pimpinan Pusat Partai Demokratik Rakyat (KPP-PRD), *Siaran Pers: Aksi Corat-Coret (Grafitty Action) dan Penempelan Poster Boikot Pemilu 1997*, <http://www.xs4all.nl/~peace/arc/arceng/state/stprdf3.html>.

KPP-PRD: Ajakan Boikot Pemilu, Membentuk Koalisi Demokratik Kerakyatan, dan Mengangkat Presiden Baru,
<http://www.xs4all.nl/~peace/arc/arceng/state/stprd8.html>.

Lampiran Keputusan Ketua Umum DPP PDI Nomor: 01-KU/KPTS/VI/1996,
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama4.htm>.

Nanang Dwi Prasetyo, *Foto Kerusuhan di Depan Kantor DPP PDI*, dalam
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/23/foto2.htm>.

N.N. *Perjuangan Merebut Benteng Keadilan*. <http://megaforpresident.org/books/htm>.

Revi, *Foto Wawancara Megawati Soekarnoputri 9 Agustus 1996*, dalam
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/24/foto.htm>.

Rully Kesuma, *Foto Kebakaran Gedung Mayapada dan Auto 2000 Akibat Amuk Massa 27 Juli 1996*, dalam
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/23/foto1.htm>.

Walas Krenak, *PDI Perjuangan Jangan Sampai "Terbonsai" Akibat Konflik, Utamakan Kepentingan Rakyat*,
<http://www.suarapembaharuan.com/News/2000/09/11/Nasional/na02/na02.html>.

Wartawan Lepas Tempo Interactive, *Wawancara Kwik Kian Gie: "Kalau Soerjadi Menjadi Ketua Seperti Apa Suasana PDI?"*,
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/17/utama8.htm>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Lampiran 1



Foto : Revi

Gambar 1

Foto: Wawancara Megawati 9 Agustus 1996 oleh Revi dalam, <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/24/foto.htm>

Lampiran 2



Foto: Nanang Dwi Prasetyo

Gambar II

Foto: Kerusuhan di depan kantor DPP PDI oleh Nanang Dwi Prasetyo dalam, <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/23/foto2.htm>

Lampiran 3

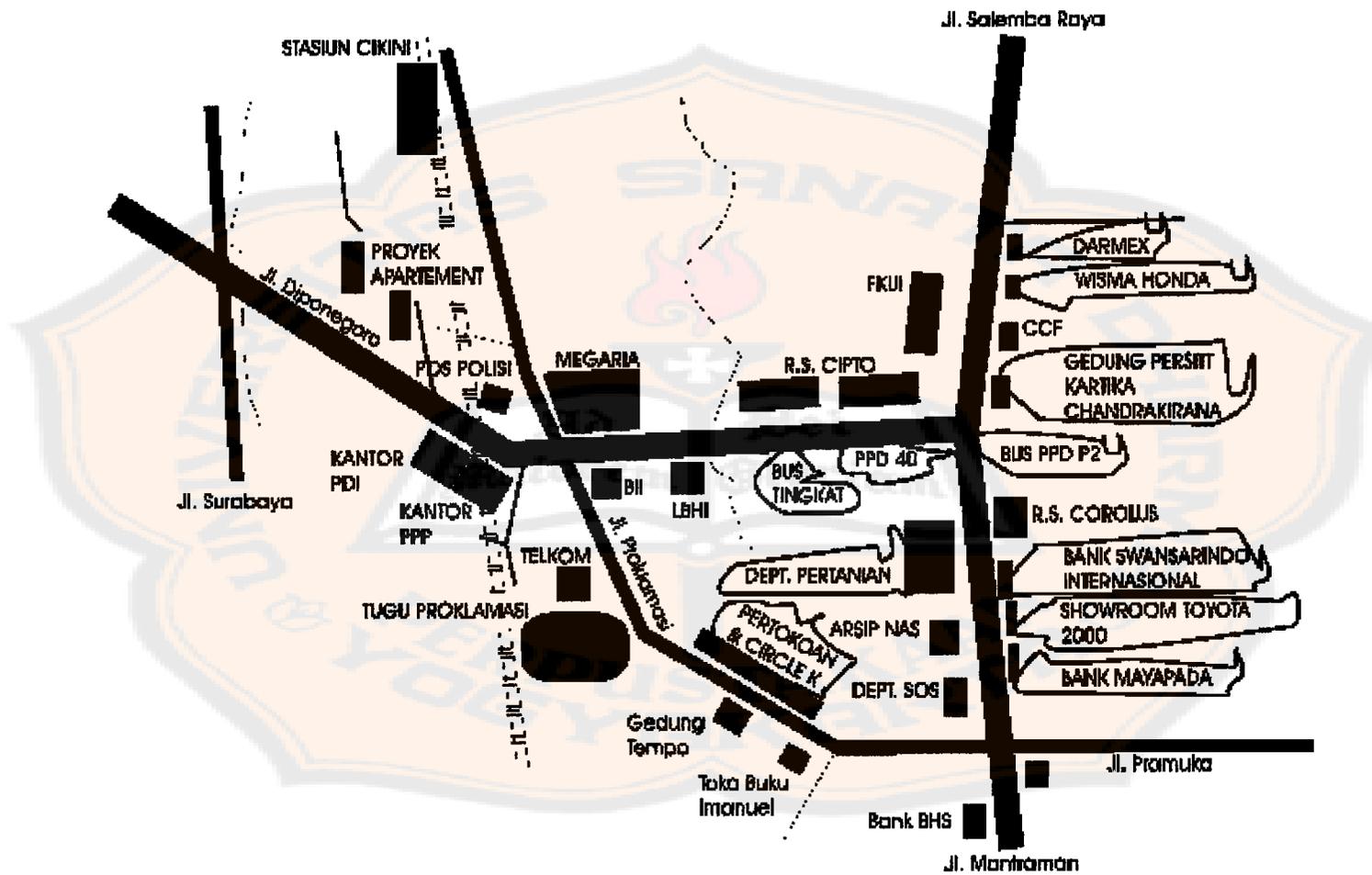


Foto : Rully Kesuma

Gambar III

Foto: **Kebakaran gedung Bank Mayapada dan Auto 2000** akibat amuk massa 27 Juli 1996, oleh Rully Kesuma dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/01/23/foto1.htm>

Lampiran 4



Gambar IV
Peta Kerusuhan 27 Juli 1996

Suplemen

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR

Nama Sekolah : SMA/MA

Mata pelajaran : Sejarah

Kelas, Semester : XI/2

Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis proses jatuhnya pemerintah Orde Baru serta terjadinya reformasi.

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian	Mata Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi waktu	Penilaian			Sumber bahan
					Jenis Tagihan	Bentuk tagihan	Contoh Tagihan	
Menguraikan peranan Megawaati Soekarno Putri sebagai Politisi tahun 1987-1999	Mendeskripsikan pengalaman politik Megawati Soekarno Putri dari masa kanak-kanak tahun 1947-1987	1. Pengalaman politik Megawati Soekarno Putri dari masa kanak-kanak tahun 1947-1987. a. Masa kecil Megawati Soekarno Putri. b. Pendidikan Megawati Soekarno Putri c. Pendidikan politik Megawati Soekarno Putri d. Kehidupan keluarga Megawati Soekarno Putri e. Terjunnya Megawati Soekarno Putri dalam Dunia Politik	Mendiskusikan pengalaman politik Megawati Soekarno Putri dari masa kanak-kanak tahun 1947 - 1987		Tugas	Uraian	1. Deskripsikan pengalaman politik Megawati Soekarno Putri dari mas kanak-kanak t6ahun 1947- 1987	Rusdi Muchtar dk, Megawati Soekarno Putri Presiden Republik Indonesia, 2002, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok Sumarno, Megawati Soekarno Putri dari Ibu rumah tangga sampai Istana Negara, 2002 PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian	Mata Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi waktu	Penilaian			Sumber bahan
					Jenis Tagihan	Bentuk tagihan	Contoh Tagihan	
	Mendeskrripsikan peranan Megawati Soekarno Putri dalam Frakssi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) tahun 1987-1993	<p>2. Peranan Megawati Soekarnoputri dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) tahun 1947-1987</p> <p>a. Partai Demokrasi Indonesia</p> <p>a.1. Sejarah Singkat Berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI).</p> <p>a.2. Konflik Intern dan masalah-masalah lain yang muncul dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia</p> <p>b. Peranan Megawati Soekarnoputri dalam PDI tahun 1987-1993</p> <p>c. Megawati Soekarnoputri dalam KLB PDI di Surabaya tahun 1993</p>	Mendiskusikan peranan Megawati Soekarno Putri dalam Partai Demokrasi Indonesia tahun 1987 – 1993		Tugas	Uraian	<p>2. Jelaskan peranan Megawati Soekarno Putri dalam Frakssi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) tahun 1987-1993</p>	<p>Andi Setiono, dkk, Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia, 2000, Terawang Press, Yogyakarta.</p> <p>Arif Zulkifli PDI dai mata Golongan Menengah Indonesia, 1996. PT. Grafiti, Jakarta</p> <p>Andriana Eli Sukamto, PDI dan Prospek Pembangunan Politik 1991. PT. Grasindo, Jakarta</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian	Mata Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi waktu	Penilaian			Sumber bahan
					Jenis Tagihan	Bentuk tagihan	Contoh Tagihan	
	Mendeskripsikan Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan jabatan Ketua Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) tahun 1993-1999	<p>3. Megawati Soekarnoputri mampu memenangkan jabatan Ketua Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, (FPDI) tahun 1991999.</p> <p>a. Kepemimpina Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia.</p> <p>b. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia. Dihantam oleh badai politik:</p> <p>b.1.Munculnya DPP Resuffle pimpinan Yusuf Merukh.</p> <p>b.2.Kongres II(kedua) PDI di Medan: Pembelotan Fatimah Achmad dari DPP PDI Megawati Soekarnoputri</p> <p>b.3.Peristiwa 27 Juli 1996, Puncak Penggusuran Megawati Soekarnoputri.</p> <p>c. Hikmah dari “Insiden Sabtu Kelabu,” 27 Juli 1996 bagi karier politik</p>	Mendiskusikan Megawati Soekarno Putri mampu memenangkan jabatan ketua Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tahun1993-1999		Ulangan	Uraian	<p>3. Jelaskan bagaimana mampu memenangkan jabatan ketua Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tahun1993-1999</p>	<p>Andi Setiono, dkk, Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia, 2000, Terawang Press, Yogyakarta.</p> <p>Arif Zulkifli PDI di mata Golongan Menengah Indonesia, 1996. PT.Grafiti, Jakarta</p> <p>Andriana Elisabeth Sukamto, PDI dan Prospek Pembangunan Politik 1991. PT. Grasindo, Jakarta</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian	Mata Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi waktu	Penilaian	Sumber bahan
		d. Pemilu 1997 Megawati menentukan sikap golput. e. Pengakuan pemerintah terhadap PDI perjuangan pimpinan Magawati Soekarnoputri f. Megawati Soekarnoputri: Kemenangan Mayoritas PDI Perjuangan dalam pemilu 1999.				

Mengetahui
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

Pengesahan

Yogyakarta, 4 Februari 2006
Guru Mata Pelajaran

(Jovita Ria Catur Wardani)

